

**STRATEGI POLITIK PEMENANGAN PASANGAN
TUNGGAL DALAM MELAWAN GERAKAN KOTAK
KOSONG (GERTAK) PADA PILKADA BREBES TAHUN
2024**

SKRIPSI
Program Studi (S-1) Ilmu Politik



Disusun Oleh :

ZIDANA ZIANIDA

2106016037

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**

MOTTO

*"Everything you've ever wanted is on the
other side of fear."*

*(Segala sesuatu yang kamu inginkan ada di
sisi lain dari rasa takut.)*
– George Addair

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Teruntuk kedua orang tuaku tersayang, Bapak Nasori, S.Pd dan Ibu Henty Mufiyaty. Terima kasih atas kasih sayang yang tiada batas, doa yang selalu menyertai, serta pengorbanan yang tak ternilai harganya.
2. Kakaku, Firna Firdausia, S.Pd., Fara Ardiyanti, S.S., Zahra Ariza Firdausia, S.S., Firza Akvila, serta adikku tersayang, Filah Azzami. Terima kasih atas dukungan, support, kasih sayang, dan keceriaan yang selalu kalian hadirkan dalam hidupku.
3. Diri saya sendiri, Zidana Zianida. Sebagai penghargaan atas segala usaha, ketekunan, dan perjuangan yang telah dilalui. Terima kasih telah terus berjuang melewati segala tantangan dan tetap percaya pada kemampuan sendiri untuk menyelesaikan skripsi serta menuntaskan pendidikan S1 ini.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zidana Zianida
NIM : 2106016037
Jurusan : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN
Walisongo
Judul Skripsi : Strategi Politik Pasangan Tunggal dalam
Melawan Gerakan Kotak Kosong
(Gertak) pada Pilkada Brebes Tahun
2024

Penulis dengan tegas menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil dari penelitian yang dilakukan secara mandiri. Semua kutipan ataupun referensi telah dituliskan dengan mengikuti aturan kepenulisan yang berlaku.

Semarang, 04 Juni 2025



METERAI
TEMPEL
10000
Rp 10.000
6635DAJX366091055

Zidana Zianida

2106016037

NOTA PEMBIMBING

Lam : -
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Dekan FISIP UIN Walisongo
Di Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah mempertimbangkan aspek Akademisi dan Administratif dilanjutkan dengan membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya menyatakan bahwa Skripsi dari Mahasiswi :

Nama : Zidana Zianida
NIM : 2106016037
Jurusan : Ilmu Politik
Judul : Strategi Politik Pemenangan Pasangan Tunggal dalam
Melawan Gerakan Kotak Kosong (Gertak) pada Pilkada
Brebes Tahun 2024

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diajukan untuk diujikan.
Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Semarang, 04 Juni 2025
Pembimbing



Sholkah Mufrikah M.Si.
NIP. 198505102023212058

PENGESAHAN

Strategi Politik Pemenangan Pasangan Tunggal dalam Melawan Gerakan Kotak Kosong (Gertak) pada Pilkada Brebes Tahun 2024

Disusun oleh :

Zidana Zianida

2106016037

Telah diujikan dalam sidang munaqosah oleh Dewan Penguji Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo pada tanggal 23 Juni 2025 dan dinyatakan LULUS

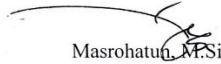
SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua

A circular official stamp of UIN Walisongo is partially visible behind the signature. The signature is in black ink and is stylized.

Solikhah Mufrikhah, M.Si
NIP. 198505102016012901

Sekretaris

A horizontal signature in black ink, appearing to be 'Masrohatun'.

Masrohatun, M.Si
NIP. 198806212018012001

Penguji

A stylized signature in black ink, appearing to be 'Tika Ifrida'.

Tika Ifrida Takayasa, M.A
NIP. 198811152019032018

ABSTRAK

Penelitian ini membahas strategi politik pemenangan pasangan calon tunggal dalam melawan gerakan kotak kosong (Gertak) pada Pilkada Brebes tahun 2024. Fenomena calon tunggal yang melawan kotak kosong menjadi perhatian khusus karena menandakan dinamika demokrasi lokal yang unik, khususnya di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, di mana gerakan kotak kosong berlangsung paling masif dibandingkan daerah lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap tim pemenangan pasangan Paramitha-Wurja, relawan Gertak, serta pihak terkait lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi politik pasangan tunggal dirancang secara terarah melalui analisis situasi, pemetaan wilayah berbasis risiko politik Gertak, dan segmentasi pemilih strategis seperti petani bawang merah, pelaku UMKM, pemilih muda, perempuan pedesaan, dan lansia. Strategi ofensif meliputi penguatan narasi legitimasi, mobilisasi tokoh masyarakat, kampanye simbolik, penetrasi komunikasi digital. Sementara itu, strategi defensif difokuskan pada pengelolaan isu, manajemen krisis, klarifikasi tuduhan, kerusakan APK Gertak, serta pemanfaatan media lokal untuk membangun citra positif.

Tingginya suara kotak kosong (40,40%) dan rendahnya partisipasi pemilih di Brebes, hal ini menandakan adanya ketidakpuasan dan tantangan legitimasi bagi pasangan tunggal Paramitha-Wurja. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu politik, khususnya terkait strategi pemenangan calon tunggal dan dinamika gerakan kotak kosong dalam demokrasi lokal di Indonesia.

Kata kunci: strategi politik, pasangan tunggal, gerakan kotak kosong, Pilkada Brebes, pemenangan, demokrasi lokal.

ABSTRACT

This study discusses the political strategies employed by the sole candidate pair in their campaign against the blank ballot movement (Gertak) in the 2024 Brebes regional elections. The phenomenon of a sole candidate running against a blank ballot is of particular interest because it signifies a unique dynamic in local democracy, especially in Brebes Regency, Central Java, where the blank ballot movement has been most widespread compared to other regions. This research employs a qualitative approach using a case study method, collecting data through in-depth interviews, observations, and documentation of the Paramitha-Wurja campaign team, Gertak volunteers, and other relevant stakeholders.

The research findings indicate that the single candidate pair's political strategy was designed strategically through situational analysis, political risk mapping of Gertak-prone areas, and strategic voter segmentation such as red onion farmers, SME actors, young voters, rural women, and the elderly. Offensive strategies include strengthening legitimacy narratives, mobilizing community leaders, symbolic campaigns, and digital communication penetration. Meanwhile, defensive strategies focus on issue management, crisis management, clarifying allegations, damaging Gertak's APK, and leveraging local media to build a positive image.

The high percentage of blank votes (40.40%) and low voter turnout in Brebes indicate dissatisfaction and legitimacy challenges for the sole candidate pair Paramitha-Wurja. This study is expected to enrich political science research, particularly regarding, particularly regarding the winning strategies of single candidates and the dynamics of the blank ballot movement in local democracy in Indonesia.

Keywords: political strategy, single candidate, blank ballot movement, Brebes local elections, victory, local democracy.

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas karunia-Nya, yang telah memungkinkan penulis menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “Strategi Politik Pemenangan Pasangan Tunggal dalam Melawan Gerakan Kotak Kosong (Gertak) pada Pilkada Brebes Tahun 2024.” Penelitian ini merupakan bagian dari syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam strategi politik yang diterapkan oleh pasangan tunggal dalam menghadapi dan melawan gerakan kotak kosong (Gertak) pada Pilkada Brebes tahun 2024. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan menggali berbagai upaya dan tantangan yang dihadapi dalam proses pemenangan serta mengevaluasi efektivitas strategi yang digunakan.

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu politik, khususnya dalam konteks pemilihan kepala daerah, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam menyusun strategi pemenangan yang lebih efektif pada Pilkada.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Nizar, M. Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. Imam Yahya, M.Ag., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ibu Solkhah Mufrikhah, M.Si., selaku pembimbing skripsi. Terima kasih telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini. Masukan serta saran dari ibu sangat berpengaruh dalam melakukan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Tolkhatul Khoir, M.Ag, selaku dosen wali akademik. Terima kasih telah membimbing penulis dari awal perkuliahan hingga akhir semester.
5. Seluruh dosen, pegawai, dan staf TU FISIP UIN Walisongo Semarang yang telah membantu memenuhi semua kebutuhan akademik serta mendukung penelitian penulis selama menempuh pendidikan.
6. Bapak Azmi Majid, S.E., selaku Ketua Tim Sukses Pasangan Paramitha – Wurja yang telah bersedia menjadi pembimbing dan narasumber utama dalam riset penelitian ini.
7. Bapak Slamet Maryoko, S.H., selaku Koordinator Gerakan Kotak Kosong (Gertak) yang telah bersedia meluangkan waktu berdiskusi dengan penulis serta kerjasama dalam pelaksanaan penelitian.

8. Claudio Sagala, terima kasih untuk semua support, motivasi, dan kehadiran yang selalu menemani penulis sejak masa sekolah menengah hingga perkuliahan. Kehadiranmu memberikan warna dan semangat tersendiri dalam perjalanan akademik ini.
9. Milo, kucing kesayangan yang selalu setia menemani dan memberikan hiburan di tengah kesibukan penulisan skripsi.
10. Seluruh teman-teman penulis khususnya Devi Afiya Aryati, Lilis Lisefati Imani, Rifa Yuanda, Risma Sintiya Dewi dan Ami Nurafni, terima kasih selalu sabar mendengarkan setiap cerita, keluh kesah, dan perjuanganku selama masa perkuliahan, terima kasih atas dukungan dan kebersamaan yang tak ternilai.
11. Semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kesempatan selama proses penyusunan skripsi ini. Tanpa kontribusi dan kerja sama dari berbagai pihak, penulis tidak akan dapat menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR ISI

MOTTO	ii
PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
NOTA PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	xviii
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9

F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II TEORI STRATEGI POLITIK.....	27
A. Pengertian Strategi Politik	27
B. Ciri-ciri Strategi Politik	31
C. Esensi Strategi Politik	32
D. Tujuan Strategi Politik.....	34
E. Manfaat dan Kriteria Strategi Politik	35
F. Jenis Pendekatan Strategi Politik	37
G. Pelaku Strategi Politik.....	41
H. Proses Strategi Politik	43
BAB III GAMBARAN UMUM DAN DINAMIKA POLITIK LOKAL BREBES.....	45
A. Gambaran Umum Kabupaten Brebes.....	45
1. Kondisi Georafis dan Demografis Kabupaten Brebes.....	45
2. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya Kabupaten Brebes.....	53

B. Kondisi Politik Kabupaten Brebes	55
1. Sejarah Pemerintahan Kabupaten Brebes	55
2. Warna Politik Kabupaten Brebes	59
3. Profil Pasangan Tunggal.....	65
C. Dinamika Politik Lokal Kabupaten Brebes	68
1. Proses Pelaksanaan Pilkada Brebes.....	68
2. Pelanggaran pada saat Pilkada Brebes 2024.....	76
3. Faktor Penyebab Munculnya Pasangan Tunggal	79
4. Aksi Gerakan Kotak Kosong (Gertak) di Pilkada Brebes Tahun 2024	83

BAB IV STRATEGI POLITIK PEMENANGAN PASANGAN TUNGGAL DALAM MELAWAN GERAKAN KOTAK KOSONG PADA PILKADA BREBES TAHUN 2024.....106

A. Strategi Politik yang digunakan Pasangan Tunggal dalam Melawan aksi nyata Gertak pada Pilkada Brebes tahun 2024.....	106
1. Strategi Ofensif Pasangan Tunggal.....	106
2. Strategi Defensif Pasangan Tunggal	148

3. Efektivitas dan Evaluasi dari Strategi yang digunakan Pasangan Tunggal	157
BAB V HAMBATAN DAN TANTANGAN PASANGAN TUNGGAL DALAM MELAWAN GERAKAN KOTAK KOSONG PADA PILKADA BREBES TAHUN 2024.....	163
A. Hambatan dan Tantangan	163
BAB VI KESIMPULAN.....	180
A. Kesimpulan.....	180
DAFTAR PUSTAKA.....	182
LAMPIRAN.....	188
RIWAYAT HIDUP.....	200

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Luas Wilayah Kabupaten Brebes berdasarkan kecamatan.....	47
Tabel 3.2Jumlah Penduduk Tahun 2023 dan Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2020 - 2023 berdasarkan kecamatan di Kabupaten Brebes	48
Tabel 3.3Jumlah Penduduk laki – laki dan perempuan berdasarkan usia di Kabupaten Brebes.....	49
Tabel 3.4 APM dan APK Penduduk Kabupaten Brebes tahun 2023	52
Tabel 3.5 Perolehan Suara Partai Politik pada Pemilu.....	61
Tabel 3.6 Tahapan dan Jadwal Pilkada Tahun 2024.....	70
Tabel 3.7 Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024	75
Tabel 3.8 Keterangan Suara Sah dan Tidak Sah Perolehan Suara Pilkada Brebes Tahun 2024.....	75
Tabel 3.9 Struktur Organisasi Gerakan Kotak Kosong (Gertak) Brebes	84
Tabel 4.1 Pemetaan Wilayah Berdasarkan Kategori Risiko Politik Gertak.....	109
Tabel 4.2 Segmentasi Pemilih berdasarkan kelompok masyarakat dan pendekatannya.....	113

Tabel Tabel 6.1 Data Partisipasi Pemilih Jawa Tengah pada Pemilu
2024 166

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Peta Kabupaten Brebes	46
Gambar 3. 2 Aksi Sosialisasi dan Unjuk Rasa Gerakan Kotak Kosong (Gertak) dalam Pilkada Brebes 2024	94
Gambar 3. 3 Bukti Chat ancaman dari terduga tim lawan	99
Gambar 3. 4 Perusakan APK Gertak oleh Oknum Relawan Paslon Tunggal	101
Gambar 3. 5 Kerusakan Pada Aksi Demo.....	103
Gambar 4. 1 Slogan Brebes Beres	118
Gambar 4. 2 Daftar Pemilih Tetap Klasifikasi Usia	123
Gambar 4. 3 Unggahan Konten Digital di Akun Tiktok Pribadi Paramitha Widya Kusuma.....	125
Gambar 4. 4 strategi door to door yang dilakukan oleh Paramitha Widya Kusuma	130
Gambar 4. 5 Contoh Strategi Pendekatan dengan cara Senam Bersama.....	133
Gambar 4. 6 Kampanye “Belanja Masalah” Pasangan Paramitha-Wurja	136
Gambar 4. 7 Deklarasi dukungan oleh Himpunan Pedagang dan Calo Bawang untuk Mitha-Wurja.....	137
Gambar 4. 8 Kampanye Akbar Pasangan Mitha-Wurja.....	139
Gambar 4. 9 Forum Tokoh Agama dan Masyarakat dalam Rangka Mendukung Pasangan Paramitha-Wurja pada Pilkada Brebes 2024	142

Gambar 4. 10 Konsolidasi Dukungan Paguyuban Batak dan BKSG Kabupaten Brebes untuk Pasangan Mitha-Wurja"	144
Gambar 4. 11 Sindiran Pemuda Pancasila: “Ketika Kotak Kosong Diajak Debat”	146
Gambar 4. 12 Pemberitaan Media Nasional dan Lokal tentang Kerusuhan Demo Pilkada Brebes, 24 November 2024.....	152
Gambar 4. 13 Hasil Perolehan Pilkada Brebes Tahun 2024.....	158
Gambar 5.1 Contoh persebaran narasi kontra di media sosial dapat dilihat pada video berikut ini yang beredar di <i>TikTok</i>	170
Gambar 5.2 Contoh Perusakan APK Pasangan Mitha-Wurja oleh Gertak.....	174
Gambar 5. 3 Santunan Anak Yatim dan Pembagian Bantuan Sosial sebagai Bagian dari Strategi Kampanye Paramitha Widya Kusuma di Karangjunti, Losari	178

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Proses ini memungkinkan masyarakat untuk memilih pemimpin daerah yang akan menentukan arah pembangunan dan kebijakan publik di tingkat lokal. Menurut (Firmansyah et al., 2022). Indonesia melaksanakan Pilkada serentak untuk kelima kalinya pada 27 November 2024, dengan 37 daerah diikuti oleh pasangan calon tunggal.

Jawa Tengah sendiri terdapat 3 daerah yang melawan kotak kosong yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Brebes. Diantara ketiga daerah tersebut, gerakan kotak kosong paling masif terjadi di Kabupaten Brebes. Di wilayah ini, pendukung kotak kosong aktif menggalang dukungan melalui berbagai cara selama masa kampanye. Sementara itu, di Banyumas, gerakan kotak kosong juga menunjukkan antusiasme yang cukup tinggi, meskipun tidak seintensif di Brebes. Sebaliknya, di Sukoharjo, gerakan kotak kosong terbilang minim pemberitaan, sehingga sulit untuk menilai seberapa besar dukungan dan intensitas gerakannya. Hal ini

menjadikan Brebes sebagai daerah dengan gerakan kotak kosong yang paling menonjol di antara ketiganya (Lestari, 2019).

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang memungkinkan pelaksanaan pilkada dengan pasangan calon tunggal, Kabupaten Brebes menghadapi dinamika politik lokal yang menarik. Salah satu dinamika yang muncul adalah gerakan kotak kosong (Gertak). Gertak ini merupakan sebuah forum relawan masyarakat yang menolak adanya pilkada calon tunggal. Gertak itu sendiri dikoordinatori oleh Bapak Slamet Maryoko, S.H., atau yang lebih akrab dikenal dengan sebutan Bang Jarot, ia merupakan mantan kepala desa Randusanga Wetan pada tahun 2016-2022 (Mahardika, 2021).

Gerakan kotak kosong yang muncul di Kabupaten Brebes merupakan fenomena baru yang baru terjadi di Pilkada tahun 2024. Masyarakat pendukung kotak kosong menamai komunitasnya dengan nama Gertak. Yang dimana gertak itu sendiri muncul akibat kekecewaan sebagian masyarakat Kabupaten Brebes dengan adanya Pilkada dengan calon tunggal ini. Beberapa alasan yaitu mereka merasa bahwa adanya pasangan tunggal ini bentuk sebuah kemunduran demokrasi dan tidak diberikan pilihan alternatif lain selain Paramitha Wurja. Gerakan ini lahir

dari kekecewaan terhadap elit politik dan pandangan bahwa keberadaan calon tunggal mencerminkan demokrasi yang kurang seimbang. Gertak mulai muncul setelah KPU Brebes mengumumkan pasangan calon bupati dan wakil bupati, dan gerakannya semakin masif seiring mendekati hari pemungutan suara (Natasya et al., 2021).

Terlebih pasangan Paramitha-Wurja ini diusung oleh koalisi '*gemuk*' yang mendukung mereka pada Pilkada Brebes 2024 yang terdiri dari 12 partai, yaitu PDI-P, PKB, Gerindra, PKS, PAN, PPP, Demokrat, NasDem, PSI, Partai Garuda, Partai Buruh, dan Perindo. Dari 12 partai tersebut, 9 partai memiliki perwakilan di DPRD Brebes, yang totalnya berjumlah 50 kursi. Perolehan kursi DPRD Brebes masing-masing adalah PDI-P dengan 12 kursi, PKB dan Gerindra masing-masing 8 kursi, Golkar 7 kursi, PKS dan PAN masing-masing 4 kursi, Demokrat dan PPP masing-masing 3 kursi, serta NasDem dengan 1 kursi. Gabungan banyak partai tersebut menuai banyak pro dan kontra pada pilkada Brebes tahun ini.

Beberapa pendukung yang akhirnya bergabung ke Gertak mengaku kecewa terhadap keputusan PDIP yang lebih memilih mencalonkan Paramitha sebagai calon tunggal, ketimbang dua kandidat internal PDIP yang juga kuat, yaitu Narjo dan Benny Santoso. Sebagian dari

mereka sebelumnya adalah anggota relawan PDIP saat Pemilu Februari 2024 dan pemilu-pemilu sebelumnya. Kekecewaan mereka semakin dalam karena sebelumnya sudah menaruh harapan besar pada Asrofi untuk maju sebagai Calon Bupati. Namun, tidak ada satu pun partai yang mengusung kandidat pilihan mereka seperti Benny, Narjo, maupun Asrofi dalam Pilkada kali ini. Akibatnya, rasa kecewa dan kehilangan aspirasi politik mendorong mereka untuk beralih mendukung Gertak sebagai bentuk protes dan perlawanan terhadap proses pencalonan yang dianggap tidak transparan dan tidak mengakomodasi aspirasi kader serta pendukung akar rumput.

Dari sisi partai, PDIP mengusung Paramitha dengan pertimbangan regenerasi kepemimpinan dan visi jangka panjang, menganggap Paramitha mampu membawa ide-ide segar dan memiliki latar belakang keluarga politik yang kuat. Meskipun Paramitha lebih muda dari daftar kandidat lain seperti Narjo dan Benny, Paramitha dinilai memiliki kompetensi yang memadai serta pengalaman organisasi yang mendukung.

Keputusan Wurja untuk mendampingi Paramitha di Pilkada Brebes merupakan langkah strategis dari Wurja sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Brebes periode 2022–2027. Dengan pengalaman sebagai kepala desa Wlahar Kecamatan Larangan, Brebes dan Wakil

Ketua DPRD Brebes periode 2019-2024, Wurja meyakini dirinya dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung kepemimpinan Paramitha dan memperkuat posisi Gerindra di Brebes.

Gerindra yang akhirnya memutuskan untuk bergabung dalam koalisi *gemuk* bersama PDIP untuk mengusung pasangan Paramitha-Wurja dalam Pilkada Brebes 2024 didorong oleh berbagai pertimbangan strategis, termasuk faktor dominasi PDIP di Brebes selama satu dekade terakhir. Dalam 10 tahun terakhir, PDIP telah menjadi kekuatan politik yang tak terbantahkan di Brebes, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif. Dominasi ini terlihat dari penguasaan kursi terbanyak di DPRD Brebes serta kemenangan calon-calon yang didukung PDIP dalam sejumlah pemilihan sebelumnya. Koalisi ini tidak hanya tentang peluang menang di 2024, tetapi juga investasi politik jangka panjang bagi Gerindra untuk memperluas pengaruhnya di Kabupaten Brebes yang selama ini menjadi '*kandang*' PDIP (Abdullah, 2024).

Keputusan partai-partai besar untuk membentuk koalisi *gemuk* dan hanya mengusung satu pasangan calon yaitu Paramitha-Wurja memicu respons keras dari sebagian masyarakat yang merasa pilihan politik mereka dibatasi. Gertak memanfaatkan momentum ini dengan membangun narasi bahwa pilkada calon tunggal adalah

bukti kemunduran demokrasi dan tidak memberikan ruang bagi aspirasi rakyat. Narasi ini diperkuat melalui aksi-aksi simbolik, kampanye door-to-door, serta penyebaran isu-isu sensitif seperti politik dinasti, karena pasalnya dua adik dari Paramitha sedang menjabat di DPRD Brebes dan DPR RI Dapil 9.

Gerakan Gertak tidak hanya menjadi simbol protes, tetapi juga berhasil mengonsolidasikan kekecewaan masyarakat menjadi pilihan politik nyata. Hal ini tercermin dari hasil Pilkada Brebes 2024, di mana pasangan Paramitha-Wurja memperoleh 59,60% suara, sementara kotak kosong meraih 40,40%. Perolehan suara kotak kosong yang tinggi ini merupakan fenomena baru di Brebes, sekaligus menunjukkan adanya ketidakpuasan yang cukup besar di masyarakat terhadap proses politik yang berjalan. Selisih suara yang hanya 19,20% menandakan bahwa gerakan protes masyarakat mampu dikonsolidasikan secara signifikan dalam pilihan politik.

Penelitian (Apriadi, 2023) memberikan perspektif penting dalam memahami fenomena ini. Studi tersebut menunjukkan bahwa gerakan kotak kosong dalam Pilkada calon tunggal merupakan bentuk resistensi masyarakat terhadap dominasi partai politik dan minimnya alternatif pilihan dalam proses demokrasi lokal. Prasetyo menyoroti bahwa gerakan ini telah menjadi simbol protes aktif dan

partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi di daerah. Temuan ini relevan dengan situasi di Brebes, di mana Gerakan Gertak muncul sebagai respons terhadap penguasaan politik oleh koalisi tertentu dan keterbatasan pilihan bagi pemilih.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Strategi Politik Pemenangan Pasangan Tunggal dalam Melawan Gerakan Kotak Kosong (Gertak) pada Pilkada Brebes Tahun 2024”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut masalah pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana strategi politik kemenangan pasangan tunggal dalam melawan gerakan kotak kosong (Gertak) pada Pilkada Brebes Tahun 2024?
2. Apa hambatan dan tantangan pasangan tunggal dalam melawan gerakan kotak kosong (Gertak) pada Pilkada Brebes Tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sangat penting dan akan menentukan arah penelitian. Tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan mengidentifikasi bentuk strategi pemenangan politik pasangan tunggal dalam melawan gerakan kotak kosong (Gertak) pada Pilkada Brebes Tahun 2024.
2. Mendiskripsikan dan mengidentifikasi apa saja hambatan dan tantangan pasangan tunggal dalam melawwan gerakan kotak kosong (Gertak) pada Pilkada Brebes Tahun 2024.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan informasi kepada penulisan ilmiah dimasa depan pada mata objek yang sama, yaitu terkait strategi politik pemenangan pada Pilkada, khususnya membahas strategi pasangan tunggal dalam melawan gerakan kotak kosong (Gertak).

2. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat menggambarkan dengan baik proses politik demokrasi lokal berdasarkan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Brebes dengan kaitannya dalam strategi pemenangan pemilihan umum

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka sebuah proses sistematis untuk menganalisis dan mengevaluasi sumber-sumber informasi yang relevan dengan judul penelitian ini. Kajian terkait strategi pemenangan dalam Pilkada sudah banyak, adapun beberapa penelitian yang membahas strategi pemenangan diantaranya:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Lilis Kholidah (2020) menunjukkan hasil bahwa keberhasilan Anggi Noviah dalam menjalankan strategi pemenangannya dimulai dengan pembentukan Tim Gisell, diikuti dengan pembuatan program kerja, pemetaan massa untuk meningkatkan efektivitas strategi pemenangan, branding dan positioning, strategi pemasaran politik dengan menggunakan pull, pass, push, dan produk politik, komunikasi politik, kampanye politik dengan menggunakan analisis SWOT, dan pendekatan kepada petani, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Anggi Noviah, yang dianggap oleh publik sebagai perempuan muda yang berani dan ramah, memainkan peran penting dalam pelaksanaan pendekatannya. Selain itu, Anggi Noviah memiliki tim yang kuat dan mendapat dukungan material dan massa dari organisasi masyarakat di Kabupaten Indramayu. Keberhasilan ini menunjukkan pentingnya strategi politik yang tepat sasaran, terutama

bagi kandidat muda dengan pengalaman politik yang terbatas. Strategi berbasis komunitas, kampanye yang dipersonalisasi, dan pencitraan memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan publik, bahkan di daerah yang didominasi oleh partai politik lain (Kholidah, 2020). Perbedaan utama dengan penelitian ini adalah Lilis Kholidah berfokus pada strategi defensif yang dilakukan oleh Anggi Novia dalam bentuk pencitraan politik pada Pilkada Indramayu 2019. Sedangkan penelitian ini berfokus pada strategi politik yang dilakukan oleh pasangan tunggal dalam melawan gerakan kotak kosong pada Pilkada Brebes 2024. Persamaan penelitian Lilis Kholidah dengan penelitian ini terletak pada metode yang digunakan, yaitu pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, serta fokus kajian pada strategi politik.

Kedua, Maharani juga mengkaji mengenai strategi kemenangan dalam kajiannya menunjukkan bahwa Herman Deru dan Mawardi Yahya telah menggunakan keempat strategi kemenangan yang dikemukakan oleh Kotten dalam Pilkada Sumsel 2018-2023. Strategi mereka berbeda dengan pasangan lain, terutama dalam penggunaan media sosial dan pelaksanaan program kampanye. Proses kampanye yang ditempuh oleh pasangan ini meliputi debat publik, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, dan iklan

kampanye di media. Selain itu, strategi pemenangan mereka terdiri dari penggunaan visi dan misi dalam strategi organisasi, penjelasan program-program unggulan Paslon, penggunaan sumber daya seperti tim kampanye, dana kampanye, dan teknologi media online, serta penggunaan aturan SOP dalam strategi kelembagaan. Strategi ini menjadi kunci keberhasilan Herman Deru-Mawardi Yahya dalam pesta demokrasi lokal tersebut karena strategi mereka lebih unggul dan mudah dipahami oleh masyarakat. Perbedaan utama dalam penelitian maharani lebih fokus dalam strategi politik yang dilakukan Anggi Noviah pada Pilkada Sumatera Selatan, sedangkan pada peneliian ini berfokus pada strategi politik yang dilakukan pasangan tunggal dalam melawan gerakan kotak kosong pada Pilkada Brebes 2024. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian Maharani terletak pada penggunaan pendekatan kualitatif, metode studi kasus, dan fokus kajian pada strategi politik.

Sementara itu yang ketiga, Maulida, dkk. mengkaji mengenai strategi politik di dalam jurnalnya yang berjudul, “Strategi Pemenangan Pasangan Calon Herman Deru Dan Mawardi Yahya Pada Pilkada Sumatera Selatan Tahun 2018”. Dalam penelitiannya menunjukan hasil bahwa Eva Dwiana dan Deddy Amarullah berhasil memenangkan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Bandar Lampung periode 2021-2024. Dalam perjuangan mereka, mereka menggunakan strategi dukungan sumber daya dan strategi kelembagaan. Strategi dukungan sumber daya melibatkan partai politik dan tim pemenangan, sedangkan strategi kelembagaan melibatkan berbagai lembaga dan organisasi yang memberikan dukungan kepada pasangan tersebut. Tim pemenangan Eva dan Deddy melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, dan mereka memiliki sumber daya manusia dan finansial yang lebih besar dibandingkan dengan kandidat lain. Meski sempat mengalami pembatalan kemenangan, mereka akhirnya dinyatakan menang kembali oleh Mahkamah Agung. Dukungan juga datang dari partai politik, relawan organisasi dan LSM, serta Majelis Taklim Rahmat Hidayat yang dipimpin oleh Eva Dwiana. Secara keseluruhan, strategi yang paling berpengaruh dalam kemenangan mereka adalah strategi dukungan sumber daya dan strategi kelembagaan (Maulida et al., 2021). Perbedaan utama dalam penelitian ini terletak pada fokusnya yang lebih pada strategi pemenangan dalam menyoroti tantangan politik lokal seperti politik dinasti dan penggunaan sumber daya, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada strategi pemenangan pasangan calon tunggal dalam menghadapi gerakan kotak kosong (Gertak) di Pilkada Brebes 2024. Persamaan pada penelitian

Maulida, dkk. dengan penelitian ini yaitu pada metode penelitian dan fokus penelitiannya.

Keempat, kajian yang dilakukan oleh Ibrahim. Dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa kemenangan pasangan mohammad Idris dan Imam Budi terjadi karena kekuatan PKS yang terbukti sukses menerapkan strategi yang ada. Selain itu, sosok Mohammad Idris sebagai pertahana juga menjadi faktor yang menguntungkan dalam kemenangan di Pilkada Kota Depok tahun 2020. Dan juga kemenangan Idris -Imam didukung oleh kader PKS sebagai partai pengusung yang memiliki sikap militan dengan ikut terjun memenangkan pasangan Mohammad Idris dan Imam Budi, serta didukung oleh citra positif PKS itu sendiri dimata masyarakat (Ibrahim, 2022). Perbedaan utama dalam penelitian ini adalah fokus pada marketing politik, kader militan, citra petahana, dan kekuatan partai pengusung sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada strategi pemenangan pasangan calon tunggal Paramitha - Wurja dalam menghadapi gerakan kotak kosong (Gertak) di Pilkada Brebes 2024. Sedangkan, untuk persamaan pada penelitian Ibrahim dengan penelitian ini yaitu terletak pada metode penelitiannya.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh (Surtinah, 2021). Menurut penelitiannya, tim pemenangan Ratu Tatu

Chasanah dan Pandji Tirtayasa dalam Pilkada merupakan keberhasilan dai mesin politik atau tim sukses yang terdiri dari jaringan anggota keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan elite partai. Tim kabupaten, kecamatan, dan desa merupakan tiga divisi dari tim pemenangan yang dibentuk pasangan Ratu-Pandji. Dalam upaya memenangkan hati masyarakat, Ratu dan Pandji Tirtayasa melakukan patronase politik, ini termasuk menawarkan barang-barang kepada calon pemilih sebagai bentuk perdagangan. Perbedaan utama dengan penelitian ini adalah pada penggunaan teori, pada penelitian yang dilakukan oleh Surtinah menggunakan teori mesin politik dan teori patronase politik, sedangkan pada penelitian ini menggunakan teori strategi politik Peter Schroder. Sedangkan untuk persamaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.

Dari penelitian yang sudah dilakukan dalam telaah pustaka mengenai strategi pemenangan tersebut menghasilkan berbagai temuan yaitu kemenangan dari calon tidak lepas dari strategi pemenangan yang mereka terapkan. Menggunakan kombinasi strategi seperti strategi organisasi, program, sumber daya, dan kelembagaan, dengan penekanan pada program dan sumber daya, menjadi kunci utama kemenangan mereka. Selain itu,

faktor lain seperti popularitas, jejaring politik, citra diri, dan kampanye yang terencana juga turut berkontribusi pada kemenangan mereka. Tetapi, dari keberhasilan pemenangan mereka, masih ada hambatan seperti sumber daya yang belum memadai, hambatan media, hambatan organisasi dan hambatan program.

Keenam, (Marbun et al., 2022) mengemukakan dalam penelitiannya bahwa pilkada di Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki fenomena pasangan calon tunggal. Seluruh partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan mengusung pasangan calon tunggal Dosmar dan Oloan. Namun, lahirnya duet calon tunggal ini membuat masyarakat kecewa sehingga mendorong Forum Peduli Demokrasi Humbang Hasundutan meluncurkan Gerakan Koko (Kotak Kosong). Gerakan ini merupakan bentuk protes terhadap calon perseorangan yang dianggap membahayakan demokrasi dan partai politik yang tidak mencalonkan kader internal sebagai calon bupati-wakil bupati juga menimbulkan kekecewaan di masyarakat. Gerakan Koko membentuk posko relawan untuk mempromosikan kotak kosong dan menyebarkan kesadaran akan konsep calon tunggal dan kotak kosong. Perbedaan utama dengan penelitian ini yaitu terletak pada fokus penelitiannya, penelitian yang dilakukan oleh Marbun, dkk. berfokus

pada peran civil society untuk memobilisasi dukungan hingga memperoleh persentase perolehan suara yang tertinggi pada Pilkada serentak tahun 2020. Sedangkan penelitian ini berfokus pada strategi pemenangan yang dilakukan oleh pasangan Tunggal dalam melawan Gerakan korak kosong pada pilkada Brebes 2024. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada metode penelitian yaitu metode kualitatif studi kasus.

Ketujuh, dalam artikel yang berjudul Peran dan Strategi Kelompok “Kotak Kosong” dalam Pilkada Calon Tunggal Kabupaten Pati Tahun 2017 oleh Ikhsan Darmawan menunjukkan hasil bahwa peran AKDP (Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada) adalah dengan memfokuskan pada isu tertentu dan menguntungkan anggota mereka sendiri, meningkatkan level atau tingkat yang ingin mereka capai, dan menggunakan power atau kekuasaan yang mereka miliki. Selain itu, AKDP juga memiliki lima strategi. Strategi-strategi itu adalah menggunakan strategi lobi, membuka akses kepada pembuat kebijakan dan memobilisasi sumber daya yang mereka miliki, memobilisasi pemilih, mengontrol informasi kepada pemilih pada umumnya, dan melakukan advokasi (Darmawan, 2017) . Perbedaan utama dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan Dermawan berfokus pada Pilkada Pati 2017 dengan kelompok Aliansi

Kawal Demokrasi Pilkada (AKDP) sebagai aktor utama gerakan kotak kosong. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada strategi pemenangan pasangan tunggal dalam melawan gerakan kotak kosong di Pilkada Brebes 2024. Persamaan dengan penelitian ini adalah terletak pada metode penelitiannya yaitu metode kualitatif fenomenologi dan sama-sama membahas strategi politik dalam konteks pasangan calon tunggal.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh (Mukhtar, 2019) bahwa dalam penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena munculnya relawan kotak kosong di Pilkada Kabupaten Pati tahun 2017 berkaitan dengan ketidakpuasan masyarakat terhadap calon tunggal, terutama terhadap kebijakan yang dinilai tidak berorientasi pada kepentingan rakyat. Relawan kotak kosong, yang digagas oleh Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati (AKDPP), muncul sebagai bentuk protes terhadap sistem demokrasi yang dianggap tidak ideal akibat monopoli partai politik dan lemahnya proses kaderisasi. Pendekatan rasional dalam menentukan pilihan, seperti kalkulasi untung-rugi terhadap kebijakan calon tunggal, menjadi dasar gerakan ini. Penelitian ini juga mencatat bahwa relawan kotak kosong tidak membenci sosok calon tunggal secara personal, tetapi lebih pada upaya menciptakan sistem demokrasi yang sehat dengan memanfaatkan kotak

kosong sebagai simbol pilihan alternatif yang sah. Hasil ini mempertegas pentingnya peran masyarakat dalam menjaga idealisme demokrasi melalui gerakan-gerakan politik yang rasional dan terorganisir. Perbedaan utama dalam penelitian ini adalah berfokus pada partisipasi politik Masyarakat dan strategi pola mobilisasi tim relawan kotak kosong, sedangkan Rifqi lebih berfokus pada motivasi dan pandangan politik relawan kotak kosong sebagai aktor utama, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada strategi pemenangan pasangan tunggal dalam melawan gerakan kotak kosong di Pilkada Brebes 2024. Persamaan dengan penelitian ini adalah terletak pada metode penelitiannya yaitu metode kualitatif studi kasus.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh (Khaerah & Muslimin, n.d.) menjelaskan bahwa hasil penelitian dalam dokumen ini menunjukkan bahwa bentuk partisipasi politik masyarakat Kabupaten Enrekang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati meliputi lima kategori: *Electoral Activity*, *Lobbying*, *Organizational Activity*, *Contacting*, dan *Violence*, dengan fokus pada strategi yang digunakan tim kolom kosong. Tim pemenangan kolom kosong meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui strategi lobi, penggalangan massa, peran media sosial, dan advokasi, dengan isu utama menyosialisasikan

kegagalan bupati petahana. Penelitian ini mengungkap bahwa partisipasi masyarakat bersifat pragmatis, sering kali dipengaruhi oleh faktor psikologis dan kompensasi instan seperti uang atau sembako. Fenomena kolom kosong ini mencerminkan dinamika politik lokal yang kompleks dalam konteks pilkada dengan calon Tunggal. Perbedaan utama antara penelitian Khaerah dengan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya. Khaerah lebih berfokus pada partisipasi masyarakat dalam bentuk kegiatan seperti *lobbying*, *organizational activity*, dan *electoral activity*, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada strategi pemenangan pasangan tunggal dalam melawan gerakan kotak kosong di Pilkada Brebes 2024. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada tentang strategi dan dinamika politik dalam konteks Pilkada dengan calon tunggal yang melibatkan fenomena kolom kosong dan pada metode penelitiannya yaitu metode kualitatif.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Apriadi menjelaskan bahwa menunjukkan bahwa fenomena kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon menimbulkan berbagai problematika dalam perspektif demokrasi Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa pengaturan kotak kosong telah diatur melalui Putusan MK Nomor 100/PUU-

XIII/2015 dan Pasal 54C ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk memilih antara pasangan calon tunggal atau kolom kosong. Secara demokratis, fenomena ini dinilai mengurangi kualitas demokrasi karena tidak memberikan alternatif pemimpin yang beragam, yang bertentangan dengan prinsip demokrasi untuk menghadirkan kompetisi terbuka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kotak kosong dalam konteks pemilihan satu pasangan calon menjadi refleksi dari dinamika demokrasi Indonesia, tetapi sekaligus menjadi tantangan dalam mewujudkan demokrasi yang ideal (Apriadi, 2023). Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian Apriadi adalah pada fokus kajiannya. Apriadi lebih memfokuskan pada analisis normatif mengenai pengaturan kotak kosong dalam perspektif hukum dan demokrasi. Sedangkan penelitian ini berfokus pada strategi pemenangan pasangan tunggal dalam melawan gerakan kotak kosong di Pilkada Brebes 2024. Persamaan dengan penelitian ini adalah terletak pada sama-sama membahas mengenai Pilkada dan sama-sama menggunakan metode kualitatif.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan (field research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus tipe deskriptif Robert K. Yin (2018) untuk memahami suatu individu secara mendalam mengenai perkembangan dan penyesuaiannya dengan lingkungan. Alasannya agar peneliti dapat menggali makna dan esensi suatu fenomena secara menyeluruh dengan cara mendeskripsikannya atau menggambarannya secara komprehensif dan rinci, serta melakukan analisis yang lebih mendalam terkait fenomena di lapangan studi tentang strategi kemenangan Paramitha Widya Kusuma atau Kotak Kosong.

2. Sumber dan jenis data

Dalam penelitian ini, sumber data primer berasal dari ketua tim sukses kemenangan Paramitha - Wurja, kepala DPC PDIP Brebes, ketua KPU Daerah Brebes, dan masyarakat relawan gerakan kotak kosong (Gertak) guna mendapatkan informasi mengenai strategi kemenangan yang dilakukan oleh pasangan Paramitha Widya Kusuma - Wurja dan strategi dari gerakan kotak kosong (Gertak). Data primer

penelitian ini meliputi hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan sumber data primer.

Sumber data sekunder penelitian ini, yaitu rekapitulasi hasil suara pada Pilkada Brebes 2024, berita acara pilkada, berita terkait kampanye Paramitha - Wurja, dan berita terkait gerakan kotak kosong.

3. Teknik pengumpulan data

Guna mendapatkan data sesuai tema, peneliti menerapkan tiga metode dalam proses pengumpulan data, yaitu:

a. Observasi

Penelitian ini menggunakan observasi terstruktur dengan melakukan pengamatan secara sistematis tentang strategi pemenangan politik pasangan Paramitha Widya Kusuma - Wurja dalam Pilkada Brebes 2024 menggunakan instrumen yang telah peneliti rinci sebelumnya. Walaupun observasi terstruktur isi dan luasnya observasi lebih terbatas, namun peneliti akan menyiapkan dahulu sesuai kebutuhan penelitian terkait strategi pemenangan pasangan tunggal dalam mengalahkan gerakan kotak kosong di pilkada 2024.

b. Wawancara

Penulis mengadopsi metode wawancara terstruktur dengan mempersiapkan perangkat penelitian berupa daftar pertanyaan tertulis yang sudah direncanakan sebelumnya terkait bagaimana strategi pemenangan politik yang dilakukan oleh pasangan tunggal dalam mengalahkan gerakan kotak kosong. Wawancara ini dilakukan secara terbuka dan terstruktur melalui tatap muka secara langsung.

c. Dokumentasi

Dokumen yang diperoleh dalam penelitian ini mencakup hasil rekapitulasi pilkada, informasi atau berita terkait pilkada Brebes tahun 2024 dalam masa kampanye (25 September 2024 hingga 23 November 2024), dan berita atau rekaman suara ataupun video terkait pilkada Brebes 2024.

4. Teknik analisis data

Setelah mengumpulkan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi langkah selanjutnya adalah penulis melakukan analisis data menggunakan teknik atau metode analisis fenomenologi yang dikemukakan oleh Edmund Husserl. Data yang diperoleh dari wawancara,

observasi, dan dokumentasi akan disusun, dikelompokkan, dan diberikan kode untuk memudahkan identifikasi pola dan tema. Proses ini bertujuan untuk menyajikan data dalam bentuk yang lebih terstruktur dan dapat diinterpretasi secara mendalam.

Miles and Huberman dalam (Iskandar, 2009) menjelaskan dalam analisis data melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan atau verifikasi. Dalam melakukan Reduksi data dilakukan dengan cara merangkum serta memilih data-data yang menjadi data pokok atau tentang hal-hal penting yang terkait dengan topik penelitian dengan maksud untuk mendapatkan kemudahan pemahaman dari data yang telah penulis kumpulkan.

Selanjutnya masuk dalam proses penyajian data, proses ini dilakukan manakala data sudah tersaji dan peneliti akan lebih mudah dalam memahami serta peneliti dapat menemukan analisa dari data yang ditemukan di lapangan yang kemudian dari data yang telah disajikan digunakan peneliti untuk merancang langkah analisis selanjutnya. Setelah proses reduksi data

dan penyajian data dilakukan, proses selanjutnya adalah hasil analisis yang didapat digunakan untuk penarikan kesimpulan yang menjadi hasil dari penelitian dengan objek kajian yang sudah menjadi lokusnya.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun untuk mempermudah pemahaman materi, sehingga memberikan gambaran umum mengenai keseluruhan isi penulisan, maka sistematika pembahasan disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam BAB ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TEORI STRATEGI POLITIK

Dalam BAB ini, peneliti menggunakan teori strategi politik menurut Peter Schroder sebagai dasar landasan teori untuk menganalisis penelitian.

BAB III : GAMBARAN UMUM DAN DINAMIKA POLITIK LOKAL BREBES

Dalam BAB ini membahas mengenai gambaran umum objek penelitian dan dinamika politik lokal Kabupaten Brebes yang mencakup profil dari Gerakan Kotak Kosong (Gerak) Brebes.

BAB IV : STRATEGI POLITIK PEMENANGAN PASANGAN TUNGGAL

Dalam BAB ini berisi hasil penelitian yang didapatkan dan pembahasan mengenai strategi politik pemenangan pasangan tunggal dalam melawan gerakan kotak kosong (Gertak) pada Pilkada Brebes 2024.

BAB V : HAMBATAN DAN TANTANGAN PASANGAN TUNGGAL

Dalam BAB ini berisikan hasil penelitian yang didapatkan dan pembahasan mengenai hambatan dan tantangan pasangan tunggal dalam melawan gerakan kotak kosong (Gertak) pada Pilkada Brebes Tahun 2024.

BAB VI : PENUTUP

Dalam BAB ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

BAB II

TEORI STRATEGI POLITIK

A. Pengertian Strategi Politik

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu “*strategos*” yang diartikan sebagai “*the art of the general*”, dan pengertian strategi berasal dari konsep militer. Strategi menurut KBBI adalah suatu pola rencana yg cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Sedangkan, menurut Miriam Budiardjo dalam bukunya “Politik Indonesia: Perubahan dan Kontinuitas” (2008) diartikan sebagai suatu rencana yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu dalam politik. “Setiap tindakan yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan atau mempengaruhi distribusinya” adalah apa yang didefinisikan oleh Max Weber sebagai politik. Weber menyoroti pentingnya kekuasaan dalam politik dan bagaimana orang atau organisasi dapat menggunakan pengaruhnya untuk mengubah lembaga-lembaga sosial.

Strategi politik secara umum merujuk pada serangkaian tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan politik tertentu, seperti memperoleh, mempertahankan, atau memperluas kekuasaan dalam konteks pemerintahan, organisasi, atau masyarakat. Strategi ini melibatkan perencanaan, pengorganisasian

sumber daya, komunikasi, dan mobilisasi dukungan dari berbagai pihak yang relevan. Menurut Niccolò Machiavelli dalam *The Prince*, seorang pemimpin harus mampu berpura-pura, melakukan pengkhianatan, dan menggunakan tipu daya untuk mencapai tujuan politiknya (Muhammad Boim et al., 2023).

Strategi politik menurut (Schröder, 2010) dalam bukunya yang berjudul Strategi Politik, strategi politik merupakan strategi atau teknik yang digunakan untuk mewujudkan suatu cita-cita politik. Strategi ini melibatkan pertimbangan matang tentang berbagai faktor, seperti kekuatan dan kelemahan diri sendiri, kekuatan dan kelemahan lawan, serta situasi dan kondisi yang ada. Strategi politik penting bukan hanya untuk partai politik dan pemerintah saja, tetapi juga untuk organisasi non-pemerintah (Non-Governmental Organization/NGO) yang juga aktif dalam politik.

Dalam konteks sejarah, strategi politik telah diterapkan dalam berbagai bentuk pemerintahan, mulai dari kerajaan, pemerintahan otoriter, hingga sistem demokrasi modern. Di era kerajaan, strategi politik lebih berfokus pada diplomasi antar kerajaan, penguatan militer, dan pengaruh aristokrasi dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, dalam sistem demokrasi modern, strategi politik berkembang menjadi lebih kompleks dengan

melibatkan partisipasi publik, penggunaan media massa, serta pengaruh lembaga-lembaga non-pemerintah dalam dinamika politik.

Dengan berkembangnya teknologi informasi, strategi politik kini semakin kompleks dan dinamis. Penggunaan data dan analitik dalam menyusun strategi politik menjadi semakin penting, memungkinkan aktor politik untuk memahami preferensi pemilih, mengidentifikasi tren sosial, serta merancang kampanye yang lebih terarah dan efisien. Oleh karena itu, strategi politik yang sukses tidak hanya bergantung pada kekuatan individu atau organisasi, tetapi juga pada kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan merespons dinamika politik secara cepat dan tepat. Dalam era globalisasi ini, strategi politik yang efektif juga harus memperhitungkan pengaruh dari faktor internasional serta hubungan dengan berbagai aktor di tingkat regional maupun global.

Selain itu, strategi politik juga memiliki hubungan erat dengan komunikasi politik. Sebuah strategi yang efektif harus didukung oleh kemampuan komunikasi yang baik agar pesan politik yang disampaikan dapat diterima dengan jelas oleh masyarakat. Kampanye politik, debat publik, dan penggunaan media sosial merupakan beberapa instrumen utama dalam menyebarluaskan visi dan misi

politik serta membentuk opini publik yang mendukung. Oleh karena itu, perencanaan strategi politik harus memperhitungkan teknik komunikasi yang tepat guna memperoleh kepercayaan publik dan meningkatkan efektivitas kampanye.

Dalam praktiknya, strategi politik sering kali menggunakan berbagai metode, seperti kampanye publik, media sosial, lobi, negosiasi, dan advokasi, untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memenangkan pemilihan umum, mempengaruhi kebijakan, atau mempertahankan konsensus politik. Dengan demikian, strategi politik tidak hanya menjadi alat untuk meraih kekuasaan, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan menjamin keberlangsungan sistem demokrasi perwakilan. Untuk mencapai tujuan tertentu, termasuk memenangkan pemilihan umum, memengaruhi kebijakan, atau menegakkan konsensus politik, taktik politik sering kali mencakup berbagai teknik, termasuk kampanye publik, media sosial, lobi, negosiasi, dan advokasi. Oleh karena itu, strategi politik berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan masyarakat dan memastikan kelangsungan jangka panjang demokrasi perwakilan, selain sebagai senjata untuk meraih kekuasaan.

B. Ciri-ciri Strategi Politik

Dalam menjalankan sebuah strategi guna mendapatkan dukungan dari masyarakat terdapat beberapa proses yang harus diperhatikan. Dimana di dalam proses tersebut nantinya akan menghasilkan kelompok berupa sekumpulan individu yang dihasilkan, hal tersebut dikenal sebagai segmentasi. Proses segmentasi ini penting guna mengetahui bagaimana mengelompokkan seseorang dengan karakter dalam berkomunikasi dan berinteraksi dalam suatu kelompok. Berdasarkan penjelasan tersebut, strategi memiliki beberapa ciri- ciri diantaranya:

- a) Pemusatan perhatian kepada kekuatan sebagai pendekatan strategis
- b) Memusatkan perhatian kepada analisis dinamik, analisis gerak (operasional) dan analisis aksi (pelaksanaan)
- c) Strategi memusatkan perhatian kepada tujuan yang ingin dicapai dan gerak untuk mencapai tujuan itu
- d) Strategi memperhitungkan faktor-faktor waktu (sejarah: masa lampau, masa kini ,masa depan dan faktor lingkungan)
- e) Strategi berusaha mengidentifikasi masalah yang timbul dari peristiwa-peristiwa yang sedang

berlangsung, kemudian mengadakan analisis tentang kemungkinan-kemungkinan dan memperhitungkan pilihan-pilihan serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencapai tujuan.

C. Esensi Strategi Politik

Menurut Peter Schroder dalam (Sucitra et al., 2024) ada tiga alasan mempelajari strategi politik yaitu:

- a) Memahami kekuasaan adalah langkah pertama dalam strategi politik, hal ini melibatkan analisis sumber-sumber kekuasaan, distribusi kekuasaan, dan dinamika kekuasaan. Memahami kekuasaan memungkinkan seorang ahli strategi politik untuk mengenali potensi dan ancaman yang ada dalam konteks tertentu.
- b) Selanjutnya, tahap merancang kekuatan yang melibatkan merumuskan tujuan strategis jangka panjang dan jangka pendek, menentukan langkah-langkah operasional seperti membangun aliansi, mengelola opini publik, atau memanfaatkan media sebagai alat komunikasi politik, serta menganalisis potensi

hambatan dan mencari cara untuk mengatasinya. Proses perancangan ini membutuhkan kemampuan menyusun strategi.

- c) Mengelola kekuasaan yang melibatkan tahap penerapan dan pemeliharaan kekuasaan yang dimiliki. Ada beberapa elemen kunci yang perlu diperhatikan dalam mengelola kekuasaan. *Pertama*, diperlukan mobilisasi dukungan dari berbagai pihak seperti melalui komunikasi politik, kampanye dan kegiatan diplomatik. Selanjutnya, penting untuk memperkuat legitimasi kekuasaan agar tindakan politik tetap mendapatkan dukungan moral dan hukum dari masyarakat. Kemudian, dalam mengelola kekuasaan, juga perlu dapat beradaptasi dengan situasi yang berubah, termasuk merespons krisis atau tantangan baru. Hal ini berguna untuk menjaga keseimbangan antara kekuatan politik, kebutuhan masyarakat, dan keberlanjutan sistem politik itu sendiri.

Ketiga elemen ini saling melengkapi dan membentuk siklus yang berkesinambungan. Memahami konteks kekuasaan membantu

merancang strategi yang relevan, dan strategi yang baik akan lebih mudah dikelola secara efektif. Pada dasarnya, mengelola kekuasaan adalah tentang menggunakan kekuasaan untuk mencapai dampak yang diinginkan dalam berbagai konteks (Marga & Publik, 2020).

D. Tujuan Strategi Politik

Strategi politik adalah suatu siasat yang digunakan untuk mencapai tujuan politik. Peter Schröder mengungkapkan bahwa strategi politik adalah serangkaian keputusan kondisional untuk mencapai tujuan politik. Tujuan dari strategi politik adalah menciptakan struktur yang stabil dalam pemerintahan dan masyarakat. Hal ini melibatkan pengelolaan konflik (Sahea et al., 2018). meningkatkan legitimasi pemimpin, dan menjaga keharmonisan sosial.

Legitimasi adalah elemen penting dalam strategi politik karena tanpa legitimasi, kekuasaan bersifat sementara dan rentan terhadap perlawanan. Strategi politik juga dirancang untuk mengamankan kepentingan nasional, baik dalam aspek domestik maupun internasional, melalui diplomasi dan aliansi. Strategi politik yang berhasil harus mempertimbangkan kebutuhan rakyat, menciptakan

kebijakan yang mengatasi masalah ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

E. Manfaat dan Kriteria Strategi Politik

Strategi politik memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan aktor politik dalam mencapai tujuannya. Salah satu manfaat utama dari strategi politik adalah memberikan arah yang jelas dalam pengambilan keputusan politik. Dengan strategi yang baik, aktor politik dapat merancang langkah-langkah yang tepat dan mengantisipasi berbagai tantangan serta hambatan yang mungkin muncul dalam dinamika politik. Selain itu, strategi politik memungkinkan optimalisasi sumber daya yang tersedia, sehingga kampanye dan kebijakan dapat dijalankan secara efektif dan efisien.

Manfaat lainnya adalah peningkatan dukungan publik dan legitimasi politik. Dengan strategi komunikasi yang tepat, aktor politik dapat membangun citra yang positif di mata masyarakat dan memperoleh kepercayaan pemilih. Selain itu, strategi politik yang efektif juga berkontribusi terhadap stabilitas pemerintahan dengan menciptakan konsensus politik dan meminimalkan konflik. Dalam konteks demokrasi, strategi politik yang baik juga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses politik, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan aspirasi publik.

Dalam menentukan efektivitas strategi politik, terdapat beberapa kriteria yang perlu diperhatikan.

- a. Pertama, strategi harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur agar dapat dievaluasi keberhasilannya.
- b. Kedua, strategi harus fleksibel dan adaptif terhadap perubahan situasi politik agar tetap relevan dalam berbagai kondisi.
- c. Ketiga, strategi politik harus berbasis pada data dan analisis yang mendalam agar keputusan yang diambil lebih akurat dan tepat sasaran.
- d. Keempat, strategi yang baik juga harus memperhitungkan aspek etika dan transparansi agar tidak menimbulkan krisis kepercayaan di kalangan masyarakat.
- e. Terakhir, efektivitas strategi juga ditentukan oleh kemampuan aktor politik dalam mengelola sumber daya serta membangun koalisi yang kuat untuk mendukung implementasi strategi yang telah dirancang.

Dengan memahami manfaat dan kriteria strategi politik, aktor politik dapat mengembangkan pendekatan yang lebih efektif dalam mencapai tujuannya serta meningkatkan

kualitas pemerintahan yang demokratis dan inklusif.

F. Jenis Pendekatan Strategi Politik

Jenis atau tipe strategi politik adalah cara yang digunakan oleh aktor atau partai politik untuk mencapai berbagai tujuan, seperti mendapatkan lingkungan yang menguntungkan, mempengaruhi orang lain, atau memperkuat posisi seseorang. Strategi ini didasarkan pada situasi politik, kebutuhan organisasi, dan hasil yang diinginkan. Jenis pendekatan strategi politik secara umum ada 12 jenis.

Pertama, strategi koalisi merupakan jenis strategi lain yang bertujuan untuk membentuk aliansi dengan pihak-pihak lain untuk memperkuat posisi politik dan mencapai tujuan bersama yang sulit dicapai sendirian, misalnya, membentuk koalisi partai dalam pemilu. *Kedua*, strategi lobi adalah upaya untuk mempengaruhi kebijakan atau keputusan politik dengan melakukan pendekatan langsung kepada pembuat kebijakan atau pemangku kepentingan, sering kali dengan cara menyampaikan argumen atau menawarkan keuntungan tertentu. *Ketiga*, strategi mobilisasi massa menggerakkan kelompok besar masyarakat untuk mendukung isu atau perubahan politik melalui demonstrasi, kampanye, atau protes besar yang

bertujuan mempengaruhi pembuat kebijakan atau menciptakan tekanan publik.

Selanjutnya, strategi konflik melibatkan konfrontasi langsung untuk memperjuangkan suatu tujuan politik, yang bisa berupa perlawanan terhadap kebijakan yang ada atau serangan terhadap lawan politik dengan tujuan mengalahkan mereka. Selanjutnya dalam konteks internasional terdapat strategi diplomasi yang digunakan untuk mencapai tujuan politik melalui dialog dan negosiasi dengan pihak lain, mencari kesepakatan atau kompromi yang menguntungkan bagi pihak yang mengusulkan. *Keenam*, strategi propaganda mengandalkan media dan informasi untuk mempengaruhi opini publik, membentuk citra positif atau negatif terhadap isu atau aktor politik tertentu, yang dapat digunakan dalam kampanye pemilu atau untuk memperkuat pesan politik. *Ketujuh*, strategi perubahan kebijakan fokus pada pengaruh yang diberikan kepada pembuat kebijakan untuk mengubah atau memperkenalkan kebijakan baru yang sesuai dengan kepentingan tertentu, seperti mengesahkan undang-undang atau memodifikasi kebijakan publik yang ada.

Disisi lain terdapat strategi adaptasi yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan situasi politik dengan menyesuaikan taktik atau strategi sesuai dengan dinamika yang berkembang. Ini memungkinkan aktor

politik untuk tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan yang baru. Lalu *kesembilan*, strategi hukum menggunakan jalur hukum untuk mencapai tujuan politik, seperti mengajukan gugatan atau memperjuangkan perubahan kebijakan melalui proses hukum yang sah, dan sering digunakan ketika jalur politik konvensional dianggap tidak efektif. *Terakhir*, strategi persuasi berfokus pada meyakinkan publik atau lawan politik untuk mendukung suatu pandangan atau kebijakan melalui diskusi, argumen, atau pendekatan berbasis rasionalitas, yang sering dijumpai dalam debat publik atau kampanye yang menonjolkan sisi positif dari suatu kebijakan.

Peter Schorder membagi strategi politik kedalam dua bagian yaitu strategi ofensif (menyerang) dan juga strategi defensive (bertahan). *Pertama*, strategi ofensif atau strategi menyerang sering digunakan dalam kampanye pemilu untuk meningkatkan jumlah pemilih. Jumlah individu yang berpikir positif tentang suatu partai dibandingkan dengan pemilu sebelumnya menentukan efektivitas kampanye. Strategi-strategi ini dimaksudkan untuk menciptakan kontras yang jelas dan persuasif antara partai dan lawan-lawannya.

Strategi ofensif diklasifikasikan ke dalam dua jenis yaitu perluasan dan penetrasi pasar. Strategi perluasan pasar atau massa bertujuan untuk menjangkau

kelompok-kelompok pemilih baru di samping basis yang sudah ada. Strategi ini mencakup iklan dan memperkenalkan program dan kandidat partai kepada publik. Di sisi lain, pendekatan penetrasi pasar berusaha memaksimalkan potensi kandidat terpilih dengan mengidentifikasi kekuatan mereka dan menggunakan teknik penargetan pemilih. Strategi ini berkontribusi pada keberhasilan partai secara keseluruhan dan membantu mengamankan basis pemilih yang lebih besar. Strategi Ofensif dapat melibatkan berupa propaganda, manipulasi, politisasi isu, dan mobilisasi massa.

Sedangkan, strategi defensif atau bertahan biasanya digunakan oleh partai atau organisasi untuk melindungi kontrol atau target pasar mereka dan menghindari kehilangan pengaruh. Strategi ini mencakup upaya untuk mempertahankan pendukung yang ada dan mendorong pemilih musiman sebelumnya untuk memilih partai tersebut lagi. Tujuan dari strategi defensif adalah untuk melindungi pasar, baik dengan menghindari persaingan atau dengan menyerahkan sebagian pangsa pasar. Strategi defensif, tidak seperti strategi ofensif, berusaha mengurangi perbedaan mencolok yang mungkin terlihat oleh para pemilih. Namun, dalam beberapa kasus, metode ofensif dan defensif dapat digunakan secara bersamaan. Metode defensif digunakan untuk menjamin

bahwa partai mempertahankan kehadiran dan pengaruhnya di pasar. Strategi defensif dapat melibatkan berupa strategi koalisi, strategi diplomasi dan negosiasi, strategi legalitas, dan strategi pencitraan. (Schroder Peter, 2013).

Secara keseluruhan, berbagai jenis strategi politik ini saling melengkapi dan dapat digunakan dalam berbagai kombinasi tergantung pada konteks politik yang dihadapi, tujuan yang ingin dicapai, serta kekuatan dan kelemahan masing-masing aktor politik. Pemilihan strategi yang tepat sangat menentukan keberhasilan dalam mencapai hasil politik yang diinginkan, apakah itu untuk mempertahankan kekuasaan yang ada, merebutnya, atau mengubah kebijakan publik yang berpengaruh pada masyarakat.

G. Pelaku Strategi Politik

Pelaku strategi politik adalah individu atau kelompok yang terlibat dalam merancang, mengimplementasikan, dan memanipulasi strategi untuk mencapai tujuan politik mereka. Dalam perspektif Schroder, pelaku strategi politik dapat dibagi menjadi dua kategori utama, tergantung pada peran dan kedudukan mereka dalam sistem politik. Pelaku dalam strategi politik meliputi:

- a) Pelaku resmi

Pelaku utama dalam strategi politik adalah individu atau kelompok yang memiliki peran yang sah, formal, dan diakui dalam struktur politik dan pemerintahan seperti partai politik, pemimpin politik atau anggota legislatif, Lembaga pemerintahan seperti lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Dalam konteks internasional ada diplomat sebagai pelaku resmi dari strategi politik.

b) Pelaku tidak resmi

Selain individu yang sah dalam struktur politik terdapat individu atau kelompok yang tidak memegang posisi resmi dalam struktur pemerintahan atau negara seperti kelompok kepentingan, gerakan sosial, aktivis, media massa seperti *X*, *Instagram*, *Facebook*, *Tiktok*, *dll*. Selanjutnya, para akademisi atau para intelektual, dan yang terakhir, Organisasi Non Pemerintah atau *NGO*. Walaupun mereka tidak sah atau formal, tetapi mereka memiliki pengaruh besar dalam pembentukan opini publik, pengambilan keputusan, dan pengaruh politik melalui metode yang tidak terstruktur.

H. Proses Strategi Politik

Menurut Peter Schroder, proses atau langkah-langkah dalam strategi politik dalam mencapai tujuan terdapat enam langkah penting yang mencakup:

- a) Analisis situasi. Dalam tahap awal ini yaitu memahami konteks politik, para pelaku, topik-topik penting, dan proses sosio-ekonomi untuk mengidentifikasi adanya peluang dan risiko dari strategi yang akan dilakukan.
- b) Menetapkan tujuan politik yang eksplisit atau jelas. Tahap ini seperti halnya memenangkan pemilu, memengaruhi kebijakan, membentuk aliansi, atau mempertahankan kekuasaan, dengan menggunakan tujuan yang tepat, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu.
- c) Merumuskan rencana-rencana utama. Tahap ini membantu dalam mengembangkan tindakan yang signifikan untuk mencapai tujuan, seperti strategi ofensif atau defensif, berdasarkan kekuatan internal, keterbatasan, peluang eksternal, dan ancaman.
- d) Selanjutnya, perencanaan taktik. Dalam tahap ini yaitu berupa memilih tindakan tertentu, mengalokasikan sumber daya, dan membuat jadwal pelaksanaan untuk rencana strategi politik.

- e) Implementasi strategi adalah bagaimana cara untuk melaksanakan strategi dan taktik yang telah dikembangkan secara efisien, yang membutuhkan kolaborasi tim, komunikasi yang baik, serta manajemen sumber daya. Tahap ini bertujuan untuk memantau kemajuan dan mengubah langkah-langkah yang kurang efisien yang diperlukan sangatlah penting.
- f) Terakhir, evaluasi dan penyesuaian. Dalam tahap ini ialah mencari tahu seberapa efektif rencana yang sudah berjalan tersebut. Tahap ini bertujuan untuk memperbaiki kekurangan atau meningkatkan strategi ke depan, dan menyesuaikan jika keadaan politik tiba-tiba berubah (Sahea et al., 2018).

BAB III

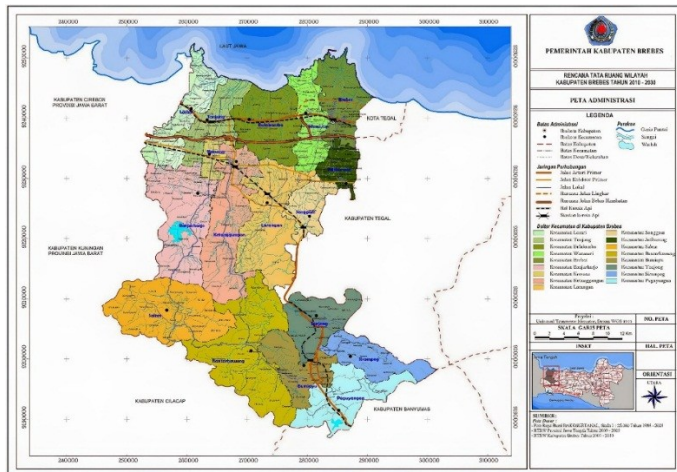
GAMBARAN UMUM DAN DINAMIKA POLITIK LOKAL BREBES

A. Gambaran Umum Kabupaten Brebes

1. Kondisi Georafis dan Demografis Kabupaten Brebes

Kabupaten Brebes adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di bagian paling barat laut Provinsi Jawa Tengah. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Laut Jawa di utara, Kabupaten Tegal di timur, serta Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap di selatan. Dengan luas wilayah mencapai 1.769,62 km², Brebes menjadi kabupaten terluas ketiga di Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Grobogan.

Gambar 3. 1 Peta Kabupaten Brebes



(Sumber : Pemerintah Kabupaten Brebes)

Kabupaten Brebes terdiri dari 17 kecamatan, 292 desa, dan 5 kelurahan. Wilayah ini memiliki garis pantai sepanjang 65,48 km yang membentang di sepanjang Laut Jawa, memberikan potensi besar dalam sektor perikanan dan kelautan. Selain itu, Brebes juga dilintasi oleh beberapa sungai besar, seperti Sungai Pemali, yang berperan penting dalam irigasi lahan pertanian dan kehidupan masyarakat setempat.

Tabel 3.1 Luas Wilayah Kabupaten Brebes berdasarkan kecamatan.

Kecamatan		Luas (Km²)
1.	Salem	167,21
2.	Bantarkawung	208,18
3.	Bumiayu	82,09
4.	Paguyangan	108,17
5.	Sirampog	74,19
6.	Tonjong	86,55
7.	Larangan	160,25
8.	Ketanggungan	153,41
9.	Banjarharjo	161,75
10.	Losari	91,79
11.	Tanjung	72,09
12.	Kersana	26,97
13.	Bulakamba	120,36
14.	Wanasari	75,34
15.	Songgom	52,65
16.	Jatibarang	36,39
17.	Brebes	92,23
Kabupaten Brebes		1.769,62 km²

(Sumber : BPS Kabupaten Brebes)

Jumlah penduduk di Kabupaten Brebes berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes tahun 2024, berjumlah 2.043.077 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak yaitu di Kecamatan Brebes dengan jumlah 189.243 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit yaitu di Kecamatan Salem dengan jumlah 65.085 jiwa. Untuk laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Brebes dari tahun 2020 – 2023 yaitu sebesar 1,28%.

Tabel 3. 2Jumlah Penduduk Tahun 2023 dan Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2020 - 2023 berdasarkan kecamatan di Kabupaten Brebes

Kecamatan		Penduduk (Ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020–2023
1.	Salem	65.085	1,04
2.	Bantarkawung	107.023	1,58
3.	Bumiayu	117.198	1,55
4.	Paguyangan	116.496	1,50
5.	Sirampog	72.008	1,20
6.	Tonjong	79.565	1,56
7.	Larangan	162.997	1,37
8.	Ketanggungan	146.834	0,69

9.	Banjarharjo	132.520	0,88
10.	Losari	143.422	1,37
11.	Tanjung	108.714	1,33
12.	Kersana	69.888	1,48
13.	Bulakamba	186.539	1,06
14.	Wanasari	167.529	1,37
15.	Songgom	90.117	2,21
16.	Jatibarang	87.899	0,41
17.	Brebes	189.243	1,46
Kabupaten Brebes		2.043.077	1,28

(Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes)

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwasannya laju pertumbuhan penduduk paling cepat yaitu di wilayah Kecamatan Songgom sebesar 2,21%, sedangkan laju pertumbuhan penduduk paling lambat yaitu di wilayah Kecamatan Jatibarang sebesar 0,41%.

Tabel 3. 3Jumlah Penduduk laki – laki dan perempuan berdasarkan usia di Kabupaten Brebes

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	82.237	78.785	161.002
5-9	81.023	77.637	158.660
10-14	79.041	74.643	153.684
15-19	78.292	74.018	152.310

20-24	82.760	77.970	160.730
25-29	89.053	82.243	171.296
30-34	90.133	83.839	173.972
35-39	84.702	80.568	165.270
40-44	77.213	75.767	152.980
45-49	71.186	70.939	142.125
50-54	61.526	61.224	122.750
55-59	50.182	50.872	101.054
60-64	39.873	41.993	81.866
65-69	30.575	32.928	63.503
70-74	19.968	21.943	41.911
75+	17.979	21.965	39.944
Kabupaten Brebes	1.035.743	1.007.334	2.043.077

(Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes tahun 2023, jumlah penduduk laki-laki di kabupaten ini lebih besar dibandingkan dengan penduduk perempuan. Penduduk laki-laki tercatat sebanyak 1.035.743 jiwa, sedangkan penduduk perempuan berjumlah 1.007.334 jiwa. Kelompok usia dengan jumlah penduduk terbanyak adalah usia 30 - 34 tahun, yang mencapai 173.972 jiwa. Sebaliknya, kelompok usia dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah usia 75 tahun keatas, dengan total 39.944 jiwa. Data tersebut

menunjukkan bahwa Kabupaten Brebes memiliki dominasi penduduk laki-laki serta didominasi oleh kelompok usia produktif, yang mencerminkan potensi besar untuk pembangunan ekonomi daerah namun tetap membutuhkan perhatian terhadap kesejahteraan kelompok lanjut usia.

Untuk mengetahui tingkat partisipasi sekolah penduduk, digunakan dua indikator utama, yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). APM adalah angka dalam bentuk persentase yang menunjukkan jumlah penduduk usia sekolah yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjangnya. Semakin tinggi APM, semakin baik sistem pendidikan dalam memastikan bahwa anak-anak mendapatkan pendidikan tepat pada waktunya. Sementara itu, APK mengukur persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu, tanpa memperhitungkan batasan usia ideal.

Tabel 3. 4 APM dan APK Penduduk Kabupaten Brebes
tahun 2023

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)	Angka Partisipasi Kasar (APK)
SD/MI/Sederajat	99,41	104,77
AMP/MTs/Sederajat	85,17	101,16
SMA/SMK/MA/Sederajat	54,28	77,17

(Sumber : BPS Kabupaten Brebes)

Berdasarkan data yang tersebut, terlihat bahwa angka APK dan APM menurun seiring dengan jenjang pendidikan, mulai dari SD/MI hingga SMA/SMK/MA. Pada tingkat SD/MI, tingkat partisipasi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya sangat tinggi, namun semakin menurun pada tingkat SMP/MTs hingga SMA/SMK/MA. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik ke SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA. Angka APK dan APM menjadi ukuran penting dalam mengevaluasi kemajuan pendidikan serta kualitas sumber daya manusia. Pendidikan yang lebih tinggi memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan peluang kerja, serta turut mempengaruhi partisipasi politik dan keterlibatan

masyarakat dalam pembangunan daerah dan pembuatan kebijakan publik yang lebih baik.

2. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya Kabupaten Brebes

Kabupaten Brebes memiliki sejarah panjang yang turut membentuk kondisi sosial dan budaya masyarakatnya saat ini. Berdasarkan catatan sejarah, Brebes dahulu merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Mataram Islam sebelum akhirnya masuk dalam pengaruh Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten. Letaknya yang berada di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat membuat Brebes menjadi daerah strategis yang mengalami akulturasi budaya dari berbagai kerajaan dan pengaruh kolonial Belanda. Interaksi ini menyebabkan munculnya perpaduan budaya Jawa dan Sunda dalam kehidupan sosial masyarakatnya, yang masih dapat ditemukan dalam tradisi, bahasa, serta sistem sosial yang berlaku hingga saat ini.

Sebagai bagian dari wilayah Kerajaan Mataram, Brebes memiliki keterikatan kuat dengan budaya Jawa, terutama dalam hal penggunaan bahasa dan sistem sosial yang berbasis gotong royong. Dialek "Jawa Brebesan" atau *Ngapak* yang digunakan masyarakat setempat mencerminkan pengaruh bahasa Jawa dengan sedikit

sentuhan dialek Sunda yang berasal dari interaksi dengan wilayah tetangga di Jawa Barat. Selain itu, dalam aspek keagamaan, Brebes mengalami perkembangan signifikan seiring dengan masuknya Islam yang dibawa oleh para wali dan penyebar agama, terutama dari Kesultanan Cirebon. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika hingga kini Brebes dikenal sebagai daerah yang religius, dengan banyaknya pesantren dan kegiatan keagamaan yang aktif di masyarakat.

Selain itu, sejarah panjang Brebes sebagai daerah agraris juga membentuk pola kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Sejak masa kolonial Belanda, Brebes telah dikenal sebagai daerah penghasil pertanian, terutama padi dan tebu, yang menjadi komoditas utama sejak era tanam paksa. Hingga kini, sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat, dengan komoditas unggulan seperti bawang merah dan telur asin yang telah menjadi ikon khas Brebes. Budaya kerja keras dan gotong royong dalam sektor pertanian telah diwariskan secara turun-temurun, membentuk karakter masyarakat yang mandiri dan kuat dalam menghadapi tantangan ekonomi.

Dalam bidang budaya, pengaruh sejarah juga terlihat dalam berbagai tradisi yang masih dipertahankan oleh masyarakat Brebes. Sedekah Laut, misalnya, merupakan ritual yang sudah dilakukan sejak zaman

kerajaan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas hasil laut yang melimpah. Demikian pula dengan tradisi Nyadran, yang mencerminkan nilai spiritual tinggi dalam kehidupan masyarakat Brebes sejak dahulu kala. Keberadaan seni tradisional seperti wayang kulit dan gamelan juga tidak terlepas dari pengaruh kerajaan-kerajaan masa lalu, di mana kesenian ini berkembang sebagai bagian dari ekspresi budaya dan hiburan masyarakat.

Dengan demikian, perjalanan sejarah Kabupaten Brebes memiliki peran signifikan dalam membentuk tatanan sosial dan budaya masyarakatnya saat ini. Berbagai pengaruh dari kerajaan-kerajaan terdahulu, masa kolonial, serta interaksi dengan wilayah sekitarnya telah melahirkan identitas masyarakat yang khas. Nilai-nilai tradisional tetap terpelihara meskipun dihadapkan pada arus modernisasi. Selain itu, sejarah juga membentuk karakter masyarakat Brebes yang dikenal religius, memiliki etos kerja tinggi, serta tetap menjunjung tinggi kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari.

B. Kondisi Politik Kabupaten Brebes

1. Sejarah Pemerintahan Kabupaten Brebes

Kabupaten Brebes, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, dikenal sebagai daerah pertanian

yang subur dengan sejarah panjang. Ibu kota kabupaten ini adalah Brebes, yang berbatasan dengan kota-kota di jalur pantai utara Jawa seperti Pekalongan, Pemalang, dan Tegal. Sejarah Brebes tidak terlepas dari pengaruh Kerajaan Mataram, yang pada masa itu menjadikan Brebes bagian dari Kabupaten Tegal. Namun, perubahan signifikan terjadi pada tanggal 15 Desember 1677, saat dilaksanakan rapat pemekaran kabupaten di Istana Kesultanan Pakungwati Cirebon, yang dihadiri oleh perwakilan Kerajaan Mataram dari Kartasura. Pada rapat tersebut, Pangeran Cahyo Kusumo dilantik menjadi Bupati Brebes dengan gelar Raden Tumenggung Arya Suralaya. Pelantikan resmi dilakukan pada 18 Januari 1678, yang dipimpin oleh Kanjeng Sinuwun Sri Susuhunan Amangkurat Amral. Peristiwa ini menandai berdirinya Kabupaten Brebes sebagai wilayah otonom yang terpisah dari Kabupaten Tegal, dengan tanggal 18 Januari diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Brebes.

Setelah Indonesia merdeka, Brebes tetap berada di bawah Kabupaten Tegal hingga tahun 1950, ketika Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 menyatakan Brebes sebagai kabupaten mandiri dalam Provinsi Jawa Tengah. Sejak saat itu, Brebes terus berkembang, khususnya dalam pembangunan infrastruktur dan

perekonomian yang sangat bergantung pada sektor pertanian dan perikanan. Di masa reformasi, sistem pemerintahan Brebes mengalami perubahan dengan diterapkannya desentralisasi, memberikan lebih banyak kewenangan bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan kebijakan lokal. Meskipun banyak tantangan, Brebes berhasil mencatatkan kemajuan dalam pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas pendidikan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pemerintahan Brebes berlanjut dengan berbagai perubahan setelah pelantikan Pangeran Cahyo Kusumo pada 18 Januari 1678. Pangeran Cahyo Kusumo memainkan peran besar dalam memimpin Brebes sebagai daerah otonom yang terpisah dari Tegal. Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, Brebes sempat berada di bawah kekuasaan kolonial, namun pasca kemerdekaan, Brebes kembali memperoleh statusnya sebagai kabupaten mandiri sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950.

Seiring berjalannya waktu, bupati yang memimpin Brebes berganti, dengan kebijakan lokal yang terus diterapkan untuk mendukung pembangunan daerah. Bupati seperti Raden Tumenggung Arya Suralaya dan beberapa pemimpin di era modern lebih fokus pada

pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Di awal abad ke-21, Brebes memasuki era reformasi yang membawa perubahan besar dalam pemerintahan daerah, dengan desentralisasi yang memungkinkan pemerintah kabupaten lebih mandiri dalam mengambil keputusan. Fokus pembangunan kemudian beralih ke perbaikan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, dan peningkatan pendidikan serta kesehatan.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pertama kali dilaksanakan di Brebes setelah penerapan otonomi daerah melalui Reformasi 1998 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pilkada langsung pertama di Brebes diselenggarakan pada tahun 2003, di mana Indra Kusuma terpilih sebagai Bupati Brebes periode 2002-2007 dengan Wakil Bupati Achmad Faris Sulchaq. Hal ini menjadikan Indra Kusuma sebagai Bupati pertama yang terpilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat, menandai era baru dalam demokrasi lokal di Brebes. Sebelumnya, kepala daerah dipilih oleh DPRD pada masa Orde Baru.

Indra Kusuma kemudian terpilih kembali sebagai Bupati Brebes untuk periode 2007-2010, kali ini dengan Agung Widiyantoro sebagai Wakil Bupati. Namun, Indra Kusuma tidak menyelesaikan masa

jabatannya karena terlibat kasus korupsi, yang membuatnya harus berhenti sebelum akhir periode kepemimpinannya. Setelah itu, Wakil Bupati Agung Widiyantoro melanjutkan kepemimpinan dan maju dalam Pilkada berikutnya. Pada tahun 2010, Agung Widiyantoro terpilih sebagai Bupati Brebes dengan Idza Priyanti sebagai Wakil Bupati.

Pada Pilkada 2017, Idza Priyanti kemudian maju sebagai calon Bupati Brebes berpasangan dengan Narjo sebagai Wakil Bupati. Pasangan ini berhasil memenangkan pemilihan dan memimpin Brebes untuk periode 2017-2024. Idza Priyanti menjadi bupati perempuan pertama di Brebes. Pada Pilkada 2020, Idza Priyanti kembali mencalonkan diri dan terpilih untuk periode kedua, yaitu 2022-2027, berpasangan lagi dengan Narjo sebagai Wakil Bupati.

2. Warna Politik Kabupaten Brebes

Warna politik atau peta politik di Kabupaten Brebes mencerminkan dinamika kekuasaan dan preferensi politik masyarakat yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Dalam konteks politik lokal, warna politik sering kali diidentikkan dengan kekuatan partai politik yang dominan, aliansi politik yang terbentuk, serta pengaruh tokoh-tokoh kunci dalam

menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan daerah. Dalam beberapa periode, Brebes menjadi basis kekuatan politik bagi salah satu partai besar. Pada Pemilu 2024, terdapat 38 partai politik yang menjadi peserta. Di Kabupaten Brebes, PDI Perjuangan meraih posisi pertama dengan memperoleh 12 kursi di DPRD Kabupaten Brebes, sementara PKB dan Gerindra menduduki posisi kedua dengan mendapatkan 8 kursi pada pemilu tersebut.

Pada Pemilu Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), warna politik di Brebes tidak hanya dipengaruhi oleh kekuatan partai, tetapi juga oleh faktor-faktor sosiologis seperti agama, etnisitas, dan ikatan emosional dengan calon pemimpin. Selain itu, peran tokoh masyarakat, ulama, dan organisasi kemasyarakatan menjadi elemen penting yang turut mewarnai keputusan politik masyarakat. Dominasi partai tertentu dalam beberapa periode pemilu menunjukkan adanya pola keterikatan emosional dan historis antara partai tersebut dengan masyarakat Brebes. Namun, seiring berjalannya waktu, persaingan politik semakin dinamis akibat kemunculan aktor politik baru dan strategi kampanye yang semakin inovatif.

Tabel 3.5 Perolehan Suara Partai Politik pada
Pemilu

Partai Politik	Jumlah Kursi			
	Tahun 2009- 2014	Tahun 2014- 2019	Tahun 2019- 2024	Tahun 2024- 2029
PKB	7	8	9	8
Gerindra	2	5	6	8
PDI P	13	11	13	12
Golkar	7	7	7	7
Partai Nasdem		0	0	1
PKS	5	6	4	4
Hanura	1	1	1	0
PAN	4	5	3	4
Demokrat	6	4	3	3
PPP	4	3	4	3
PDK	1			
Jumlah Anggota	50	50	50	50
Jumlah Partai	10	9	9	9

Sumber : (KPU, 2024)

Berdasarkan data dalam tabel, terdapat 8 partai politik non-parlemen di Kabupaten Brebes, yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Garuda, Partai Gelora, Partai Ummat, Partai Buruh, dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). Pada tahun 2024, jumlah partai non-parlemen bertambah dengan masuknya Partai Hanura, sehingga totalnya menjadi 9 partai. Meskipun tidak memiliki kursi di DPRD, partai-partai ini aktif dalam berbagai kegiatan politik dan koalisi di Kabupaten Brebes.

Sejak Pemilu Kabupaten Brebes Tahun 2009 hingga tahun 2024, PDI Perjuangan konsisten menempati posisi pertama dalam perolehan kursi parlemen di Kabupaten Brebes. Meskipun pada periode 2014-2019 dan 2024-2029 mengalami penurunan 1 kursi, hal ini tidak mengurangi dominasi PDIP maupun menyebabkan hilangnya basis massanya. Dengan tren kemenangan yang berulang, Kabupaten Brebes juga sering dijuluki sebagai “Kandang Banteng” karena PDIP selalu memperoleh kursi terbanyak di parlemen dari waktu ke waktu.

Sementara itu, partai lain seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga memiliki pengaruh signifikan di Kabupaten Brebes, terutama dengan

dukungan kuat dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) dan komunitas pesantren. PKB secara konsisten menjadi salah satu partai dengan jumlah kursi terbanyak setelah PDIP. Partai Golkar juga menunjukkan konsistensi dalam perolehan kursi di parlemen Kabupaten Brebes dengan selalu memperoleh 7 kursi di setiap periode pemilu sejak 2009 hingga 2024, menandakan basis dukungan yang stabil. Sementara itu, Partai Gerindra mengalami tren peningkatan secara bertahap, dimulai dengan 2 kursi pada periode 2009-2014, kemudian naik menjadi 5 kursi pada 2014-2019, bertambah menjadi 6 kursi pada 2019-2024, dan akhirnya mencapai 8 kursi pada periode 2024-2029.

Selain PDI Perjuangan, PKB, Golkar, dan Gerindra, partai-partai lain di Kabupaten Brebes juga menunjukkan dinamika dalam perolehan kursi parlemen. Partai NasDem baru memperoleh kursi pada periode 2019-2024 dengan 1 kursi. Sementara itu, PKS mengalami fluktuasi, di mana pada periode 2009-2014 berhasil memperoleh 5 kursi, kemudian turun menjadi 6 kursi pada 2014-2019, dan mengalami penurunan menjadi 4 kursi yang sama pada 2 periode berikutnya.

Di sisi lain, Partai Hanura yang sebelumnya memperoleh 1 kursi dalam tiga periode berturut-turut, yakni dari 2009-2014 hingga 2019-2024, akhirnya kehilangan kursinya pada periode 2024-2029. PAN juga mengalami dinamika serupa, di mana pada periode 2009-2014 berhasil mendapatkan 4 kursi, lalu meningkat menjadi 5 kursi pada 2014-2019, tetapi kemudian mengalami penurunan menjadi 3 kursi pada 2019-2024 dan mengalami kenaikan 1 kursi pada periode 2024-2029.

Sementara itu, Partai Demokrat terus mengalami penurunan jumlah kursi, dari yang semula 6 kursi pada 2009-2014, kemudian turun menjadi 3 kursi pada 2014-2019, dan tetap bertahan dengan jumlah tersebut hingga periode 2024-2029. Di sisi lain, PPP menunjukkan stabilitas karena secara konsisten memperoleh 4 kursi dalam setiap periode pemilu.

Adapun Partai PDK yang sempat memiliki 1 kursi pada periode 2009-2014, sejak 2014-2019 hingga 2024-2029 tidak lagi mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Brebes. Secara keseluruhan, komposisi partai di DPRD Kabupaten Brebes mengalami perubahan dari segi jumlah partai yang mendapatkan kursi, di mana pada periode 2009-2014 terdapat 10 partai yang berhasil masuk parlemen, namun sejak

2014-2019 hingga 2024-2029 jumlahnya tetap bertahan di angka 9 partai.

3. Profil Pasangan Tunggal

Paramitha Widya Kusuma atau akrab disapa “Mbak Mitha” lahir di Brebes pada tanggal 18 Januari 1992, merupakan anak pertama dari mantan Bupati Brebes periode 2002-2010 yaitu Indra Kusuma yang sekarang sedang menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Brebes. Paramitha Widya Kusuma dibesarkan di Brebes bersama dua saudara kandungnya, Shinta Sandra Kusuma dan Kingking Trahing Kusuma. Kedua saudaranya baru saja dilantik sebagai anggota legislatif dari Fraksi PDIP, dengan Shinta menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi II, sementara Kingking menjadi anggota DPRD Brebes dari Dapil I.

Paramitha Widya Kusuma menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 03 Brebes, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 01 Brebes, dan menamatkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 01 Brebes. Untuk pendidikan tinggi, ia meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Magister Manajemen (M.M.) di Universitas Pancasakti Tegal.

Selain kiprahnya di dunia politik, Paramitha juga dikenal sebagai istri dari seorang pengusaha SPBU.

Paramitha Widya Kusuma memulai karier politiknya dengan bergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), mengikuti jejak ayahnya, Indra Kusuma, yang juga merupakan tokoh politik berpengaruh di Brebes. Sebelum terpilih sebagai anggota DPR RI, ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPC PDI-P Kabupaten Brebes periode 2019-2024. Dedikasinya dalam partai dan kemampuannya membangun jaringan politik yang kuat menjadi faktor pendukung kesuksesannya dalam meraih kursi legislatif dan menjadikannya tokoh muda berpengaruh di Brebes.

Pada Pemilu 2019, Paramitha berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2019–2024, mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IX, yang meliputi Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, dan Kota Tegal. Dalam perannya sebagai legislator, ia ditempatkan di Komisi VIII DPR RI, yang membidangi energi, riset, teknologi, dan lingkungan hidup. Di komisi ini, ia aktif memperjuangkan kebijakan yang mendukung pengelolaan sumber daya energi yang lebih berkelanjutan serta mendorong

peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah pemilihannya.

Sementara itu, pasangan Paramitha yaitu Wurja, lahir pada 15 Maret 1975 di Brebes, yang merupakan putra dari pasangan Ahmad dan Siti Aminah. Ia menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 02 Brebes, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 02 Brebes, dan menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 02 Brebes. Setelah itu, Wurja meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Islam Athariyah Jakarta.

Dalam karier politiknya, Wurja dimulai dengan menjabat sebagai kepala desa Wlahar Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes. Setelah itu Wurja memutuskan untuk bergabung dengan Partai Gerindra dan masuk pada tahun dan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Brebes. Lalu karimya mulai melejit sebagai wakil ketua DPRD periode tahun 2019–2024. Selain itu, ia juga memegang peran sebagai Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) dan Wakil Ketua Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Brebes.

Pada Pilkada 2024, sebelum dipasangkan bersama Paramitha Widya Kusuma sebelumnya Wurja terpilih

kembali sebagai anggota DPRD Brebes, tetapi setelah 29 hari dilantik, ia memilih untuk mengundurkan diri untuk maju ke pilkada Brebes sebagai calon Wakil Bupati yang berpasangan dengan Paramitha Widya Kusuma. Wurja berpasangan dengan Paramitha Widya Kusuma sebagai pasangan calon tunggal dan berhasil memenangkan pemilihan dengan perolehan 503.719 suara atau 59,60 persen. Mereka ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Brebes terpilih periode 2024-2029.

C. Dinamika Politik Lokal Kabupaten Brebes

1. Proses Pelaksanaan Pilkada Brebes

Pada tahun 2024 Kabupaten Brebes merupakan salah satu daerah yang turut ikut serta dalam pilkada serentak dan akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Pilkada serentak ini dilakukan serentak pada 514 daerah di Indonesia yang terdiri dari 37 Provinsi, 415 Kabupaten serta 93 Kota. 37 daerah diantaranya diikuti oleh pasangan tunggal atau melawan kotak kosong. Jawa Tengah sendiri terdapat 3 daerah yang diikuti pasangan tunggal yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Brebes.

Pelaksanaan di Kabupaten Brebes dengan hanya satu pasangan calon atau menghadapi kotak kosong harus mengikuti regulasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai pilkada dengan pasangan calon tunggal diatur dalam Pasal 54C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menyebutkan:

Ayat (1): Jika hingga batas akhir perpanjangan pendaftaran hanya terdapat satu pasangan calon, pemilihan tetap berlangsung dengan dua pilihan di surat suara, yaitu satu kolom berisi foto, nama, dan nomor urut pasangan calon serta satu kolom kosong tanpa gambar.

Ayat (2): Apabila hasil pemungutan suara menunjukkan bahwa pasangan calon memperoleh lebih dari 50% suara sah, maka pasangan tersebut dinyatakan terpilih sebagai kepala daerah.

Ayat (3): Jika suara terbanyak diperoleh oleh kotak kosong, maka pemilihan kepala daerah harus diulang pada periode berikutnya, dan hingga pemilihan ulang berlangsung, kepemimpinan daerah akan diisi oleh penjabat kepala daerah yang ditunjuk oleh pemerintah pusat.

Regulasi Pilkada Kabupaten Brebes dengan satu pasangan calon tetap menjamin hak pilih masyarakat melalui mekanisme kotak kosong. Pemilih dapat mendukung atau menolak calon yang ada, dengan dua opsi pada surat suara. Jika kotak kosong menang, pemilihan diulang pada periode berikutnya atau tidak lain yaitu pada tahun 2025 mendatang, sementara pemerintahan daerah dipimpin oleh pejabat yang ditunjuk pemerintah pusat. Sistem ini memastikan transparansi, keadilan, dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

Tabel 3. 6 Tahapan dan Jadwal Pilkada Tahun 2024

TAHAPAN	JADWAL
Perencanaan Program dan Anggaran	26 Januari 2024
Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan	sd. 18 November 2024
Perencanaan Penyelenggaraan yang meliputi Penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan	Sd. 18 November 2024

Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS	17 April 2024 sd. 5 November 2024
Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan	27 Februari sd. 16 November 2024
Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih	24 April sd. 31 Mei 2024
Pemuktakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih	31 Mei 2024 sd. 23 September 2024
Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan	5 Mei 2024 sd. 19 Agustus 2024
Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon	27 Agustus sd. 26 Agustus 2024
Pendaftaran Pasangan Calon	27 Agustus sd. 29 Agustus 2024
Penelitian Persyaratan Pasangan Calon	27 Agustus sd. 21 September 2024
Penetapan Pasangan Calon	22 September 2024

Pelaksanaan Kampanye	25 September 2024 sd. 23 November 2024
Pelaksanaan Pemngutan Suara	27 November 2024
Perhitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara	27 November 2024 sd. 16 Desember 2024

Sumber : (KPU, 2024)

Berdasarkan tabel tersebut, proses pelaksanaan Pilkada Kabupaten Brebes dalam kondisi pasangan tunggal tetap melalui tahapan seperti pilkada pada umumnya. Dilansir dari KPU (2024), dimulai dengan tahap pendaftaran calon pada 27 Agustus sampai dengan 29 Agustus 2024, di mana partai politik atau gabungan partai mengusung pasangan calon. Hingga batas akhir pendaftaran hanya satu pasangan yang akhirnya mencalonkan diri menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu pasangan Paramitha dan Wurja. Selanjutnya, pada 22 September 2024, KPU menetapkan pasangan Paramitha Wurja sebagai calon yang memenuhi syarat, dan dalam kondisi Pilkada Brebes hanya terdapat satu calon. Tahapan berikutnya adalah masa kampanye yang berlangsung dari 25 September hingga 23 November 2024, di mana

pasangan Paramitha Wurja diberikan kesempatan untuk meyakinkan pemilih, sementara pendukung kotak kosong atau komunitas Gerakan Kotak Kosong (Gertak) juga dapat menggalang dukungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada tanggal 8 November 2024, pukul 14.00 sampai dengan 18.00 WIB, dilaksanakan penajaman visi, misi, serta program pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan disiarkan langsung oleh TVRI Jawa Tengah. Penajaman visi misi ini sebagai bagian dari upaya untuk semakin meyakinkan masyarakat terhadap rencana kepemimpinan mereka. Pasangan tunggal Mitha-Wurja mengusung visi "Mewujudkan Brebes yang Maju, Sejahtera, dan Berdaya Saing melalui Pembangunan Berkelanjutan dan Inklusif."

Untuk mewujudkan visi tersebut, pasangan Mitha-Wurja merumuskan beberapa misi utama, yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat Brebes yang berketuhanan, taat hukum, toleran, dan berakhlak mulia;
2. Membangun pemerintahan yang bersih, berkeadilan, berkemajuan, berkelanjutan, serta mendukung investasi;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Brebes dengan menurunkan angka

pengangguran, mengurangi kemiskinan, dan mendorong ekonomi kreatif melalui semangat gotong royong semua pihak;

4. Menyediakan pelayanan publik yang responsif, ramah terhadap perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas;
5. Memastikan akses pendidikan yang merata, terjangkau, serta berkeadilan bagi seluruh masyarakat;
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Brebes yang sehat, tangguh, dan berdaya guna;
7. Memajukan potensi daerah untuk menciptakan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan visi dan misi ini, pasangan Mitha-Wurja berkomitmen untuk menghadirkan perubahan positif dan pembangunan yang inklusif bagi Kabupaten Brebes.

Setelah tahap penajaman visi misi pasangan calon dan masa kampanye selesai, masuk ke masa tenang yaitu pada tanggal 24–26 November 2024, di mana seluruh aktivitas kampanye seperti baliho, spanduk, bendera-bendera partai, dll. dihentikan, dan logistik

pilkada untuk 27 November 2024 mulai didistribusikan ke TPS.

Tabel 3.7 Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024

No	Pasangan Calon	Persentase Suara	Jumlah Suara
01	Paramitha Widya Kusuma, S.E., M.M – Wurja, S.E	59,60%	503.719
02	Kotak Kosong	40,40%	341.407
	Total	100%	886.423

Sumber : KPU Brebes

Tabel 3.8 Keterangan Suara Sah dan Tidak Sah Perolehan Suara Pilkada Brebes Tahun 2024

Keterangan	Jumlah	Presentase
Suara Sah	845.126	95,34%
Suara Tidak Sah	41.297	4,66%
Total Suara	886.423	100%

Sumber : KPU Brebes

Berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh KPU Brebes tanggal 9

Januari 2025 dan yang tercantum dalam Tabel 3.6, pasangan calon Paramitha Widya Kusuma, S.E., M.M. – Wurja, S.E. berhasil memperoleh suara mayoritas dengan persentase sebesar 59,60% atau 503.719 suara. Sementara itu, opsi kotak kosong mendapatkan dukungan sebesar 40,40%, yang setara dengan 341.407 suara. Dengan demikian, total suara yang masuk dalam pemilihan ini mencapai 886.423 suara.

Selain itu, berdasarkan Tabel 3.7 mengenai keterangan suara sah dan tidak sah dalam Pilkada Brebes 2024, jumlah suara sah tercatat sebanyak 845.126 suara atau 95,34% dari total suara, sedangkan suara tidak sah mencapai 41.297 suara atau 4,66%. Data ini menunjukkan bahwa partisipasi pemilih dalam Pilkada Brebes cukup tinggi, serta mayoritas suara yang masuk dinyatakan sah. Dengan perolehan suara tersebut, pasangan Paramitha Widya Kusuma – Wurja resmi terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Brebes periode 2025–2030, mengungguli suara yang mendukung kotak kosong.

2. Pelanggaran pada saat Pilkada Brebes 2024

Dilansir dari jawaban oleh PPID (Bawaslu, 2024) mengenai informasi pelanggaran yang terjadi pada saat proses pelaksanaan Pilkada Brebes 2024,

beberapa laporan yang masuk ke Bawaslu Kabupaten. Bawaslu Kabupaten Brebes telah mendaftarkan laporan dugaan pelanggaran dengan nomor register 01/Reg/PL/PB/Kab/14.12/X/2024. Laporan ini berkaitan dengan keterlibatan H. Zubad Fahilatah, anggota DPRD Kabupaten Brebes dari Fraksi PKB, dalam kampanye pasangan calon bupati Brebes, Mitha-Wurja. Berdasarkan laporan yang diterima, Pelapor memperoleh video dari Harits Ardi Wibowo pada 14 Oktober 2024, yang menunjukkan H. Zubad menghadiri kampanye terbatas pasangan tersebut.

Kampanye tersebut diselenggarakan di Gedung KPRI Rukun, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, pada Sabtu, 12 Oktober 2024, mulai pukul 15.00 WIB hingga selesai. Dalam video itu, H. Zubad tidak hanya hadir tetapi juga mengajak masyarakat memilih Mitha-Wurja dan menyatakan bahwa dirinya tidak memerlukan izin cuti sebagai anggota DPRD. Setelah Pelapor mengonfirmasi hal ini ke KPU Kabupaten Brebes, diketahui bahwa tidak ada surat izin cuti yang diajukan oleh H. Zubad Fahilatah.

Di samping laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Brebes juga menemukan sejumlah pelanggaran lainnya dalam pelaksanaan pemilu. Salah satu temuan yang tercatat dengan nomor 01/Reg/TM/PB/Kec.-

Banjarharjo/14.12/X/2024 adalah dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota KPPS Desa Banjarharjo TPS 01, Taufik Agung Pramuji. Ia telah resmi dilantik sebagai KPPS pada 7 November 2024, namun kemudian diketahui bahwa ia berperan sebagai MC atau pembawa acara dalam kampanye pasangan calon nomor urut 01, Mitha-Wurja, pada 9 November 2024 di Banjarharjo Bisnis Center. Keikutsertaan anggota KPPS dalam kampanye seperti ini merupakan pelanggaran kode etik yang dapat mengancam netralitas penyelenggara pemilu.

Temuan lain yang terdaftar dengan nomor 01/Reg/TM/PB/Kec-Bulakamba/14.12/XI/2024 berhubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua PPS Desa Bangsri, Khoirotun Nisa. Pelanggaran ini terungkap ketika jajaran Panwascam Bulakamba melakukan investigasi berdasarkan laporan dari PPL Desa Bangsri. Dalam pemeriksaan yang dilakukan, ditemukan sepuluh kotak suara di Balai Desa Bangsri dalam keadaan terbuka dan tidak tersegel. Kotak suara yang bermasalah ini berasal dari TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 13, TPS 14, dan TPS 19. Meskipun PPL Desa Bangsri dan Panwascam Bulakamba telah memberikan saran perbaikan secara lisan kepada

Khoirotn Nisa, namun langkah perbaikan tidak segera diambil. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan penyimpangan dalam proses pemilu.

Secara keseluruhan, laporan dan temuan yang didaftarkan oleh Bawaslu Kabupaten Brebes menunjukkan adanya berbagai jenis pelanggaran dalam tahapan pilkada di Kabupaten Brebes. Pelanggaran yang teridentifikasi meliputi keterlibatan anggota DPRD dalam kampanye tanpa izin cuti, keterlibatan anggota KPPS dalam kampanye, serta kelalaian dalam pengamanan kotak suara. Keadaan ini menegaskan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap jalannya pemilu agar tetap berlangsung adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Faktor Penyebab Munculnya Pasangan Tunggal

Fenomena pasangan tunggal dalam pemilihan kepala daerah, termasuk di Kabupaten Brebes pada Pilkada 2024, menjadi salah satu dinamika politik yang menarik untuk dikaji. Keberadaan pasangan tunggal dalam suatu pemilihan umum bukanlah suatu kebetulan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan dinamika politik lokal, regulasi pemilu, serta strategi yang diterapkan oleh partai

politik. Beberapa faktor utama yang menyebabkan munculnya pasangan tunggal dalam Pilkada dapat dikategorikan ke dalam aspek regulasi, dominasi politik, lemahnya oposisi, hingga peran partai politik dalam proses pencalonan.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan munculnya pasangan tunggal adalah regulasi pemilu yang mengatur mekanisme pencalonan kepala daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, syarat pencalonan kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik adalah memiliki minimal 20% kursi di DPRD atau 25% suara sah dalam pemilu legislatif sebelumnya. Ketentuan ini membatasi jumlah pasangan calon yang dapat maju dalam Pilkada, terutama jika terdapat satu kekuatan politik dominan yang menguasai sebagian besar kursi DPRD, sehingga partai lain kesulitan untuk mengusung calon alternatif. Selain itu, regulasi terkait pencalonan independen juga menjadi tantangan tersendiri, karena calon perseorangan harus memenuhi persyaratan dukungan masyarakat dengan jumlah yang signifikan, yang sering kali sulit dicapai dalam waktu yang terbatas.

Dominasi politik oleh satu kekuatan atau figur tertentu juga menjadi faktor signifikan dalam

munculnya pasangan tunggal. Dalam konteks Pilkada Brebes 2024, pasangan Paramitha Widya Kusuma dan Wurja mendapat dukungan kuat dari mayoritas partai politik di daerah tersebut. Dominasi ini tidak hanya dalam bentuk dukungan formal dari partai, tetapi juga dalam aspek elektabilitas dan popularitas calon yang jauh lebih tinggi dibandingkan potensi calon lain. Ketika suatu pasangan calon sudah mendapat dukungan dari sebagian besar partai politik besar, partai-partai lain yang tersisa cenderung tidak memiliki cukup kekuatan untuk mengusung kandidat pesaing. Akibatnya, partai-partai tersebut lebih memilih untuk bergabung dalam koalisi besar ketimbang mengusung kandidat yang berisiko kalah.

Selain dominasi politik, lemahnya oposisi juga berkontribusi terhadap terbentuknya pasangan tunggal. Di banyak daerah, termasuk Brebes, oposisi politik sering kali tidak memiliki figur kuat yang mampu menandingi calon utama. Faktor ini bisa disebabkan oleh kurangnya tokoh lokal yang memiliki popularitas dan kapasitas untuk bersaing, keterbatasan sumber daya finansial dalam proses kampanye, atau bahkan ketidaksiapan struktur organisasi partai oposisi dalam menghadapi pemilu. Kondisi ini menyebabkan tidak adanya calon alternatif yang cukup kuat untuk

bersaing dengan pasangan calon yang telah didukung oleh mayoritas partai.

Peran partai politik dalam proses pencalonan juga menjadi faktor penentu dalam munculnya pasangan tunggal. Dalam sistem demokrasi, idealnya partai politik memiliki peran aktif dalam menyeleksi dan mengusung calon yang berkompeten untuk bersaing dalam Pilkada. Namun, dalam beberapa kasus, partai politik lebih cenderung memilih untuk bergabung dengan calon yang lebih dominan daripada mengambil risiko besar dengan mengusung kandidat sendiri. Faktor pragmatisme politik ini sering kali berhubungan dengan kepentingan partai dalam mempertahankan akses terhadap kekuasaan serta mengamankan posisi mereka dalam pemerintahan daerah yang akan datang.

Selain faktor internal politik, faktor eksternal seperti dukungan masyarakat terhadap calon tertentu juga dapat memperkuat munculnya pasangan tunggal. Jika masyarakat secara luas sudah memiliki kecenderungan kuat untuk mendukung satu pasangan calon tertentu, maka potensi munculnya pesaing menjadi semakin kecil. Survei elektabilitas yang menunjukkan dominasi pasangan tertentu sering kali menjadi faktor penentu bagi partai lain untuk tidak

mengajukan kandidat alternatif karena dipandang tidak memiliki peluang besar untuk menang.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor di atas, keberadaan pasangan tunggal dalam Pilkada bukan hanya sekadar akibat dari minimnya calon, tetapi lebih merupakan hasil dari kombinasi regulasi pemilu, dominasi politik oleh satu kekuatan besar, lemahnya oposisi, serta strategi pragmatis yang diambil oleh partai politik dalam menghadapi pemilihan. Situasi ini menunjukkan bahwa dinamika politik daerah sangat dipengaruhi oleh faktor struktural dan strategis yang membentuk lanskap persaingan dalam pemilihan kepala daerah.

4. Aksi Gerakan Kotak Kosong (Gertak) di Pilkada Brebes Tahun 2024

a. Latar Belakang adanya Gertak

Gerakan Kotak Kosong muncul atau lahir karena dominasi oligarki politik yang semakin menguat dalam sistem politik lokal. Gerakan Kotak Kosong (Gertak) juga muncul sebagai bentuk perlawanan atau protes masyarakat terhadap sistem politik yang dinilai tidak memberikan pilihan demokratis yang adil.

“Awal Gertak ini lahir karena oligarki ya utamanya, ini berarti bentuk kemunduran demokrasi Brebes, sebelumnya kan Brebes belum pernah mengalami kejadian lawan kolom kosong seperti tahun ini, mbak” Kata Bang Jarot pada Sabtu, (23/02/2025).

Forum relawan Masyarakat yang di koordinatori oleh Slamet Maryoko atau lebih dikenal sebagai Bang Jarot ini menjelaskan bahwa kelompok mereka menentang atau kontra terhadap pilkada calon tunggal, yang dianggap sebagai bukti nyata keterbatasan atau kemunduran demokrasi di tingkat lokal Brebes, yang ini merupakan pertama kali dalam sejarah Pilkada Brebes.

Tabel 3.9 Struktur Organisasi Gerakan Kotak Kosong (Gertak) Brebes

Jabatan/Posisi	Nama	Tugas dan Tanggung Jawab
Koordinator Umum	H. Slamet Maryoko, S.H (Bang Jarot)	Mengarahkan gerakan, mengambil keputusan strategis, dan

		menjadi juru bicara utama Gertak.
Sekretaris	Ahmad Luayin	Mengelola administrasi dan dokumentasi gerakan, menyusun laporan kegiatan, memastikan komunikasi internal berjalan dengan baik, serta mengatur jadwal pertemuan dan koordinasi antaranggota.
Bendahara	Bagus Handoko	Bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan gerakan,

		termasuk penggalangan dana, pencatatan pemasukan dan pengeluaran, serta memastikan transparansi dalam penggunaan anggaran untuk operasional Gertak.
Ketua Pengawas	Suntoro	Mengawasi jalannya gerakan agar tetap sesuai dengan visi dan misi yang telah disepakati, memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana, serta melakukan

		evaluasi terhadap strategi yang diterapkan di lapangan.
--	--	--

Sumber : Wawancara Pribadi

Berdasarkan tabel 3. , meskipun Gerakan Kotak Kosong (Gertak) lahir sebagai gerakan spontan dari adanya sebagian masyarakat yang menolak calon tunggal dalam Pilkada Brebes 2024, organisasi atau komunitas ini tetap memiliki struktur yang jelas untuk memastikan efektivitas gerakan. Gertak ini sendiri dipimpin oleh Slamet Maryoko, S.H, atau yang lebih dikenal sebagai Bang Jarot, yang berperan sebagai koordinator utama. Bang Jarot sendiri merupakan mantan kepala desa Randusanga Kulon tahun Dan sebagai figur sentral dalam gerakan ini, ia bertanggung jawab atas arah strategis, koordinasi antaranggota, serta menjadi juru bicara utama di hadapan publik. Untuk mendukung kelancaran operasional gerakan, Gertak juga membagi peran ke dalam beberapa sektor utama, termasuk koordinator lapangan, tim media dan propaganda, tim advokasi hukum, serta tim logistik dan pendanaan.

Untuk memastikan kelancaran administrasi dan komunikasi internal, posisi Sekretaris dipegang oleh Ahmad Luayin, yang bertugas dalam mengelola dokumentasi, menyusun laporan kegiatan, serta mengoordinasikan pertemuan dan komunikasi antaranggota. Dari sisi pengelolaan keuangan, Bagus Handoko menjabat sebagai Bendahara, yang memiliki tanggung jawab dalam mengatur penggalangan dana, mencatat pemasukan dan pengeluaran, serta memastikan transparansi dalam penggunaan anggaran guna mendukung operasional gerakan.

Sementara itu, aspek pengawasan gerakan dikendalikan oleh Suntoro selaku Koordinator Pengawas, yang berperan dalam memastikan seluruh kegiatan Gertak tetap berjalan sesuai dengan visi dan misi, mengevaluasi strategi yang diterapkan di lapangan, serta mengawasi efektivitas gerakan dalam mencapai tujuannya.

Bang Jarot pun menjelaskan bahwa Gertak ini tidak hanya sebatas protes terhadap adanya calon tunggal pada Pilkada Brebes 2024, tetapi juga membawa tujuan dan agenda jangka panjang. Sebagai gerakan atau komunitas yang

lahir dari kekecewaan terhadap dominasi oligarki politik.

“Gertak juga gak hanya semata-mata muncul pada saat pilkada ini saja, mbak. Tetapi, gertak ini sekarang sudah menjadi kelompok masyarakat yang diakui oleh pemerintah daerah. Jadi Gertak sekarang berubah menjadi kelompok masyarakat yang bisa dibilang resmi lah, yang nantinya diharapkan ya akan terus mengawasi jalannya politik di Brebes ya terutama”. Ucap Jarot pada Sabtu, 23 Februari 2025.

Menurut Bang Jarot, selaku koordinator utama Gertak, gerakan ini bukan sekadar aksi sementara yang akan hilang setelah Pilkada berakhir. Gertak memiliki visi jangka panjang untuk membangun kesadaran politik masyarakat, khususnya di Brebes, agar lebih kritis terhadap praktik politik yang sedang berjalan. Dan ia menjelaskan agenda panjang gertak ini dibuktikan melalui berubahnya menjadi komunitas yang telah diresmikan oleh Kesbangpol Brebes.

Gertak tidak hanya bergerak sendiri dalam upayanya mendukung kotak kosong, tetapi juga menjalin kolaborasi strategis dengan berbagai organisasi masyarakat sipil. Salah satu mitra penting Gertak adalah LSM Satu Hati, yang telah mendapatkan akreditasi resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes sebagai pemantau Pilkada (Fajar Eko Nugroho, 2024).

Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan proses pemilihan berjalan transparan dan adil, serta mengawasi jalannya Pilkada agar sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan adanya akreditasi tersebut, LSM Satu Hati memiliki legitimasi untuk memantau setiap tahapan Pilkada, sehingga dapat memberikan laporan independen mengenai pelaksanaan pemilihan. Kerjasama antara Gertak dan LSM Satu Hati mencerminkan sinergi antara gerakan masyarakat dan lembaga pemantau dalam menjaga integritas demokrasi di Kabupaten Brebes.

Tak berbeda dengan timses pasangan tunggal yang masif dalam mengampanyekan pasangan tunggal, gertak pun tidak kalah masif

nya dengan mereka. Yang dimana tim Gertak ini melakukan beberapa gerakan atau strategi kampanye untuk menjangkau masyarakat yang tidak lain bertujuan untuk memenangkan kolom kosong pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes 2024. Pada sabtu, 23 Februari 2025, Bang Jarot menjelaskan bahwa Gertak menerapkan strategi kampanye yang berfokus pada penyadaran masyarakat mengenai pentingnya menolak calon tunggal untuk keutuhan demokrasi di Brebes.

Walaupun memiliki keterbatasan sdm dibandingkan dengan timses pasangan tunggal, Gertak mengandalkan pendekatan berbasis komunitas dan pemanfaatan media sosial sebagai sarana utama dalam menyebarkan informasi mengenai kolom kosong. Kampanye digital juga dilakukan secara masif melalui platform seperti *Facebook, TikTok, dan Instagram*, di mana mereka membagikan konten edukatif berupa video pendek berisikan narasi yang mudah dipahami mengenai fenomena adanya pasangan tunggal ini, dimana narasinya menjelaskan bahwa kita tidak perlu takut jika kita memilih kotak kosong, karena memilih kotak kosong sah secara demokrasi maupun hukum. Narasi ini selalu diucapkan di

konten media sosial ataupun saat diskusi daring melalui grup publik komunitas di platform *Facebook*, dimana tujuannya agar masyarakat lebih melek pada situasi/kondisi yang sedang terjadi di Brebes saat Pilkada 2024.

Selain kampanye digital, Gertak juga melakukan pendekatan langsung ke masyarakat melalui metode *door-to-door* atau mengunjungi masyarakat secara langsung dari rumah ke rumah. Mereka secara aktif mengunjungi warga untuk berdialog dan menyosialisasikan alasan di balik adanya gerakan kotak kosong. Pendekatan ini dinilai efektif dalam menjangkau pemilih di pedesaan dan kelompok masyarakat yang kurang aktif di media sosial, seperti lansia, petani, nelayan, serta pelaku usaha kecil (UMKM). Di berbagai kecamatan, Gertak juga menggelar pertemuan komunitas dan diskusi publik, di mana para aktivis mereka menjelaskan potensi dampak negatif dari sistem calon tunggal terhadap demokrasi lokal.

Tim Gertak juga menjelaskan pada diskusi publiknya bahwa pilkada dengan pasangan calon tunggal yang sedang dialami oleh Kabupaten Brebes ini berpotensi mengurangi

kualitas demokrasi dan kemudnuran demokrasi, karena masyarakat tidak diberikan pilihan yang beragam, sehingga proses pilkada lebih bersifat *formalitas* daripada kompetisi yang sehat pada pilkada atau pemilu pada umumnya. Selain itu, tahapan pemilu atau pilkada pada umumnya yaitu debat publik antar calon yang merupakan salah satu tahapan penting dalam menentukan pilihan pun tidak ada. Jadi, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Brebes dipaksa hanya menerima visi misi atau kampanye yang berisikan narasi positif saja dari pasangan tunggal. Situasi ini juga mempersempit ruang diskusi politik, karena hanya ada satu pasangan calon yang otomatis ditetapkan sebagai pemenang jika mendapatkan suara lebih banyak dari kotak kosong.

Selain itu, minimnya persaingan politik, kontrol terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah bisa menjadi lemah, sebab tidak ada pihak oposisi yang secara langsung dapat memberikan alternatif kebijakan atau menjadi penyeimbang dalam pemerintahan. Dampak lainnya yang dijelaskan oleh tim Gertak adalah berkurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilu, karena sebagian

pemilih merasa bahwa suara mereka tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil akhir

Gambar 3.2 Aksi Sosialisasi dan Unjuk Rasa Gerakan Kotak Kosong (Gertak) dalam Pilkada Brebes 2024



Sumber : *Hilda Wibisono, Facebook, 31 Oktober 2024, diakses 8 Maret 2025*
(<https://www.facebook.com/hilda.wibisono1>)

Selain metode komunikasi langsung dan digital, Gertak juga memanfaatkan strategi simbolik untuk memperkuat identitas gerakan. Mereka mendistribusikan kaos, stiker, dan spanduk dengan slogan yang menggambarkan perjuangan mereka, seperti "*Kotak Kosong, Suara*

Rakyat!" atau *"Brebes Butuh Demokrasi Sejati"* seperti pada gambar 3.2. Beberapa aksi damai dan unjuk rasa simbolik juga dilakukan, seperti mengenakan pakaian putih yang terdapat sablon bertuliskan kotak kosong dan sebagainya, saat berkumpul di tempat-tempat umum sebagai bentuk solidaritas terhadap gerakan ini.

"Kita ga diem-diem mbak termasuknya, kalau diem-diem kan kita ga akan publish di media manapun, tapi kalau kita kan secara terang-terangan, tetapi memang kita gerak cepat untuk pelaksanaan nya jadi ga pake informasi dulu ke warga kalau nantinya akan ada kampanye dari kita dimana dimana nya". Ujar Bang Jarot

Selain itu Bang Jarot pada wawancara yang sudah dilakukan dengan peniliti, bahwa ia membenarkan bahwa tim Gertak melakukan kampanye nya secara mendadak atau tanpa adanya pemberitahuan dari hari sebelumnya akan nantinya ada kampanye dari tim Gertak. Ia pun menjelaskan bahwa tujuan dari kampanye dadakan seperti yang sudah dilakukan ialah tidak lain yaitu mengejar waktu masa kampanye yang

dimana Kabupaten Brebes sendiri memiliki 17 kecamatan yang dimana beberapa kecamatan pun jarak dari pusat koordinasi gertak cukup jauh. Dan dilansir dari penjelasannya, memang untuk total 17 kecamatan sudah dilakukan semua terkait kampanye secara langsungnya, tetapi memang untuk desa-desa tidak semua menyeluruh dijangkau.

Hal ini pun disebabkan oleh beberapa faktor seperti jarak yang cukup jauh antar kecamatan, akses jalan yang lumayan sulit dijangkau atau kata lainnya jalanan yang rusak, faktor cuaca pun terkadang menjadi faktor menghambat dari proses kampanye.

“Kalau buat rumor kita anonim memang saya tidak menyangkal ya mbak. Memang beberapa anggota dari kita ini ada yang maunya di belakang layar. Entah apapun itu alasannya kita menghargai saja keputusannya, dan kalau memang itu mata-mata dari tim sebelah yasudah kita tidak meribetkan, mbak. Yang penting kan anggota intinya aktif koordinasi”.

Lanjutnya

Dari banyaknya anggota aktif Gertak yang berjumlah kurang lebih 150 orang, memang beberapa ada yang ingin tetap bersifat anonim entah itu karena faktor pekerjaan yang seharusnya tidak memihak salah satu pilihan di pilkada, atau mereka takut akan adanya ancaman-ancaman dari pihak tertentu.

Koordinator Gertak pun menjelaskan bahwa dalam koordinasinya terdapat beberapa *grup online*, seperti grup publik di *Facebook* yang dimana digrup tersebut bebas siapa saja boleh bergabung kedalam grupnya, sekalipun mata-mata dari pihak sebalahpun tim Gertak tidak mempedulikan. Karena menurutnya, jika memnfokuskan kepada hal-hal tersebut terus-terusan akan membuang waktu yang seharusnya waktu itu digunakan untuk rapat koordinasi terkait kelanjutan strategi, dll nya. Tetapi, memang koordinasi inti atau yang bersifat rahasia lebih banyak dirmuskan di *grup Whatsapp* dan rapat secara *offline* di lokasi yang sudah ditentukan.

“Tantangan apa hambatan pasti ya ada mbak, apalagi ancaman lebih lebih banyak. Kalo untuk ke saya sih ga ada, ga

ada yang berani kalo ke saya. Tapi, kalau anggota yang lain banyak mbak. Banyak yang laporan ke saya ancaman-ancaman kaya contohnya di spam chat Whatsapp atau Facebook. Tapi, ya kita menghadapinya enjoy aja. Kalo ga enjoy nanti mereka seneng terus tambah-tambah nambah ancaman”. Ucap Bang Jarot pada wawancara Sabtu, 23 Februari 2025.

Namun, dalam pelaksanaannya menurut Bang Jarot, Gertak menghadapi berbagai tantangan atau bahkan sampai ancaman-ancaman yang mengarah ke personal. Ia mengatakan jika ancaman untuk spesifik ke dirinya memang tidak ada, tetapi untuk anggota yang lainnya seperti contoh yang tertuju ke Hilda Wibisono mengalami ancaman dari terduga tim lawan yaitu tim pasangan tunggal.

Gambar 3.3 Bukti Chat ancaman dari
terduga tim lawan



Sumber : Facebook Hilda Wibisono

Namun, Bang Jarot belum bisa memastikan identitas jelas siapa terduga pelaku yang melakukan ancaman-ancaman terhadap anggotanya, karena hingga 23 Februari laporan yang sudah diajukan ke lembaga hukum dan polres Brebes belum ada kelanjutannya.

Berbeda dengan pasangan calon yang didukung oleh koalisi partai besar dengan

anggaran yang kuat, Gertak harus berjuang dengan sumber daya yang terbatas. Salah satu tantangan utama yang dihadapi gerakan ini adalah minimnya pendanaan, yang membuat mereka harus mencari cara kreatif dalam menjalankan kampanye. Menurut Bang Jarot, sebagai komunitas baru yang muncul di tahun 2024 ini, Untuk membiayai kampanye ini, Gertak sepenuhnya bergantung pada donasi dan sumbangan dari simpatisan, relawan, serta pihak-pihak yang ingin mendukung perjuangan mereka. Namun, identitas para donatur ini sengaja dirahasiakan demi alasan keamanan, mengingat adanya ancaman dari pihak tertentu yang berpotensi mengintimidasi mereka.

Selain permasalahan dana Gertak menghadapi kesulitan dalam menggaet massa lebih luas, terutama karena sebagian masyarakat masih tabu terhadap gerakan ini. Terlebih banyaknya stigma negatif yang beredar mengenai Gertak ini dari berbagai pihak yang menganggap mereka sebagai kelompok anti-demokrasi. Banyak pihak yang menilai bahwa Gertak justru melemahkan demokrasi karena dianggap menghambat keberlanjutan kepemimpinan daerah.

Narasi ini pun diperkuat oleh pendukung pasangan calon tunggal yang berupaya membangun opini bahwa memilih kotak kosong sama saja dengan menyia-nyiakan hak pilih dan tidak mendukung pembangunan daerah. Stigma ini membuat Bang Jarot dan tim Gertak harus berjuang lebih keras dalam menyosialisasikan bahwa bukanlah tindakan golput, melainkan bentuk perlawanan sah dalam sistem demokrasi sebagai bentuk kekecewaan terhadap terbatasnya pilihan politik.

Gambar 3. 4 Perusakan APK Gertak oleh Oknum

Relawan Paslon Tunggal



Sumber : Facebook Hilda Wibisono

Menurut keterangan Bang Jaort pun tidak hanya narasi yang beredar dari mulut ke mulut, tetapi pendukung calon pasangan Tunggal pun melakukan ‘balasan’ dari slogan-slogan dari tim gertak seperti memasang spanduk atau baliho yang berisikan inti narasi tersebut seperti salah satu contoh pada Gambar 3. . Tidak hanya itu, mereka pun bergerak aktif menghitamkan atau menghapus kembali coretan-coretan dari cat atau pilok di jalanan atau dinding-dinding diberbagai sudut dengan mengaspal coretan yang ada dijalan. Dugaan merusak spanduk yang dipasang oleh tim Gertak pun tertuju pada pendukung pasangan tunggal, yang menurut Bang Jarot mungkin balasan-balasan untuk Gertak dijalankan pada saat malam hari.

“Kalau kita bukan ancaman bagi mereka, harusnya mereka ga perlu repot-repot gerak cepat buat balas kita mbak. Buktinya, spanduk baru dipasang berapa hari udah dirusak, coretan-coretan kotak kosong langsung diaspal lagi, ada masang spanduk kalau desa itu nolak adanya gertak, padahal pas kita sampe ke

desanya warganya antusias nyambut kita mbak. Berarti kan mereka panik makanya bikin seolah-olah warga itu ga mau nerima gertak”. Jelas Bang Jarot

Gertak pun menjelaskan bahwa jika memang adanya Gertak bukan sebagai salah satu ancaman untuk pasangan tunggal, seharusnya tim pasangan tunggal tidak perlu melakukan ‘balasan’ untuk tim gertak.

Gambar 3.5 Kerusuhan Pada Aksi Demo



Sumber : Facebook Hilda Wibisono

Di masa tenang Pilkada yaitu 26 November 2024, terjadi demonstrasi yang

berujung ricuh antara massa Gertak dan pihak yang diduga berasal dari tim pasangan tunggal Mitha-Wurja. Aksi yang awalnya berlangsung damai sebagai bentuk protes terhadap Pilkada yang dianggap tidak demokratis berubah tegang setelah muncul provokasi dan intimidasi. Seorang pria yang diduga berasal dari tim pasangan tunggal Mitha-Wurja terlihat mengacungkan sebuah pistol di tengah kerumunan massa, yang sontak menyebabkan kepanikan dan meningkatkan ketegangan di lokasi.

Insiden ini menimbulkan dugaan bahwa ada unsur kekerasan dan intimidasi yang dilakukan terhadap pendukung Gertak, dengan tujuan membubarkan demonstrasi dan menghalangi mereka menyuarakan aspirasi. Kerusuhan pun tak terhindarkan, dengan beberapa peserta aksi mengalami pemukulan dan dorongan fisik di tengah kericuhan. Massa yang awalnya berkumpul dengan damai mulai terpecah akibat situasi yang semakin tak terkendali.

Bang Jarot menjelaskan bahwa sepertinya memang ada oknum-oknum yang dengan sengaja memprovokasi massa, memperkeruh keadaan, dan bahkan mencoba menyudutkan demonstran kotak

kosong sebagai pihak yang menciptakan kekacauan pada demo tersebut.

Hingga 23 Februari 2025 pun menurut Bang Jarot belum ada klarifikasi resmi dari pihak berwenang terkait kepemilikan senjata tersebut dan langkah hukum apa yang nantinya akan diambil. Namun, insiden ini semakin memperkuat dugaan bahwa Pilkada Brebes 2024 diwarnai tekanan politik, di mana kubu kotak kosong menghadapi intimidasi yang serius.

BAB IV

STRATEGI POLITIK PEMENANGAN PASANGAN TUNGGAL DALAM MELAWAN GERAKAN KOTAK KOSONG PADA PILKADA BREBES TAHUN 2024

A. Strategi Politik yang digunakan Pasangan Tunggal dalam Melawan aksi nyata Gertak pada Pilkada Brebes tahun 2024

Dalam menghadapi Pilkada Brebes 2024 yang diwarnai aksi nyata Gerakan Kotak Kosong (Gertak), pasangan tunggal Paramitha-Wurja menerapkan strategi politik yang terarah dan mudah disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Strategi ini disusun berdasarkan analisis situasi, pemetaan wilayah, serta segmentasi pemilih, sehingga setiap langkah kampanye dapat menjawab tantangan dari strategi dan aksi nyata Gertak secara efektif.

Selanjutnya, strategi ini dijabarkan ke dalam dua pendekatan utama, yaitu strategi ofensif dan defensif, yang saling melengkapi untuk memperkuat posisi pasangan tunggal di tengah tekanan gerakan kotak kosong.

1. Strategi Ofensif Pasangan Tunggal

Strategi ofensif ini digunakan untuk memperluas basis dukungan dan menembus pasar pemilih yang belum solid, terutama dalam menghadapi tantangan strategi dan

aksi nyata yang dilakukan oleh Gertak, yang dimana Gertak mengajak masyarakat luas untuk memilih kotak kosong. Dalam strategi ofensif ini, tim pemenangan melakukan beberapa langkah, sebagai berikut:

A) Analisis Situasi

a) Pemetaan Wilayah Berdasarkan Risiko Gertak

Berdasarkan data lapangan dan hasil wawancara dengan Ketua Tim Pemenangan, Azmi Majid, serta Koordinator Gertak, Slamet Maryoko (Bang Jarot), diketahui bahwa Gertak tidak hanya aktif berkampanye di media sosial, tetapi juga melakukan sosialisasi secara langsung ke desa-desa dan kecamatan. Mereka menyebarkan baliho, mengadakan diskusi warga, dan membangun jejaring relawan hingga ke 17 kecamatan dan 297 desa di Brebes. Dukungan terhadap Gertak juga datang dari sejumlah tokoh masyarakat dan mantan kepala desa yang merasa aspirasi mereka tidak terakomodasi oleh partai politik yang ada di Brebes.

“Kami di tim pemenangan sadar, Gertak ini bukan sekadar gerakan simbolis. Mereka benar-benar turun ke desa-desa, bahkan sampai ke pelosok. Makanya, kami harus

tahu persis di mana saja wilayah yang rawan, siapa saja tokoh masyarakat yang mendukung kotak kosong, dan bagaimana pola gerak mereka,” ujar Azmi Majid, Ketua Tim Pemenangan Mitha-Wurja.

“Di kecamatan seperti Tonjong, Bulakamba, dan Songgom, relawan kami banyak yang mantan kepala desa, guru. Mereka semua merasa suara rakyat nggak pernah didengar partai, apalagi tonjong dan songgom yang daerahnya jauh dari pusat kota. jadi sekarang kita turun langsung mengajak warga pilih kotak kosong. Apalagi kan saya sendiri mantan kepala desa, ya saya merasa saya masih punya pengaruh lah dan beberapa kenalan di sana. Walaupun memang di Songgom dan Tonjong, kita sulit untuk dijangkau karena akses transportasinya yang jauh, tapi di sana kami yakin kami menang,” kata Slamet Maryoko (Bang Jarot), Koordinator Gertak.

Menyadari bahwa Gertak bukan sekadar simbol penolakan, tetapi juga ancaman elektoral

yang dapat memengaruhi legitimasi kemenangan, tim Mitha-Wurja melakukan pemetaan sosial secara mendalam. Pemetaan ini dilakukan untuk mengetahui wilayah mana saja yang cenderung menjadi basis Gertak, siapa saja tokoh berpengaruh yang menjadi simpatisan, serta bagaimana sentimen masyarakat terhadap pencalonan pasangan tunggal. Proses pemetaan ini dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten, sehingga tim dapat merancang strategi yang tepat dan spesifik di setiap wilayah.

Untuk memudahkan dalam menyusun strategi kedepannya, tim Mitha Wurja melakukan pemetaan wilayah yang menurutnya kecamatan mana saja yang berisiko politik akan besarnya basis dukungan Gertak. Yang selanjutnya akan menyusun pendekatan yang berbeda-beda berdasarkan pemetaan wilayah tersebut.

Tabel 4.1 Pemetaan Wilayah Berdasarkan
Kategori Risiko Politik Gertak

No.	Kecamatan	Partisipasi Pemilu 2019	Dugaan Basis Gertak	Risiko Politik	Strategi Pendekatan Prioritas
1.	Salem	74,73%	Tidak	Lemah	Sosialisasi tatap muka
2.	Bantarkawung	68,80%	Tidak	Lemah	Kampanye dialogis
3.	Bumiayu	69,98%	Tidak	Lemah	Libatkan karang taruna
4.	Paguyangan	70,14%	Tidak	Lemah	Door to door
5.	Sirampog	67,99%	Ya	Sedang	Advokasi isu lokal
6.	Tonjong	66,67%	Ya	Kuat	Kampanye kreatif
7.	Larangan	73,36%	Tidak	Lemah	Penguatan TPS/RT-RW
8.	Ketanggungan	70,89%	Tidak	Lemah	Kolaborasi influencer
9.	Banjarharjo	69,44%	Ya	Sedang	Gerakan anti-golput
10.	Losari	68,16%	Ya	Sedang	Edukasi keluarga

No.	Kecamatan	Partisipasi Pemilu 2019	Dugaan Basis Gertak	Risiko Politik	Strategi Pendekatan Prioritas
11.	Tanjung	69,98%	Ya	Sedang	Sentuh tokoh migran
12.	Kersana	73,96%	Tidak	Lemah	Edukasi pemilih pemula
13.	Bulakamba	65,85%	Ya	Kuar	Isu buruh & urbanisasi
14.	Wanasari	71,15%	Tidak	Lemah	Sosialisasi pengajian
15.	Songgom	65,84%	Ya	Kuat	Forum warga
16.	Jatibarang	65,89%	Ya	Kuat	Sosialisasi desa pinggiran
17.	Brebes	70,15%	Ya	Sedang	Sosialisasi tatap muka

(Sumber : Data Internal tim Mitha-Wurja &
rekapitulasi KPU 2020 (diolah)

Hasil pemetaan pada tabel diatas menunjukkan bahwa wilayah-wilayah dengan tingkat partisipasi politik rendah pada pemilu sebelumnya seperti Tonjong, Jatibarang,

Songgom, dan Bulakamba cenderung menjadi basis Gertak. Selain itu, desa-desa di Brebes selatan dan timur yang merasa kurang mendapat perhatian pembangunan juga berpotensi kuat mendukung kolom kosong. Relawan Gertak yang aktif, seperti guru, mantan kepala desa, tokoh agama, dan aktivis LSM lokal, berperan penting dalam menyebarkan penolakan calon tunggal di wilayah-wilayah ini.

“Kami melihat dari pemilu Februari kemarin, partisipasi pemilih di beberapa wilayah cenderung kurang antusias. Ini jadi perhatian serius bagi kami karena pemilih yang kurang aktif biasanya lebih mudah dipengaruhi atau didoktrin oleh Gerakan gerakan seperti Gertak. Jadi, kami harus benar-benar fokus melakukan pendekatan personal dan edukasi agar mereka tidak terpengaruh narasi kotak kosong,” Ujar Azmi.

Penjelasan oleh Azmi Majid ini menunjukkan bahwa tim pemenangan tidak hanya mengandalkan data pemetaan wilayah dan basis dukungan, tetapi juga menganalisis tingkat partisipasi pemilih sebagai faktor

penting yang berpotensi memengaruhi hasil Pilkada. Dengan pemilih yang kurang antusias, risiko terpapar doktrin politik alternatif seperti yang disebarkan Gertak menjadi lebih besar, sehingga strategi kampanye pun disusun untuk mengantisipasi kondisi tersebut.

b) Segmentasi Pemilih Berdasarkan Kelompok Masyarakat dan Pendekatannya

Dalam tahap sebelum memulai kampanye, tim sukses pasangan Mitha-Wurja menerapkan strategi segmentasi pemilih dengan mengelompokkan masyarakat ke dalam beberapa kategori utama. Segmentasi ini bertujuan agar pendekatan kampanye bisa lebih terarah dan efektif sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan setiap kelompok masyarakat.

Tabel 4.2 Segmentasi Pemilih berdasarkan kelompok masyarakat dan pendekatannya

Kelompok Pemilih	Karakteristik Utama	Isu Utama yang Diperhatikan	Pendekatan Kampanye
-------------------------	----------------------------	------------------------------------	----------------------------

Petani Bawang Merah dan Nelayan	Peka terhadap harga dan kebijakan pertanian dan	Harga bawang, subsidi, akses pasar	Dialog langsung, simulasi subsidi, forum petani
Pelaku UMKM	Ingin penguatan ekonomi lokal dan akses modal	Pelatihan usaha, permodalan , pemasaran	Workshop , pelatihan, kampanye ekonomi lokal
Pemilih Muda (Gen-Z & Milenial)	Aktif di media sosial, kritis terhadap isu demokrasi	Demokrasi lokal, partisipasi politik, transparansi	Konten media sosial, diskusi online, webinar
Perempuan (Ibu-ibu PKK, Fatayat NU, dll.)	Fokus pada keluarga, pendidikan, dan kesehatan	Pendidikan anak, layanan kesehatan, kesejahteraan keluarga	Forum komunitas , penyuluhan, tatap muka

Lansia	Membutuh kan perhatian pada kesehatan dan kesejahtera an	Akses layanan kesehatan, bantuan sosial, aktivitas lansia	Pemeriksa an kesehatan gratis, sosialisasi program bantuan, kunjungan rumah
--------	---	---	---

Sumber : Data Internal Tim Pemenangan Mitha-
Wurja (diolah)

Berdasarkan segmentasi pemilih diatas, tim pemenangan Mitha-Wurja mengidentifikasi kelompok masyarakat strategis seperti petani bawang merah yang sangat peka terhadap isu harga komoditas pertanian dan kebijakan subsidi, sehingga pendekatan dilakukan melalui dialog langsung dan simulasi program subsidi. Pelaku UMKM menjadi kelompok lain yang diharapkan mendapatkan perhatian melalui program pemberdayaan ekonomi lokal, seperti pelatihan usaha dan akses modal, yang disampaikan lewat workshop dan kegiatan pelatihan.

“Kita kelompokkan, mbak untuk kelompok-kelompok yang strategis. Jadi nanti

pendekatan kampanye nya ke mereka itu ngga sama antar kelompok. Kita sesuaikan kebutuhannya. Kaya petani bawang merah kan mereka maunya ya mereka yang di prioritaskan untuk kebijakannya, nelayan juga. Jadi kita sesuaikan narasi yang disampaikan kepada mereka. Kalau sama semua kan nanti mereka ngga mau denger karena menurut mereka kebijakan itu mereka ga perlu tahu dan lain sebagainya”, kata Azmi.

Selain itu, menurut Azmi, pemilih muda seperti dari kalangan generasi Z (Gen-Z) dan milenial yang aktif di media sosial dan kritis terhadap isu demokrasi, terutama demokrasi lokal, menjadi fokus kampanye digital dengan konten edukatif dan diskusi online. Kelompok perempuan pedesaan seperti ibu-ibu PKK, Fatayat NU, dll, yang lebih memperhatikan isu kesejahteraan keluarga, pendidikan, dan kesehatan dijangkau melalui forum komunitas, penyuluhan di balai desa atau puskesmas, dan pendekatan tatap muka. Terakhir, kelompok lansia yang membutuhkan perhatian khusus pada layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial juga menjadi sasaran kampanye

dengan program pemeriksaan kesehatan gratis, sosialisasi bantuan sosial, dan kunjungan rumah untuk memastikan kebutuhan mereka terpenuhi.

B) Penyusunan Slogan dan Narasi Utama “Brebes Beres!”

Tim sukses pasangan tunggal Mitha-Wurja secara khusus meluncurkan slogan “Brebes Beres” sebagai inti dari strategi politik mereka. Peluncuran slogan pada 23 Agustus 2024 ini bukan sekadar formalitas, melainkan momentum penting untuk menarik perhatian dan membangun kepercayaan masyarakat Brebes. Slogan ini dirancang agar mudah diingat dan diterima, serta menjadi simbol komitmen kuat Mitha-Wurja untuk menghadirkan solusi nyata atas berbagai persoalan mendesak yang selama ini membelenggu Brebes.

Gambar 4. 1 Slogan Brebes Beres



Sumber : Instagram pribadi

@ParamithaWidyaKusuma

“Slogan ‘Brebes Beres’ ini bukan cuma kata-kata kosong. Ini adalah komitmen kami untuk menyelesaikan semua masalah Brebes yang sudah bertahun-tahun jadi PR, mulai dari kemiskinan sampai kesehatan. Brebes itu kabupaten termiskin kedua di Jawa Tengah, lho. Jadi, kalau bukan kita yang membereskan, siapa lagi?” ujar Azmi

“Kami ingin masyarakat yakin bahwa kalau Mitha-Wurja memimpin, Brebes benar-benar akan beres. Ini juga sekaligus pesan buat Gertak dan pendukungnya. Memilih kotak kosong itu tidak akan membereskan masalah Brebes. Justru akan memperpanjang ketidakpastian,” Lanjutnya.

“Brebes Beres” menegaskan bahwa pasangan Mitha-Wurja hadir dengan keseriusan untuk membereskan PR besar tahun-tahun sebelumnya di Brebes, mulai dari masalah kemiskinan, pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi rakyat. Hal ini sangat relevan karena Brebes selama bertahun-tahun tercatat sebagai kabupaten termiskin kedua di Jawa Tengah, dengan angka kemiskinan mencapai 15,6% atau setara dengan 283,28 ribu jiwa. Melalui slogan ini, Mitha-Wurja ingin membangun keyakinan masyarakat bahwa kepemimpinan mereka akan membawa perubahan nyata dan membuat Brebes benar-benar beres serta maju di segala aspek kehidupan.

Bukan hanya dari sekadar tagline semata, slogan ini juga menjadi penegasan kepada Gerakan Kotak Kosong (Gertak) dan para pendukungnya bahwa memilih kotak kosong tidak akan membereskan masalah Brebes. Sebaliknya, kemenangan kotak kosong justru hanya akan memperpanjang ketidakpastian dan tidak membawa solusi konkret bagi masyarakat.

C) Penyebaran Materi Kampanye dan Penguatan Media Digital

Sebagai bagian dari strategi ofensif untuk memperluas jangkauan kampanye dan memperkuat citra pasangan calon, tim sukses Mitha-Wurja melakukan penyebaran materi kampanye secara masif di seluruh wilayah Kabupaten Brebes. Materi kampanye mengenai tagline “Brebes Beres!” yang disebarkan meliputi baliho, spanduk, dan baju kampanye, dengan target distribusi 100.000 brosur, baliho, dan spanduk serta 10.000 baju kampanye untuk relawan dan simpatisan selama Juli–Oktober 2024.

Langkah ini diambil sebagai respons dari masifnya penyebaran atribut kampanye (APK) yang dilakukan oleh Gertak di berbagai titik strategis, seperti jalan raya, desa, pasar, dan pusat keramaian.

Melihat dominasi atribut Gertak, tim Mitha-Wurja tidak kalah untuk meningkatkan intensitas dan cakupan penyebaran materi kampanye agar tidak kalah secara visual dan tetap mempertahankan dukungan di tengah masyarakat.

“Kita juga rangkul ke UMKM, kaya pedagang warung di pinggir jalan itu kita menawarkan pembuatan spanduk toko dengan gratis tapi dengan ketentuan ada foto Mbak Mitha nya, dan ada narasi dari tagline kita yaitu Brebes Beres. Karena menurut kita dengan cara ini masyarakat desa jadi tahu siapa calon bupati Brebes. Dan ini menurut kami cukup berguna bagi mereka yang sebelumnya nggak ada spanduk tokonya sekarang dibantu Mbak Mitha jadi ada”. Ujar Azmi.

Menurut Azmi, tim juga menerapkan taktik atau cara inovatif dengan menggandeng warung, toko, dan kios di pasar maupun area umum sebagai titik pemasangan spanduk dan baliho dukungan, sehingga kampanye Mitha-Wurja benar-benar hadir di lingkungan terdekat masyarakat khususnya di kalangan para UMKM.

Materi kampanye juga disesuaikan sesuai dengan karakteristik wilayah dan kelompok pemilih yang tim sudah lakukan diawal. Di daerah yang teridentifikasi sebagai sarang basis Gertak, pesan kampanyenya lebih menekankan pentingnya partisipasi aktif dan penolakan terhadap golput, serta menyoroti risiko politik jika kotak kosong menang.

“Salah satu target kemenangan kita itu untuk para pemuda, mbak. Khususnya ini milenial dan Gen-Z ya untuk generasi seperti mbaknya. Apalagi kan Mbak Mitha ini kan bagian dari pemuda. Mbak Mitha ini masih milenial loh mbak. Baru umur 33 Tahun. Baru kemarin ulang tahun. Jadi menurut kami harusnya pemuda ini paham ya siapa yang harus dipilih. Apalagi kan ini Gen-Z baru pertama ikut pemilihan di Pilkada. Jadi ya tim harap para pemuda ini menggunakan hak pilihnya dengan bijak.” Lanjutnya

Gambar 4.2 Daftar Pemilih Tetap Klasifikasi Usia

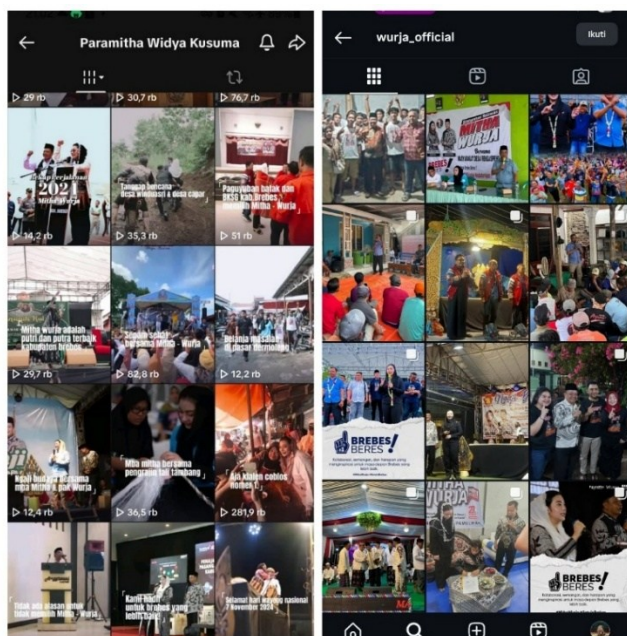


(Sumber : Instagram akun @Kpu.Brebres)

Salah satu target utama dalam penyebaran materi kampanye ini adalah pemilih muda, khususnya Gen-Z dan milenial. Berdasarkan data daftar pemilih tetap (DPT) yang dilansir oleh KPU Brebes, jumlah pemilih muda pada Pilkada Brebes 2024 mencapai sekitar 58,31% dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.519.562 jiwa, atau lebih dari 887.000 pemilih muda. Banyak di antara Gen-Z ini baru pertama kali ikut serta dalam pencoblosan atau pemilihan di tahun 2024 ini.

Azmi juga menjelaskan bahwa Paramitha, yang juga merupakan bagian dari milenial berusia 33 tahun, secara terbuka menyampaikan bahwa ia ingin menjadi contoh bagi anak muda Brebes agar tidak ragu terjun ke dunia politik dan berani mengambil peran dalam menentukan masa depan daerahnya. Ia menegaskan bahwa dirinya paham betul aspirasi dan keresahan generasi muda, karena ia juga tumbuh sebagai bagian dari generasi milenial. Melalui kampanye ini, Mitha menjelaskan dalam janjinya, bahwa ia akan menghidupkan event-event anak muda seperti turnamen futsal, turnamen E-Sport, acara keolahragaan seperti event maraton dll. Selain itu, Mitha juga berharap semakin banyak anak muda Brebes yang melek politik, berani bersuara, dan tidak mudah terpengaruh hoaks atau narasi menyesatkan terkait kotak kosong.

Gambar 4. 3 Unggahan Konten Digital di Akun *Tiktok* Pribadi Paramitha Widya Kusuma



(Sumber : Akun *Tiktok* Pribadi @Paramitha Widya Kusuma dan Akun *Instagram* Pribadi @wurja_official)

Selain itu, tim juga secara intensif menyebarkan konten digital berupa infografis, video pendek, dan narasi edukatif di platform seperti *Facebook*, *Instagram*, dan *TikTok*. Upaya ini bertujuan agar pemilih muda lebih kritis terhadap isu-isu demokrasi lokal dan mampu menjadi generasi yang cerdas dalam menentukan pilihan politiknya. Penyebaran

konten digital ini juga sangat penting karena banyak masyarakat Brebes yang merantau di kota lain dan kurang mengetahui perkembangan situasi politik Pilkada di Brebes. Dengan demikian, distribusi informasi melalui media digital diharapkan dapat menjangkau mereka yang sedang merantau, sehingga para perantau tetap mendapatkan informasi yang akurat dan dapat berpartisipasi secara sadar dalam proses demokrasi di Brebes.

Dengan penyebaran materi kampanye yang masif serta figur Mitha yang ingin menginspirasi anak muda, tim Mitha-Wurja berharap dapat memperluas basis dukungan, memperkuat pesan utama kampanye, serta menepis narasi negatif dan dominasi atribut dari Gertak, khususnya di kalangan pemilih muda yang menjadi kunci kemenangan Pilkada Brebes 2024.

D) Kampanye Tatap Muka

Sebagai bagian dari strategi pemenangan berbasis komunitas dan pendekatan langsung, tim sukses Mitha-Wurja menempatkan metode kampanye langsung seperti kampanye door to door, forum warga, dan kunjungan langsung ke kelompok masyarakat sebagai instrumen penting untuk memperkuat komunikasi politik dan membangun kepercayaan

masyarakat di tingkat akar rumput. Strategi ini juga dirancang sebagai respons langsung terhadap aksi nyata Gerakan Kotak Kosong (Gertak), yang aktif melakukan sosialisasi, penyebaran atribut, dan diskusi warga di berbagai desa dan kecamatan di Kabupaten Brebes.

1) Kampanye Door to Door

Metode door to door yang dilakukan tim pemenangan secara sistematis dengan melibatkan ± 800 relawan dan tim kampanye di setiap kecamatan dan desa.

“Kalau untuk cara yang kita gunakan itu sebenarnya ya sama kaya paslon paslon di daerah lain ya mbak, masih tradisional juga kaya Door to door sama forum warga. Kita kan relawannya banyak banget, mbak. Karena kita 12 partai pasti tiap partai itu menyebar relawannya. Ya kurang lebih ada 800 an relawan lah yang tersebar di kecamatan-kecamatan. Mereka ini secara sukarela melakukan door to door ke warga. Edukasi juga apalagi warga yang maaf pendidikannya rendah itu harus kita kasih

paham kalau nih pilkada bu pak calonnya Mbak Mitha dan Pak Wurja. Mbak Mitha ini anaknya Pak Indra Kusuma, pilih yang ada foto mbak Mitha nya ya pak/bu, jangan yang ga ada gambarnya”, Jelas Azmi

“Tapi kita juga ngga melulu melimpahkan ke relawan semua, mbak. Ada kalanya Mbak Mitha itu terjun langsung ke masyarakat”, Lanjutnya.

Azmi menjelaskan untuk sasaran utama strategi door to door ini pemilih yang belum terpapar secara optimal oleh kampanye media massa maupun digital yang sudah dilakukan sebelumnya, masyarakat yang masih *gaptek*, serta kelompok masyarakat yang dinilai rawan terpengaruh oleh narasi Gertak maupun isu kotak kosong. Sasaran ini meliputi:

- 1) Ibu rumah tangga, karena waktu mereka yang sudah dihabiskan untuk pekerjaan rumah.
 - 2) Pedagang kecil dan pelaku UMKM di pasar tradisional.
 - 3) Buruh dan pekerja informal
- Buruh dan pekerja informal seringkali tidak terjangkau oleh kampanye digital karena

waktu luang mereka terbatas dan jika ada libur mereka lebih banyak digunakan untuk istirahat di rumah.

- 4) Kelompok perempuan (PKK, Fatayat NU, dan ibu-ibu pengajian)

Yang dimana mereka tidak jarang tidak melek teknologi atau gaptek, jadi mereka hanya mengandalkan informasi secara lisan ke lisan ketimbang informasi yang didapatkan di media sosial.

- 5) Lansia, petani, nelayan, dan kelompok masyarakat yang tidak aktif di media sosial

Mereka umumnya menghabiskan waktu seharian untuk bekerja di ladang, sawah, atau laut, sehingga akses terhadap informasi digital sangat minim. Mereka lebih mudah dijangkau melalui kunjungan langsung ke rumah.

- 6) Wilayah basis Gertak atau daerah dengan risiko politik tinggi, seperti kecamatan Songgom, Jatibarang, Tonjong, dan Bulakamba. Karena tidak dipungkiri jika mereka tidak dijangkau secara langsung mereka akan lebih memilih untuk mendukung ke Korak kosong.

Gambar 4. 4 strategi door to door yang dilakukan oleh Paramitha Widya Kusuma



(Sumber : Gesuri.id)

Azmi menjelaskan bahwa door to door ini bertujuan untuk:

- a. Menyampaikan visi-misi, program unggulan, dan klarifikasi atau meluruskan mengenai isu negatif mengenai Paramitha secara personal.
- b. Menjawab langsung pertanyaan atau kekhawatiran warga terkait Pilkada calon tunggal dan isu kotak kosong.
- c. Mengklarifikasi hoaks dan menangkal narasi negatif dari Gertak seperti isu mengenai politik dinasti, isu mengenai latar belakang sang ayah Mitha, dll.

- d. Menampung aspirasi lokal dan kebutuhan spesifik di tiap wilayah agar program yang ditawarkan lebih relevan dengan masyarakat.
- e. Membangun kedekatan emosional dan kepercayaan antara Paramitha dan pemilih.

“Kita targetkan untuk door to door itu minimal 5.000 rumah lah perkecamatan yang dapat sudah dikunjungi oleh relawan kami. Kami juga menargetkan untuk selese bulan November 2024 sebelum masa tenang dan masa kampanye berakhir”, Lanjut Azmi.

Azmi juga menjelaskan bahwasanya tim pemenangan Mitha-Wurja dengan target minimal 5.000 rumah tangga per kecamatan selama bulan Juni - November 2024, strategi door to door ini diharapkan mampu memperkuat basis dukungan dan meningkatkan partisipasi pemilih, khususnya di wilayah-wilayah yang menjadi sasaran utama Gertak.

2) Forum Warga

Selain door to door, forum warga juga menjadi sarana utama membangun dialog terbuka dan partisipasi masyarakat secara kolektif. Sasaran forum warga adalah seperti tokoh masyarakat,

pemuda, kelompok perempuan, lansia, petani, nelayan, dan perwakilan kelompok strategis lain yang memiliki pengaruh di lingkungan masing-masing, terutama mereka yang tidak aktif di media sosial atau kurang melek teknologi.

Forum warga diselenggarakan di lima titik setiap kecamatan, baik di basis Gertak maupun wilayah lain yang dianggap strategis. Forum warga tidak hanya berlangsung formal, melainkan juga dikemas secara santai dan akrab, seperti ngobrol santai di warung kopi, ngopi bareng, hingga nonton bareng (nobar) pertandingan olahraga.

Konsep ini dinilai cukup efektif untuk menciptakan suasana yang cair dan mengurangi ketegangan yang sedang terjadi di rentan waktu pilkada 2024 ini, sehingga masyarakat lebih nyaman menyampaikan pendapat dan pertanyaan seputar Pilkada, isu kotak kosong, serta program-program Mitha-Wurja kepada relawan yang tersebar di desa-desa.

Gambar 4. 5 Contoh Strategi Pendekatan dengan
cara Senam Bersama



(Sumber : Akun Instagram Pribadi
@ParamithaWidyaKusuma)

Khusus untuk perempuan dan lansia, forum warga juga diisi dengan kegiatan nyata seperti pemeriksaan kesehatan gratis untuk lansia dan ibu hamil. Dalam kegiatan ini, tim kampanye menyelipkan narasi bahwa jika Mitha dan Wurja terpilih, program-program kesehatan seperti ini

akan terus diadakan secara rutin dan lebih luas cakupannya. Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan dan harapan nyata di masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan perhatian lebih dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan.

“Saya awalnya cuma ikut-ikut an aja kumpul sama bapak-bapak di pos ronda dekat rumah, tapi setelah saya ikut ngobrol dan ngerti maksud dari program-program Mitha-Wurja, saya jadi mendukung mereka. Tadinya saya mau golput aja mbak, soalnya kan ini calon satunya kotak kosong jadi buat apa dateng capek-capek ke TPS” ujar Yatno salah satu warga di Desa Banyaranyar Kecamatan Brebes.

Selain sebagai media edukasi dan dialog, forum warga juga secara nyata menjadi sarana dala, menggait dukungan baru untuk Paramitha-Wurja. Tidak jarang, mereka setelah mengikuti forum warga, sejumlah masyarakat merasa terinspirasi dan akhirnya memutuskan untuk ikut

bergabung sebagai relawan tim sukses Mitha-Wurja di tingkat desa atau kecamatan.

Di wilayah basis Gertak, forum warga difokuskan pada edukasi politik seperti penjelasan mengenai pentingnya partisipasi aktif, serta penjelasan risiko keberlanjutan pembangunan jika kotak kosong menang.

E) Kampanye Langsung (tatap muka) dan Event Massal

Kunjungan langsung ke kelompok masyarakat strategis dan kampanye tatap muka dalam bentuk event massal menjadi bagian penting dari strategi pemenangan Mitha-Wurja di Pilkada Brebes 2024. Berbeda dengan pendekatan door to door atau forum warga yang bersifat lebih personal dan komunitas, aktivitas ini menargetkan kelompok-kelompok yang memiliki pengaruh signifikan dalam kehidupan sosial dan ekonomi Brebes.

Gambar 4. 6 Kampanye “Belanja Masalah” Pasangan
Paramitha-Wurja



(Sumber : Akun *Tiktok* Pribadi @Paramitha Widya
Kusuma)

Salah satu inovasi yang menonjol adalah kampanye “Belanja Masalah” di pasar tradisional. Dalam kegiatan ini, Mitha secara langsung blusukan ke pasar-pasar tradisional, lalu berdialog dengan para pedagang, dan menanyakan harapan serta keluhan mereka terhadap pemerintahan daerah.

“Saya ingin dengar langsung, apa yang jadi masalah panjenengan di pasar ini? Kalau nanti saya dan Pak Wurja dipercaya, program apa yang paling dibutuhkan?” tanya Mitha kepada salah satu pedagang bawang di Pasar Induk Brebes.

Dialog semacam ini tidak hanya menjadi sarana penyerapan aspirasi, tetapi juga membangun kedekatan emosional dan kepercayaan Masyarakat bahwa Mitha benar-benar ingin membawa perubahan bukan untuk jabatan semata.

Gambar 4. 7 Deklarasi dukungan oleh Himpunan Pedagang dan Calo Bawang untuk Mitha-Wurja



(Sumber : G-News)

Praktik ini terbukti cukup efektif, seperti tercermin dalam deklarasi dukungan dari Himpunan Pedagang dan Calo Bawang terhadap Mitha-Wurja pada 26 September 2024 yang bertempat di Desa Petunjungan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.

“Kami selama ini merasa kurang didengar. Baru kali ini calon bupati ingin menstabilkan harga bawang dan mensubsidinya. Karena kita capek harga bawang terus merosot di bawah harga 10.000. semoga dengan dukungan kami, Mitha-Wurja menepati janjinya”. Ujar salah satu pendukung pada acara tersebut.

Strategi “belanja masalah” ini juga diterapkan pada kelompok masyarakat strategis lain, seperti petani bawang merah, pelaku UMKM, nelayan, komunitas pemuda, serta tokoh masyarakat dan guru. Kunjungan ke sentra pertanian misalnya, diisi dengan dialog terbuka membahas harga, distribusi pupuk, dan akses pasar, serta simulasi program subsidi.

Gambar 4.8 Kampanye Akbar Pasangan Mitha-Wurja



(Sumber : BeritaKota.id)

Selain kunjungan ke kelompok masyarakat strategis, tim Mitha-Wurja secara rutin menggelar kampanye tatap muka dalam bentuk event massal sebagai bagian dari taktik memperluas jangkauan pesan dan membangun citra positif di hadapan publik. Melalui kampanye akbar ini, tim pemenangan tidak hanya memperkenalkan program “Brebes Beres” secara langsung, tetapi juga membangun kebersamaan, memperkuat solidaritas antarwarga, serta mengedukasi politik secara santai dan partisipatif.

Puncak dari seluruh rangkaian kampanye tatap muka adalah kampanye akbar yang digelar pada Sabtu, 23 November 2024. Kampanye akbar ini dipusatkan di tiga lokasi utama yaitu lapangan Sepak

Bola Desa Rengaspendawa di Kecamatan Songgom, pengajian Habib Muh di Songgom, dan Perempatan Desa Larangan di Kecamatan Larangan. Selain itu, arak-arakan dan konvoi kendaraan yang dimulai dari rumah Mitha di Jalan Yos Sudarso, Brebes, berkeliling ke sejumlah titik strategis termasuk Kelurahan Pasarbatang (Kota Brebes), Kecamatan Jatibarang, dan Kecamatan Larangan.

“Kita mengadakan konvoi besar-besaran di hari terakhir itu bukan nggak ada tujuan, mbak. Kita itu bertujuan buat neken orang-orang gabut yang gabung ke gertak-gertak itu. Mereka ini nggak ada apa-apanya dibanding seluruh dukungan Masyarakat ke Mbak Mitha dan Pak Wurja. Masa sih masih mau lawan Mbak Mitha yang kemungkinan besar nya bakalan menang dari kotak kosong. Yang diharapin dari kotak kosong apa? Itu paling mereka kecewa calon yang mereka dukung nggak ada partai yang ngusung, padahal partai akhirnya ngusung Mbak Mitha ya karena terbukti Mbak Mitha ini lebih bagus track recordnya ketimbang kandidat lain”, Jelasnya.

Tujuan utama dari kampanye akbar ini bukan sekadar konsolidasi dan silaturahmi, tetapi juga sebagai strategi ofensif untuk menunjukkan kepada public, khususnya untuk Gertak, bahwa basis pendukung Mitha-Wurja jauh lebih besar dan terorganisir dari mereka. Walaupun Gertak juga bisa dikatakan memiliki basis dukungan yang tidak kecil, kampanye akbar ini secara terbuka mengirimkan pesan psikologis kepada Gertak *“nih, Mitha-Wurja lebih banyak dari anda, yakin masih mau lawan?”*.

Dengan memperlihatkan lautan massa di setiap titik kampanye, tim pemenangan ingin membangun narasi kemenangan yang tak terbantahkan, menekan psikologis lawan, dan memastikan legitimasi sosial serta partisipasi masyarakat tetap tinggi hingga hari pencoblosan pada 27 November 2024.

Juru bicara sekaligus ketua tim pemenangan Mitha-Wurja, Azmi Majid, menegaskan optimisme kemenangan minimal 75% berdasarkan tren dukungan di lapangan, serta mengimbau seluruh relawan dan pendukung untuk mengawal jalannya proses Pilkada agar berlangsung jujur dan demokratis. Dengan demikian, event massal dan kampanye akbar menjadi bagian integral dari taktik pemenangan yang tidak hanya menggerakkan massa,

tetapi juga memperkuat posisi politik Mitha-Wurja di tengah persaingan dengan Gertak.

F) Penggalangan Dukungan Tokoh Masyarakat yang berpengaruh Besar

Selanjutnya, tim pemenangan Mitha-Wurja menerapkan strategi penggalangan dukungan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai tokoh masyarakat, ulama, serta komunitas lintas sektor dan agama.

Gambar 4.9 Forum Tokoh Agama dan Masyarakat dalam Rangka Mendukung Pasangan Paramitha-Wurja pada Pilkada Brebes 2024



(Sumber : Pantura.Post)

Selain itu, Mitha-Wurja menggandeng salah satu tokoh agama dan masyarakat berpengaruh yang ada di Kabupaten Brebes untuk memberi sukungan terbuka, seperti KH. Sholahudin Masruri, pengasuh pondok pesantren Al-Hikmah 1 Benda, Kecamatan Sirampog.

Yang bertujuan untuk memperkuat legitimasi dan membangun kepercayaan masyarakat. Banyak warga yang menghormati dan menjadikan KH. Sholahudin sebagai panutan, sehingga dukungan beliau mendorong gelombang dukungan masyarakat semakin besar.

Yang dimana hal ini cukup efektif, yang dimana, untuk suara Mitha-Wurja unggul di kecamatan Sirampog yaitu 19.000 dan untuk kolom kosong yaitu memperoleh 8.709 suara.

Selain dukungan kuat dari para ulama dan tokoh agama local, Mitha-Wurja juga secara aktif menggalang dukungan dari berbagai tokoh masyarakat lintas sektor dan komunitas strategis di Brebes. Dukungan para ulama dan kiai kampung juga tidak kalah untuk ditekankan melalui forum-forum komunitas, deklarasi kampanye damai, hingga acara keagamaan, sehingga memperluas legitimasi dan basis suara di kalangan santri, komunitas pesantren, dan masyarakat religius.

Gambar 4. 10 Konsolidasi Dukungan Paguyuban Batak dan BKSG Kabupaten Brebes untuk Pasangan Mitha-Wurja"



(Sumber : Akun Tiktok Pribadi
@ParamithaWidyaKusuma)

Dukungan terhadap Mitha-Wurja juga meluas ke komunitas lintas etnis dan organisasi sosial. Seperti Paguyuban Batak Kabupaten Brebes secara resmi mendeklarasikan dukungan, memperkuat penetrasi suara di komunitas Batak yang cukup berpengaruh di sektor perdagangan dan kehidupan sosial Brebes. Selain itu, Badan Kerjasama Gereja-Gereja (BKSG) Kabupaten Brebes juga memberikan dukungan

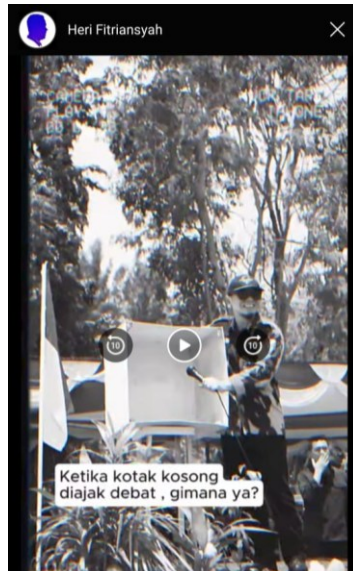
terbuka, menambah legitimasi pasangan calon ini di kalangan umat Kristen dan masyarakat lintas agama. Dukungan dari kelompok lintas agama ini memperkuat citra Mitha-Wurja sebagai pasangan yang inklusif dan mampu merangkul keberagaman.

Tidak hanya itu, Mitha-Wurja juga menggaet figur publik yang berasal dari Brebes untuk memperkuat daya tarik kampanye, salah satunya adalah Mas Jono, artis sinetron “Tukang Ojek Pengkolan” RCTI. Kehadiran Mas Jono dalam salah satu kegiatan kampanye sekaligus tasyakuran Pamor Wicaksono yang merupakan anggota DPRD Brebes periode 2019-2014 fraksi Golkar. Sosok Mas Jono yang dikenal lucu dan bisa dikatakan menjadi artis sinetron yang sukses dari Brebes menjadikan magnet tersendiri dalam membangun kedekatan emosional dengan pemilih muda dan keluarga muda.

Strategi penggalangan dukungan juga menyasar organisasi kepemudaan dan kelompok sosial besar. Pemuda Pancasila Kabupaten Brebes, sebagai salah satu organisasi kepemudaan yang cukup berpengaruh dan memiliki anggota banyak, turut memberikan dukungan dan aktif dalam pengamanan serta mobilisasi massa pada berbagai event kampanye. Keterlibatan Pemuda Pancasila menjadi faktor penting

dalam menjaga soliditas dan ketertiban selama proses kampanye, sekaligus memperluas jaringan relawan hingga ke tingkat desa.

Gambar 4.11 Sindiran Pemuda Pancasila: “Ketika Kotak Kosong Diajak Debat”



(Sumber : Facebook Heri Fitriansyah)

Pada momentum HUT Pemuda Pancasila pada 27 Oktober 2024, Ketua Umum organisasi ini bahkan membawakan narasi bernada sindiran terhadap Gertak dengan mengatakan, *“ketika kotak kosong diajak debat, gimana ya?”*. Narasi ini merupakan bagian dari strategi ofensif tim kemenangan yang secara terbuka memperlemah legitimasi gerakan kotak kosong,

membangun kepercayaan diri di kalangan relawan, dan menggeser opini publik agar melihat Gertak sebagai gerakan yang tidak rasional dalam kontestasi Pilkada. Dengan membangun narasi seperti ini di ruang publik, Pemuda Pancasila tidak hanya menjadi pelindung kampanye, tetapi juga motor penggerak narasi kemenangan Mitha-Wurja di akar rumput.

Di sektor perempuan dan keagamaan, Mitha-Wurja mendapat dukungan dari Muslimat NU dan MWC NU Kecamatan Ketanggungan, yang aktif menggerakkan ibu-ibu dan komunitas perempuan dalam berbagai kegiatan sosial, pengajian, dan edukasi politik. Selain itu, jaringan warga Muhammadiyah se-Kabupaten Brebes juga turut memberikan dukungan, memperkuat posisi Mitha-Wurja di kalangan umat Islam modernis dan komunitas pendidikan.

Strategi penggalangan dukungan dari tokoh agama, masyarakat, organisasi lintas etnis, artis nasional, hingga kelompok pemuda dan perempuan ini terbukti efektif memperluas basis suara, memperkuat legitimasi, serta membangun citra Mitha-Wurja sebagai pasangan yang inklusif, responsif, dan dipercaya lintas kelompok di Brebes. Pendekatan komprehensif ini menjadi salah satu kunci utama

dalam menghadapi dinamika politik dan aksi nyata Gertak di Pilkada Brebes 2024.

2. Strategi Defensif Pasangan Tunggal

Strategi defensif ini digunakan untuk mempertahankan dan memperkuat basis dukungan yang telah dimiliki pasangan tunggal Mitha-Wurja, terutama dalam menghadapi serangan isu politik sensitif yang diangkat oleh Gerakan Kotak Kosong (Gertak). Berbeda dengan strategi ofensif yang fokus pada perluasan dukungan, strategi defensif menitikberatkan pada upaya menjaga loyalitas pemilih, mengelola persepsi publik, serta menutup celah serangan lawan melalui respons yang terukur dan adaptif. Pendekatan ini sejalan dengan teori Peter Schroder yang menekankan pentingnya komunikasi dua arah, penguatan citra positif, dan pengelolaan isu secara responsif agar dukungan yang sudah ada tidak mudah goyah oleh isu negatif.

Dalam konteks Pilkada Brebes 2024, tim pemenang Mitha-Wurja menghadapi sejumlah isu politik yang sangat sensitif, seperti tuduhan politik dinasti, masa lalu keluarga yang pernah terjerat kasus korupsi, serta keraguan terhadap kapasitas kepemimpinan perempuan muda. Isu-isu ini dimanfaatkan oleh Gertak untuk membangun keraguan di tengah masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang

menjadi basis mereka. Untuk itu, strategi defensif Mitha-Wurja dijalankan melalui beberapa langkah utama berikut

a) Pengendalian Opini Publik melalui Media

Tim pemenangan pasangan tunggal Mitha-Wurja sangat menekankan pentingnya pengendalian opini publik, khususnya melalui media massa dan media sosial. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah mengatur agar media lokal tidak memberi ruang bagi narasi kotak kosong maupun memberitakan secara masif aktivitas Gertak yang dapat memperkuat pengaruh mereka di masyarakat.

Upaya pengendalian opini publik oleh tim pemenangan pasangan tunggal Mitha-Wurja tidak lepas dari pemanfaatan jaringan relasi keluarga Mitha, terutama pengaruh ayahnya yang merupakan mantan Bupati dan memiliki kedekatan dengan sejumlah pemilik media lokal. Melalui jaringan ini, tim pemenangan melakukan pendekatan personal kepada pemilik dan redaksi media agar pemberitaan lebih selektif, serta menahan atau membatasi liputan mengenai masifnya aktivitas dan kampanye Gerakan Kotak Kosong (Gertak) di berbagai wilayah Brebes.

Contoh media lokal yang disebut-sebut membatasi pemberitaan terkait kerusuhan demo 24 November 2024 adalah *Pantura News*, *Portal Pantura*, dan *Suara Merdeka*

Pantura. Media-media ini tidak hanya membatasi pemberitaan negatif, tetapi juga didominasi oleh berita-berita positif mengenai program, kegiatan, dan keberhasilan pasangan Paramitha-Wurja. Hal ini menunjukkan adanya pengelolaan konten yang cenderung memfavoritkan pasangan tunggal, sehingga narasi dan aktivitas Gertak yang berpotensi menguatkan gerakan kotak kosong kurang mendapat ruang di media lokal tersebut.

Salah satu bukti nyata strategi ini adalah minimnya pemberitaan media lokal mengenai insiden penting seperti anggota relawan Mitha-Wurja yang membawa senjata api saat demo pada 24 November 2024. Koordinator Gertak, Slamet Maryoko, mengungkapkan dalam wawancara pada 25 Februari 2025,

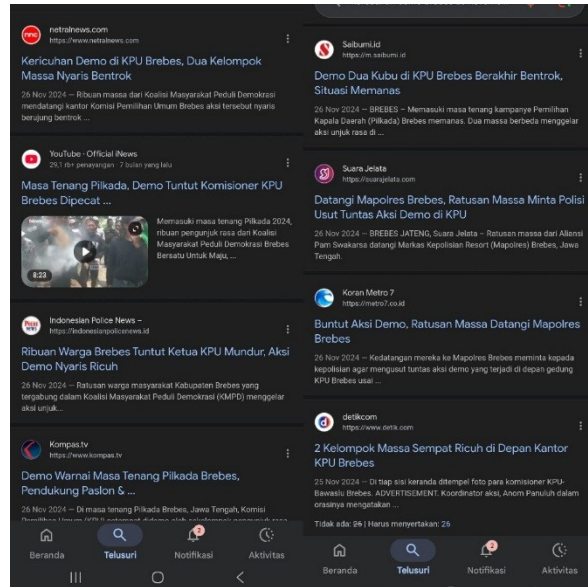
“Tim Mitha itu sangat mengandalkan relasi keluarga, terutama ayahnya yang punya kedekatan dengan pemilik media lokal. Mereka berani ‘ngasih uang lebih’ ke media-media itu, meskipun saya nggak tahu persis berapa jumlahnya, supaya berita tentang kami, terutama soal yang negatif, tidak banyak diunggah. Contohnya waktu demo 24 November 2024, ada anggota relawan mereka yang bawa senjata api.

Itu kan hal penting yang harusnya masyarakat tahu, tapi nyatanya cuma sedikit banget media yang memberitakan. Padahal itu bukti nyata kalau Mitha-Wurja pakai cara-cara kotor untuk melawan kami. Coba mbak cari di internet itu sedikit loh mbak yang memberitakan soal ini. Padahal kan harusnya viral” Kata Bapak Slamet Maryoko.

Narasi ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui kejadian tersebut. Salah satu warga Desa Limbangan Wetan, Yanto, mengaku tidak pernah mendengar atau membaca berita tentang insiden itu.

“Saya warga biasa di sini, Mbak, gak ikut partai apapun. Tapi saya sama sekali nggak tahu kalau waktu demo ada yang bawa senjata api. Kalau memang benar, mestinya itu jadi berita besar dan viral supaya kami tahu kondisi sebenarnya. Tapi saya nggak pernah lihat atau dengar apa-apa soal itu,” ujarnya.

Gambar 4. 12 Pemberitaan Media Nasional dan Lokal tentang Kerusuhan Demo Pilkada Brebes, 24 November 2024



Sumber : Screenshot hasil pencarian *Google News* oleh penulis mengenai pemberitaan kerusuhan demo Pilkada Brebes, diambil pada 30 Maret 2025.

Upaya pengendalian opini publik oleh tim pemenangan pasangan tunggal Mitha-Wurja terlihat dari terbatasnya pemberitaan negatif mengenai insiden kerusuhan demo 24 November 2024. Hal ini dibuktikan dengan hasil pencarian di *Google News* yang hanya menampilkan sebanyak 17 pemberitaan terkait insiden

tersebut, baik dari media lokal maupun nasional. Jumlah yang relatif sedikit ini menunjukkan bahwa pemberitaan mengenai kejadian penting tersebut tidak tersebar luas di ruang publik termasuk masyarakat Brebes.

b) Money Politics (Politik Uang)

Dalam dinamika Pilkada Brebes 2024, praktik politik uang menjadi salah satu strategi nyata yang digunakan oleh kedua kubu, baik tim pemenangan Mitha-Wurja maupun Gertak. Tim Mitha-Wurja membagikan uang tunai dan sejumlah bantuan kepada masyarakat, yang kerap dikemas dengan dalih sedekah, bantuan sosial, atau program kepedulian. Langkah ini diambil sebagai upaya mempertahankan dan mengunci dukungan, terutama di wilayah-wilayah rawan yang menjadi basis Gertak. (Bunga Pransa Silaban, 2024)

“Kita di Gertak ini kan bukan partai politik resmi, nggak didukung oleh partai manapun juga. Jadi, menurut kami, sah-sah saja kalau kita bagi-bagi uang kepada para petani untuk menarik dukungan kembali. Tapi coba pikir, masa mereka cuma diberi Rp50.000 untuk lima tahun masa kepemimpinan? Itu kan tidak sebanding dengan

apa yang mereka perjuangkan” Ujar Slamet Maryoko. Pada 25 Februari 2025.

“Masa mau dipimpin sama anak mantan koruptor? Kami curiga, uang yang dibagikan itu juga bisa jadi uang hasil yang tidak halal, uang haram. Kami di sini berjuang agar masyarakat tidak gampang percaya dengan uang receh yang cuma buat beli suara sesaat. Petani berhak dapat yang lebih dari sekedar janji dan uang kecil yang mungkin berasal dari cara-cara kotor. Jadi, kalau ada yang bilang kami salah bagi-bagi uang, ya itu biasa, karena kami memang bukan partai resmi, kami bergerak dari rakyat untuk rakyat. Kami ingin masyarakat sadar dan memilih dengan hati nurani, bukan karena uang sesaat.” Lanjut Bang Jarot.

Tindakan menggunakan cara politik uang ini juga merupakan respon langsung dari tim pemenangan terhadap strategi serupa yang dijalankan oleh Gertak, di mana Gertak secara terbuka membagikan uang sebesar Rp50.000 kepada para petani. Pemilihan petani sebagai sasaran utama baik dari sisi pasangan tunggal dan Gertak, strategi pembagian uang sangat logis mengingat mayoritas

penduduk Brebes bermata pencaharian sebagai petani. Dengan jumlah petani yang sangat besar, mereka menjadi kelompok pemilih signifikan yang mampu menentukan arah kemenangan Pilkada. Oleh karena itu, pengaruh terhadap kelompok ini sangat strategis bagi pasangan tunggal dalam menjaga basis dukungan dan mengurangi peluang gerakan kotak kosong untuk merebut suara.

Pemberian uang oleh Gertak ini bertujuan untuk menarik kembali dukungan dari kelompok tani yang sebelumnya menjadi basis penting dalam pemenangan pasangan tunggal. Persaingan dalam pemberian insentif finansial ini menunjukkan bahwa politik uang masih menjadi instrumen efektif dalam mempengaruhi pilihan politik masyarakat Brebes, khususnya di kalangan pemilih rentan dan ekonomi lemah.

Dengan demikian, pembagian uang dan bantuan oleh kedua kubu tidak hanya menjadi alat kampanye, tetapi juga strategi defensif untuk menjaga agar basis dukungan tidak berpaling ke kotak kosong, sekaligus menahan laju pengaruh Gertak di akar rumput.

c) Perusakan APK Gertak

Persaingan antara tim Mitha-Wurja dan Gertak tidak hanya terjadi melalui kampanye dan program, tetapi juga lewat atribut kampanye yang dipasang di berbagai tempat.

Salah satu kejadian yang sering terjadi adalah perusakan alat peraga kampanye (APK) milik Gertak oleh pendukung Mitha-Wurja. Tindakan ini sebenarnya merupakan balasan atas perusakan yang lebih dulu dialami tim Mitha-Wurja, di mana spanduk, baliho, atau poster mereka juga banyak dirusak atau dicopot oleh pendukung Gertak di beberapa daerah.

“Kalo ngga merasa kita sebagai ancaman harusnya itu gausah panik, tapi mereka juga sama loh ngerusakin baliho-baliho kita, terus pilox-pilox an di jalanan juga di aspal malam-malam. Ya walaupun pihak sana bilangnye bukan dari pihak sana yang ngerusak, terus siapa yang ngerusak ya kan mbak?”, Ucap Bang Jarot.

*“Pihak sana juga takut kalo warga tuh tahu ada Gertak. Jadi mereka berusaha buat hilangin atribut kita. Padahal kan bisa bersaing secara sehat. Biarkan warga yang memilih mau dukung paslon tunggal atau mau dukung bareng kita buat menangin kotak kosong. Mereka bilangnye kita hanya orang-orang gabut yang ga ada kerjaan. Padahal kerjaan kita buat menyadarkan masyarakat Brebes itu juga susah loh mbak”.
Lanjutnya*

Aksi saling merusak APK ini banyak terjadi di lingkungan yang menjadi rebutan kedua pihak, seperti di pinggir jalan, pasar, dan tempat umum lainnya. Walaupun tindakan ini tidak dibenarkan, perusakan APK Gertak dilakukan sebagai bentuk respons agar atribut kampanye Mitha-Wurja tetap terlihat oleh masyarakat dan tidak kalah ramai dibandingkan milik Gertak. Fenomena ini memperlihatkan bahwa persaingan Pilkada tidak hanya soal gagasan, tapi juga soal siapa yang lebih menonjol secara visual di tengah masyarakat.

3. Efektivitas dan Evaluasi dari Strategi yang digunakan Pasangan Tunggal

Strategi yang dijalankan oleh pasangan tunggal Paramitha-Wurja dalam menghadapi Gertak pada Pilkada Brebes 2024 dapat dikatakan cukup efektif dalam beberapa aspek penting:

a) Pencapaian Target Kemenangan

Pasangan Paramitha-Wurja berhasil memenangkan Pilkada dengan perolehan suara 59,60%. Walaupun angka ini masih di bawah target awal tim kemenangan yang menargetkan 75%, hasil tersebut tetap menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan mampu mengamankan suara mayoritas di

tengah tekanan kuat dari gerakan kotak kosong (Gertak).

Gambar 4. 13 Hasil Perolehan Pilkada Brebes Tahun 2024



(Sumber: Instagram @KPU Brebes)

Keberhasilan ini juga menandakan efektivitas strategi dalam mempertahankan basis dukungan dan menahan laju suara kotak kosong, meskipun dinamika di lapangan dan tekanan sosial politik dari Gertak berlangsung cukup intens.

b) Penguatan Citra dan Legitimasi

Melalui kampanye narasi positif, penguatan citra kandidat, serta mobilisasi tokoh masyarakat dan agama, pasangan tunggal mampu membangun persepsi positif di sebagian besar masyarakat. Pendekatan politik berbasis agama terbukti efektif, terutama di wilayah dengan basis pemilih religius, karena dukungan dari tokoh agama lokal memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat. Keterlibatan tokoh agama juga memperluas jangkauan pesan kampanye hingga ke tingkat akar rumput, serta memperkuat persepsi bahwa pasangan Paramitha-Wurja adalah pilihan yang sah dan bermoral bagi masyarakat Brebes.

c) Pengelolaan Isu dan Krisis

Strategi defensif seperti klarifikasi isu, pengendalian opini publik, dan penanganan konflik di lapangan dijalankan secara responsif dan terkoordinasi. Tim pemenangan secara rutin memantau perkembangan isu, respons masyarakat, dan distribusi materi kampanye, sehingga dapat menyesuaikan pesan dan metode kampanye secara real-time. Langkah-langkah seperti kampanye door-to-door, deklarasi

kampanye damai di 17 kecamatan, pembentukan posko relawan di 297 desa, serta kampanye media sosial yang kreatif, terbukti efektif dalam membangun kedekatan dan meningkatkan engagement, khususnya di basis pendukung utama.

d) Kekuatan Koordinasi dan Adaptasi

Salah satu keunggulan utama strategi Paramitha-Wurja adalah koordinasi yang solid antara tim pusat dan tim wilayah. Setiap wilayah secara aktif melaporkan perkembangan di lapangan, sehingga strategi dapat diadaptasi dengan cepat sesuai kebutuhan dan dinamika yang terjadi. Fleksibilitas dalam menyesuaikan pesan kampanye dan metode pendekatan menjadi kunci dalam menjaga efektivitas strategi di tengah tantangan dari Gertak.

Evaluasi strategi pasangan tunggal dalam Pilkada Brebes 2024 berikut ini disusun berdasarkan data lapangan nyata, laporan mingguan, dan catatan evaluasi internal dari tim pemenang Paramitha-Wurja selama masa kampanye:

1) Kelemahan atau Keterbatasan Strategi

Meski strategi sudah berjalan efektif di banyak wilayah, inovasi dalam merangkul kelompok masyarakat kritis, khususnya pemilih muda dan pendukung Gertak, masih kurang optimal. Dialog komunitas dan forum aspirasi rakyat hanya terlaksana sebagian, terutama di wilayah dengan resistensi tinggi dari Gertak. Selain itu, penggunaan strategi bantuan sosial dan praktik politik uang, walaupun efektif di wilayah pelosok dan pedesaan, justru menimbulkan persepsi negatif di kalangan pemilih muda dan terdidik yang lebih sensitif terhadap isu integritas dan etika politik.

2) Arah Pengembangan Strategi ke Depan

Azmi menjelaskan bahwa refleksi dari tim pemenangan menunjukkan perlunya pengembangan strategi yang lebih partisipatif dan transparan. Upaya seperti memperluas forum diskusi publik, meningkatkan keterbukaan program, serta mengedepankan kampanye berbasis isu nyata yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dinilai dapat memperkuat dukungan. Penyesuaian gaya komunikasi, seperti penggunaan konten yang ringan dan humor lokal di media sosial, terbukti efektif dalam

menarik perhatian pemilih muda dan dapat terus dikembangkan. Selain itu, penguatan dialog konstruktif dan edukasi pemilih di wilayah yang masih menunjukkan resistensi menjadi langkah penting untuk memperluas basis dukungan dan mengurangi suara protes di masa mendatang.

3) Potensi Risiko di Masa Mendatang

Laporan evaluasi internal juga menyoroti bahwa jika suara kotak kosong tetap tinggi pada pilkada berikutnya dengan calon tunggal, pasangan calon dan partai politik harus mewaspadaai potensi delegitimasi, polarisasi sosial, dan penurunan partisipasi politik yang dapat menghambat efektivitas pemerintahan dan stabilitas demokrasi lokal. Oleh karena itu, evaluasi berkelanjutan dan komitmen terhadap etika politik yang berpihak pada rakyat menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik dan kualitas demokrasi.

BAB V

HAMBATAN DAN TANTANGAN PASANGAN TUNGGAL DALAM MELAWAN GERAKAN KOTAK KOSONG PADA PILKADA BREBES TAHUN 2024

A. Hambatan dan Tantangan

Pasangan tunggal Paramitha Widya Kusuma dan Wurja (Mitha-Wurja) menghadapi tantangan yang cukup berat dalam Pilkada Brebes 2024, terutama dari Gerakan Kotak Kosong (Gertak) yang aktif menggalang dukungan sebagai bentuk protes terhadap minimnya pilihan demokrasi. Berikut adalah beberapa hambatan dan tantangan utama yang menjadi fokus perjuangan pasangan tunggal dalam menghadapi Gertak.

1. Tantangan Narasi dan Kepercayaan Masyarakat

Gertak secara konsisten membangun narasi bahwa kehadiran calon tunggal merupakan kemunduran demokrasi dan membatasi hak pilih masyarakat. Narasi ini diperkuat melalui media sosial, aksi simbolik, dan kampanye door-to-door yang menasar kelompok strategis seperti petani bawang merah, pelaku UMKM, pemilih muda (*Gen-Z*) dan lansia.

*“Lagi-lagi mereka ini selalu menyebarluaskan berita
hoaks. Apalagi kan warga yang pelosok atau maaf
pendidikan nya rendah itu gampang sekali di doktrin*

berita-berita hoaks. Narasi-narasi mereka yang membuat warga yang tadinya sudah tau tentang mbak Mitha cocok untuk jadi bupati ehh malah di doktrin untuk jangan milih Mbak Mitha. Padahal ya milih kotak kosong itu ga ada manfaatnya, yang ada malah menghabiskan dana untuk nantinya pilkada lagi.”
Ujar Azmi.

Selain itu, Gertak juga memanfaatkan momentum ketidakpuasan publik untuk memperluas pengaruhnya, terutama dengan menyebarkan isu-isu seperti anak mantan koruptor, politik dinasti, integritas calon, dan keraguan atas pengalaman kepemimpinan yang baru memiliki pengalaman dibidang politik selama 5 tahun. Mitha yang masih muda serta statusnya sebagai perempuan. Latar belakang keluarga politikus Mitha dan kasus hukum yang pernah menimpa keluarganya dijadikan bahan utama untuk meragukan kredibilitas pasangan calon tunggal.

“Saya pilih kotak kosong sebenarnya kurang yakin sama calon tunggal, karena ya bener apa yang tersebar. Saya jadi kurang yakin gitu loh kalo nantinya menang itu nanti bener-bener niatnya buat Brebes atau emang buat memperkaya” ujar salah satu

pemilih muda yang identitasnya tidak ingin disebutkan.

“kalo aku milih kotak kosong karena yaudah biar dipimpin sama PJ Bupati aja dulu sampai pilkada ulang. Gatau kaya ga percaya aja sama Paramitha, kek trust issue kalo bupatinya perempuan lagi. Soalnya tuh kalo perempuan itu cuma peduli sama award-award aja, padahal kita masyarakat Brebes tuh ga butuh loh award-award kaya gitu. Di reallife padahal Brebes se-ga maju itu tapi ko bisa dapet award-award”. Ujar pemilih muda lainnya.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan penulis terhadap pendapat pemilih muda terutama milenial akhir dan *Gen-Z* di beberapa kecamatan, mayoritas dari mereka mendukung kotak kosong dengan alasan yang cukup konsisten. Mereka memandang Gerakan Kotak Kosong (Gertak) sebagai langkah awal untuk mendorong kemajuan Kabupaten Brebes dan menghindari dominasi partai politik dalam pengambilan keputusan. Sikap kritis dan kesadaran politik yang tinggi membuat tim pemenang menghadapi kesulitan dalam meraih dukungan dari kelompok pemilih muda ini, yang berbeda dengan generasi sebelumnya seperti generasi X

dan generasi *baby boomers* yang cenderung lebih mudah digapai dan memiliki pola pikir politik yang berbeda dengan generasi muda.

Tantangan legitimasi atau kepercayaan masyarakat juga semakin nyata ketika suara kotak kosong dalam *real count* Pilkada mencapai 40,40% di Brebes. Angka ini tidak hanya menunjukkan adanya protes masyarakat, tetapi juga memperkuat narasi Gertak bahwa kemenangan pasangan tunggal secara angka belum tentu diikuti oleh legitimasi politik yang kuat. Selain itu, penurunan tingkat partisipasi pemilih di wilayah perkotaan dan beberapa desa menjadi indikator bahwa kepercayaan publik terhadap proses demokrasi sedang mengalami ujian serius.

Tingginya suara kotak kosong dan partisipasi pemilih yang relatif rendah juga menjadi tantangan bagi pasangan tunggal Paramitha-Wurja. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih meragukan proses demokrasi yang berlangsung dan menganggap kehadiran calon tunggal sebagai pilihan yang tidak ideal.

Tabel Tabel 6.1 Data Partisipasi Pemilih Jawa Tengah pada Pemilu 2024

No	KAB/KOTA	Presentase
1	Kabupaten Banjarnegara	71.66%
2	Kabupaten Banyumas	77.77%

3	Kabupaten Batang	73.54%
4	Kabupaten Blora	73.93%
5	Kabupaten Boyolali	83.66%
6	Kabupaten Brebes	64.46%
7	Kabupaten Cilacap	69.14%
8	Kabupaten Demak	71.46%
9	Kabupaten Grobogan	67.2%
10	Kabupaten Jepara	72.37%
11	Kabupaten Karanganyar	82.72%
12	Kabupaten Kebumen	67.14%
13	Kabupaten Kendal	76%
14	Kabupaten Klaten	77.54%
15	Kabupaten Kudus	86.01%
16	Kabupaten Magelang	83.18%
17	Kota Magelang	82.18%
18	Kabupaten Pati	70.14%
19	Kabupaten Pekalongan	73.08%
20	Kota Pekalongan	75.98%
21	Kabupaten Pemalang	66.93%
22	Kabupaten Purbalingga	73.54%
23	Kabupaten Purworejo	71.92%
24	Kabupaten Rembang	80.58%
25	Kota Salatiga	85.26%
26	Kabupaten Semarang	77.33%

27	Kota Semarang	76.05%
28	Kabupaten Sragen	73.02%
29	Kabupaten Sukoharjo	79%
30	Kota Surakarta (Solo)	78.84%
31	Kabupaten Tegal	69.92%
32	Kota Tegal	75.17%
33	Kabupaten Temanggung	86.87%
34	Kabupaten Wonogiri	71.22%
35	Kabupaten Wonosobo	72.71%

Sumber : Kesbangpol Jawa Tengah

Berdasarkan data dari Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jawa Tengah, partisipasi pemilih di Kabupaten Brebes pada Pemilu Februari 2024 tercatat paling rendah, yaitu hanya 64,46%, dan berada di urutan terakhir dibandingkan kabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Kondisi ini memperkuat indikasi rendahnya kepercayaan publik terhadap proses pemilihan yang ada.

“Saya merasa dengan hanya satu calon, pilihan kami jadi terbatas. Rasanya pencoblosan jadi kurang hidup karena nggak ada alternatif lain. Makanya saya lebih memilih kotak kosong sebagai bentuk protes,” ujar Vita, pemilih muda di Kecamatan Jatibarang.

“Lagian siapa pun yang jadi pemimpin, Brebes tetap sama saja. Jadi saya sama yang lain males datang ke TPS karena ya buat apa, ujung-ujungnya saya tetep gini-gini aja hidupnya,” kata Pak Slamet, seorang petani di Kecamatan Tonjong.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat, banyak pemilih yang memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya karena hanya tersedia satu calon pasangan. Mereka merasa enggan mengeluarkan waktu dan tenaga untuk memilih dan datang ke TPS, karena merasa hasilnya sudah pasti dan tidak ada alternatif lain. Selain itu, sebagian masyarakat beranggapan bahwa siapa pun pemimpinnya, kondisi Kabupaten Brebes akan tetap sama, sehingga partisipasi mereka menjadi kurang antusias.

2. Hambatan Komunikasi dan Penyebaran Informasi

Upaya tim Mitha-Wurja untuk menyampaikan program-program unggulan, seperti subsidi harga bawang dan pemberdayaan UMKM, kerap dihadapkan pada narasi kontra dari Gertak. Dalam beberapa kasus, pesan kampanye pasangan tunggal dipelintir atau disalahartikan, sehingga menimbulkan sentimen negatif di masyarakat.

Gambar 5.1 Contoh persebaran narasi kontra di media sosial dapat dilihat pada video berikut ini yang beredar di *TikTok*.



(Sumber : Tiktok)

Misalnya, janji subsidi harga bawang merah Rp. 13.000 dianggap tidak realistis dan dipakai sebagai bukti kurangnya pemahaman Paramitha terhadap isu ekonomi lokal, apalagi bawang merah yang merupakan *icon* Brebes. Gertak memanfaatkan celah ini untuk memperkuat narasi bahwa calon tunggal tidak memahami kebutuhan nyata masyarakat Brebes.

“oh yang masalah bawang itu sebenarnya, maksud dari stabilkan harga bawang jadi Rp 13.000 itu untuk subsidi langsung ke petani aja. Selanjutnya, petani bebas mau jual berapa pun sesuai pasar. Tapi sayangnya, ya ini terus-terusan digoreng sama orang-orang Gertak supaya terlihat seolah-olah kami nggak paham kondisi ekonomi lokal, padahal maksud mitha bukan itu,” jelas Azmi.

“kita udah berusaha buat ngasih tau masyarakat khususnya petani kalo itu hoaks tapi ya tetep aja mereka ini udah kemakan sama gertak gertak itu,” lanjut Azmi.

Tim pemenangan telah mencoba mengatasi hambatan ini dengan memperbanyak forum diskusi warga, melibatkan tokoh lokal, dan menguatkan komunikasi personal secara langsung. Tokoh lokal yang dilibatkan tidak hanya sebatas relawan biasa, tetapi juga mencakup ustad, mantan kepala desa, serta orang-orang yang dihormati dan memiliki pengaruh kuat di lingkungan masyarakat setempat. Peran tokoh-tokoh ini sangat penting karena mereka memiliki kedekatan emosional dan kepercayaan dari warga, sehingga

mampu menjelaskan secara rinci dan mudah dipahami mengenai kebijakan subsidi harga bawang merah Rp 13.000.

Pendekatan ini sangat penting terutama bagi generasi yang tidak aktif menggunakan media sosial atau teknologi digital, yang mungkin tidak mengetahui arti sebenarnya dari kebijakan tersebut jika hanya mengandalkan informasi dari media sosial saja. Dengan melibatkan tokoh lokal yang dipercaya, diskusi dan klarifikasi menjadi lebih efektif dalam meluruskan kesalahpahaman dan membangun kembali kepercayaan masyarakat.

Namun, penyebaran informasi negatif di media sosial masih menjadi tantangan besar yang sulit ditangani. Hal ini terutama disebabkan oleh pemilihan muda, khususnya gen-Z dan Milenial, yang lebih aktif menggunakan media sosial dibandingkan mengikuti kampanye tradisional.

Media sosial memungkinkan informasi, termasuk berita palsu atau hoaks, menyebar dengan sangat cepat dan luas. Kecepatan ini sering kali membuat klarifikasi dari tim pemenangan terlambat dan kurang efektif dalam mengubah persepsi publik. Selain itu, algoritma media sosial yang cenderung memperkuat polarisasi dan menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi

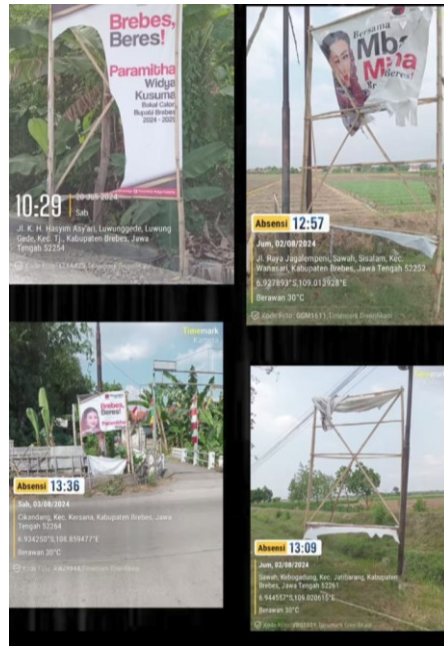
pengguna membuat pemilih muda mudah terjebak dalam *"filter bubble"* yang membatasi eksposur mereka terhadap informasi yang berimbang.

Oleh karena itu, meskipun upaya komunikasi langsung dengan tokoh lokal terus dilakukan, tantangan menghadapi arus informasi negatif di media sosial tetap menjadi salah satu pekerjaan rumah terbesar bagi tim pemenangan dalam memenangkan dukungan pemilih muda.

3. Tekanan Lapangan dan Anonimitas Gertak

Hambatan nyata juga muncul di lapangan. Relawan Gertak yang jumlahnya memang tidak besar ketimbang jumlah tim Mitha-Wurja, namun sangat militan dan terorganisasi, sering kali menghadapi stigma negatif dan tekanan sosial.

Gambar 5.2 Contoh Perusakan APK Pasangan
Mitha-Wurja oleh Gertak



Sumber : Akun Tiktok Pribadi

@ParamithaWidyaKusuma

Sebaliknya, tim Mitha-Wurja juga menghadapi perusakan atribut kampanye, hingga kericuhan menjelang masa tenang Pilkada, seperti insiden demonstrasi yang berujung ricuh dan dugaan intimidasi bersenjata yang terlampir pada Gambar. 3.5.

“Kalau soal pas demo depan KPU ada yang membawa senjata dari tim kita, itu tidak benar

atau Hoaks. Itu pasti orang-orang yang sengaja membuat kericuhan. Kita sudah berusaha untuk mengklarifikasi hal tersebut tetapi masyarakat sudah termakan hoaks. Jadi untuk kita sudah abaikan saja”. Jelas Azmi.

Azmi menjelaskan, bahwa memang orang yang disebut membawa senjata api saat demonstrasi di depan KPU tersebut pernah beberapa kali mengikuti kegiatan kampanye Mitha-Wurja dan secara informal dapat dikatakan sebagai relawan dari tim pemenangan. Namun, tindakan membawa senjata api tersebut sama sekali bukan atas perintah atau instruksi dari tim inti Mitha-Wurja. Tim pemenangan juga belum mengetahui secara pasti motif orang tersebut hingga tanggal 25 Februari 2025 kemarin, apalagi tindakannya telah menimbulkan kericuhan dan mencoreng nama baik Mitha-Wurja.

Lebih lanjut, Azmi mengungkapkan bahwa pihaknya masih belum dapat memastikan apakah orang tersebut merupakan mata-mata dari Gerakan Kotak Kosong (Gertak) atau memiliki motif lain, sehingga hal ini menjadi salah satu tantangan dalam menjaga soliditas dan keamanan internal tim.

“Padahal itu udah jelas loh mbak. Kalo orang yang di vidio ini itu relawan mereka. Wong saya sering liat ko kalo dia ini selalu hadir di acara kampanye nya Mitha. Tapi ya gitu seolah-olah ga ngaku. Takut kali kalo cara kotornya ketahuan sama masyarakat. Makanya kita Gertak ini ada buat yaa ini pengen masyarakat Brebes melek kalo Mitha itu pake cara kotor. Masa Brebes mau dipimpin sama Bupati yang pake cara kotor gitu.”

Ucap Bang Jarot.

Berbeda dengan jawaban Bapak Slamet Maryoko selaku koordinator Gertak. Bahwasanya Gertak yakin identitas seseorang yang membawa senjata api pada aksi demo depan KPU Brebes adalah suruhan oleh pihak Paslon tunggal.

Salah satu tantangan lainnya yang dihadapi adalah keberadaan anggota Gertak yang *anonim*. Sebagian relawan memilih tetap di belakang layar, entah itu karena alasan keamanan, pekerjaan, atau kekhawatiran terhadap ancaman dari pihak tertentu. Hal ini membuat tim pasangan tunggal kesulitan dalam memetakan kekuatan lawan dan mengantisipasi strategi yang akan dijalankan Gertak.

Bahkan, keberadaan anggota Gertak yang *anonim* ini berpotensi menjadi mata-mata, baik bagi Gertak maupun pihak pasangan tunggal, karena dalam beberapa grup online (seperti grup publik *Facebook*), siapa pun dapat bergabung tanpa verifikasi identitas yang ketat. Koordinator Gertak sendiri menyatakan bahwa mereka tidak terlalu memusingkan soal kemungkinan adanya mata-mata, asalkan koordinasi inti tetap solid dan strategi rahasia hanya dibahas di lingkaran terbatas

Situasi ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi tim pasangan tunggal, karena sulit untuk membedakan mana relawan Gertak yang benar-benar aktif, mana yang hanya pengamat, dan mana yang berpotensi menjadi informan. Selain itu, pola kampanye Gertak yang sering dilakukan secara mendadak dan tanpa pemberitahuan memperkuat kesan gerakan bawah tanah yang sulit dilacak dan diantisipasi.

4. Tantangan Menjaga Citra dan Membangun Kepercayaan pada Efektivitas Program

Menjaga citra positif pasangan tunggal di tengah gempuran narasi negatif dan tekanan sosial juga menjadi tantangan utama. Tim pemenang Mitha-Wurja selalu berupaya menampilkan aksi nyata, seperti pelaksanaan program-program sosial, pemberdayaan ekonomi, dan

forum aspirasi masyarakat di berbagai platform media sosial seperti *TikTok*, *Facebook*, dan *Instagram*.

Gambar 5. 3 Santunan Anak Yatim dan Pembagian Bantuan Sosial sebagai Bagian dari Strategi Kampanye Paramitha Widya Kusuma di Karangjunti, Losari



Sumber : Akun pribadi ParamithaWidyaKusuma

Bahkan, mereka aktif melakukan kampanye dengan memberikan bantuan-bantuan cuma-cuma kepada warga kurang mampu sebagai bentuk kepedulian langsung. Namun, keberhasilan program ini sering kali tertutupi oleh narasi kontra yang lebih masif di media sosial.

Mayoritas masyarakat masih memandang skeptis dan menganggap bahwa Mitha akan mengikuti jejak sang ayah yang pernah tersandung kasus korupsi. Selain itu, berbagai bantuan yang diberikan selama kampanye juga kerap dianggap sebagai pencitraan semata. Masyarakat mengaitkan hal ini dengan pengalaman masa lalu, di mana pemimpin sebelumnya melakukan kampanye serupa, namun setelah terpilih, pelaksanaan bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dinilai tidak tepat sasaran dan banyak menimbulkan masalah, seperti data penerima yang tidak valid, tumpang tindih penerima, serta potongan dana oleh oknum aparat desa. Pandangan ini memperkuat keraguan masyarakat terhadap janji-janji kampanye

Dengan demikian, hambatan dan tantangan yang dihadapi pasangan tunggal dalam Pilkada Brebes 2024 tidak hanya bersumber dari gerakan oposisi seperti Gertak, tetapi juga dari dinamika internal, persepsi publik, pola gerakan anonim yang berpotensi menjadi mata-mata, serta efektivitas strategi komunikasi dan aksi nyata di lapangan. Seluruh tantangan ini menjadi pelajaran penting dalam merancang strategi politik yang adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial serta dinamika demokrasi lokal.

BAB VI

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dipaparkan pada Bab 4 dan 5, dapat disimpulkan bahwa dari sisi pasangan tunggal, strategi pemenangan dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu strategi ofensif dan defensif. Strategi ofensif meliputi penguatan narasi legitimasi dan keberlanjutan pembangunan, mobilisasi dukungan tokoh agama dan masyarakat, kampanye simbolik melalui pemasangan atribut dan deklarasi dukungan, serta penetrasi komunikasi digital dan door-to-door.

Strategi defensif difokuskan pada pengelolaan isu dan manajemen krisis secara aktif, termasuk klarifikasi terhadap tuduhan intimidasi, isu money politik, serta pengendalian dan perlindungan atribut kampanye dari aksi perusakan atau vandalisme. Tim pemenangan secara khusus melakukan pengendalian media untuk meminimalkan pemberitaan negatif terkait Gertak, sehingga opini publik lebih banyak terpapar narasi positif pasangan tunggal.

Di sisi lain, Gerakan Kotak Kosong (Gertak) juga menerapkan strategi yang terorganisir dan efektif

meskipun tanpa dukungan partai politik besar. Gertak mengedepankan pola mobilisasi berbasis komunitas dan solidaritas masyarakat, dengan aksi nyata berupa pemasangan poster dan baliho, aksi vandalisme berupa coretan di jalan-jalan, serta sosialisasi dari desa ke desa untuk mengedukasi masyarakat bahwa memilih kotak kosong adalah sah secara hukum dan demokrasi. Gertak juga aktif memanfaatkan media sosial, khususnya Facebook, dengan gaya kampanye yang lebih anonim untuk menghindari stigmatisasi negatif. Mereka menekankan bahwa aksi mereka adalah bentuk partisipasi dan kepedulian terhadap demokrasi lokal, serta sebagai ekspresi kekecewaan terhadap elit politik dan sistem yang dianggap kurang adil.

Efektivitas strategi kedua pihak tercermin dari hasil Pilkada Brebes 2024, di mana pasangan Paramitha–Wurja memperoleh 59,60% suara dan kotak kosong memperoleh 40,40%. Angka suara kotak kosong yang signifikan menjadi refleksi nyata adanya protes dan ketidakpuasan masyarakat terhadap proses demokrasi yang berjalan. Meski pasangan tunggal berhasil memenangkan Pilkada, tingginya suara kotak kosong menjadi tantangan tersendiri dalam membangun legitimasi dan kepercayaan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2024). Calon Tunggal Dalam Politik Kotak Kosong Dan Kekuasaan Partai Pada Pilkada. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(8), 2992–3005.
<https://doi.org/10.56338/jks.v7i8.5945>
- Apriadi. (2023). Problematika Kotak Kosong Pada Satu Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah dalam Perspektif Demokrasi Indonesia. In *Nucl. Phys.* (Vol. 13, Issue 1).
- Bawaslu, P. (2024). *PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BREBES TAHUN 2024*.
- Bunga Pransa Silaban, H. S. (2024). *Jurnal Hukum Progresif*. 7(6), 41–47.
- Darmawan, I. (2017). Role and strategies of group of “kotak kosong” in pati single candidate local election 2017. *Wacana Politik*, 2(1), 45–51.
- Fajar Eko Nugroho. (2024, November 24). *KPU: LSM Satu Hati Sudah Dapat Akreditasi Pemantau Pilkada Brebes*.
- Firmansyah, J., Kariyani, L. N., & Rizkia, G. (2022). Strategi Pemenangan Calon Anggota Legislatif Perempuan pada Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2019. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 4(1), 1–14.
<https://doi.org/10.18196/jpk.v4i1.16181>
- Ibrahim, H. (2022). Partai Politik Dan Strategi Pemenangan Studi atas Strategi PKS dalam Kemenangan Pasangan Mohammad Idris dan Imam Budi pada Pilkada Kota Depok Tahun *Repository.Uinjkt.Ac.Id*.

- Iskandar. (2009). *METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL (KUANTITATIF DAN KUALITATIF)*.
- Khaerah, N., & Muslimin, J. (n.d.). *Kosong Pada Pemilihan Bupati di Kabupaten Enrekang*. 16–23.
- Kholidah, L. (2020). *Strategi Pemenangan Anggi Noviah dalam Pemilihan Calon Legislatif Kabupaten Indramayu Tahun 2019*. 1–180.
- KPU. (2024). *Tahapan dan Jadwal Pilkada Serentak Tahun 2024*. Komisi Pemilihan Umum. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/12351/tahapan-dan-jadwal-pilkada-serentak-2024>
- Lestari, A. (2019). Kotak Kosong Memenangkan Pemilihan Umum Kepala Daerah. *Lex LATA*, 1(2), 80–90. <https://doi.org/10.28946/lexl.v1i2.468>
- Mahardika, A. G. (2021). Fenomena Kotak Kosong dalam Pemilukada Serta Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 1(2), 69–84. <https://doi.org/10.55108/jap.v1i2.9>
- Marbun, K. N., Silas, J., & Nurzaman, T. (2022). Gerakan Koko (Kotak Kosong): Studi Kasus Pada Pilkada Humbang Hasundutan Tahun 2020. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 3(2), 16–30. <https://doi.org/10.57266/epistemik.v3i2.95>
- Marga, U. P., & Publik, J. A. (2020). *Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Probolinggo Tahun 2018*. 2(1), 14–23.
- Maulida, K., Hertanto, H., & Kurniawan, R. C. (2021). Strategi Pemenangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 215–233.

<https://doi.org/10.14710/jiip.v6i2.11708>

- Muhammad Boim, Tri Rizky Wulandari, Beany Vas Quin, Amon Qulsepfriti, Adetiya Anggreni, Juwati Juwati, Julika Purwasih, Widiawati Widiawati, Nurliani Nurliani, Wiyah Wiyah, Sasa Sasa, & Esyi Esyi. (2023). Ulasan Buku "Il Principe"(Sang Pangeran) Karya Niccolo Machiavelli. *Khirani: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(2), 58–63. <https://doi.org/10.47861/khirani.v1i2.214>
- Mukhtar, R. S. (2019). *PANDANGAN POLITIK RELAWAN KOTAK KOSONG TERHADAP CALON TUNGGAL DI PILKADA KABUPATEN PATI TAHUN 2017*. 1–23.
- Natasya, I. A., Sakir, S., & Abhipraya, F. A. (2021). Kotak Kosong dalam Perspektif Hak Memilih dan Dipilih pada Pilkada Kabupaten Kebumen 2020. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14, 78–86. <https://doi.org/10.31947/jgov.v14i2.13885>
- Sahea, R., Niode, B., & Tulung, T. (2018). Analisis Strategi Politik Sri Wahyumi Maria Manalip-Petrus Simon Tuange dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013. *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 3–8.
- Schröder, P. (2010). *Strategi Politik edisi cetakan ketiga*. 26.
- Schroder Peter. (2013). *Strategi Politik*.
- Sucitra, I. D., Pratiknjo, M. H., & Kawung, E. J. (2024). GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 10(3), 67–68.
- Surtinah. (2021). *STRATEGI POLITIK CALON PETAHANA PASANGAN RATU TATU CHASANA DAN PANDJI TIRTAYASA DALAM MEMENANGKAN PEMILIHAN*

BUPATI KABUPATEN SERANG TAHUN 2020 SKRIPSI.

- Beritakota.id. (2024, Juni 10). Pilkada Brebes: Paramitha-Wurja unggul, suara kotak kosong signifikan. <https://beritakota.id/2024/06/10/pilkada-brebes-paramitha-wurja-unggul-suara-kotak-kosong-signifikan/>
- Beritamerdekaonline.com. (2024, November 23). Tumpah Ruah, Ribuan Warga Hadiri Kampanye Paramitha-Wurja di Lapangan Garuda Bantarkawung. Diakses pada 4 Maret 2025, dari <https://www.beritamerdekaonline.com/tumpah-ruah-ribuan-warga-hadiri-kampanye-paramitha-wurja-di-lapangan-garuda-bantarkawung/>
- Detik.com. (2024, Mei 20). Gerakan kotak kosong ramaikan Pilkada Brebes, ini respons tim Paramitha-Wurja. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-7328001/gerakan-kotak-kosong-ramaikan-pilkada-brebes-ini-respons-tim-paramitha-wurja>
- Detik.com. (2024, November 20). Paslon Mitha-Wurja Ikuti Debat KPU Brebes, Ini Program Kerjanya. Diakses pada 08 Januari 2025, dari <https://www.detik.com/jateng/pilkada/d-7629383/paslon-mitha-wurja-ikuti-debat-kpu-brebes-ini-program-kerjanya>
- G-News.id. (2024, November 27). KPU Brebes Tetapkan Paramitha-Wurja Raih Suara Terbanyak di Pilkada 2024. Diakses pada 13 Januari 2025, dari <https://www.g-news.id/brebes/amp/158744746/kpu-brebes-tetapkan-paramitha-wurja-raih-suara-terbanyak-di-pilkada-2024>
- Gesuri.id. (2024, April 10). Dinamika politik menjelang Pilkada Brebes 2024. <https://www.gesuri.id/analisis/dinamika-politik-menjelang-pilkada-brebes-2024-b2kAdZOTC>

Gesuri.id. (2024, November 23). Mitha-Wurja Pilih Berkeliling di Kabupaten Brebes pada Kampanye Hari Terakhir. Diakses pada 12 Januari 2025, dari <https://www.gesuri.id/pemilu/mitha-wurja-pilih-berkeliling-di-kabupaten-brebes-pada-kampanye-hari-terakhir-b2kGIZRQU>

Kompas.com. (2024, Maret 17). Fenomena kotak kosong di Pilkada Brebes, tantangan bagi demokrasi lokal. <https://regional.kompas.com/read/2024/03/17/07000081/fenomena-kotak-kosong-di-pilkada-brebes-tantangan-bagi-demokrasi-lokal>

Kompas.com. (2025, Januari 9). KPU Tetapkan Paramitha-Wurja sebagai Bupati-Wakil Bupati Brebes. Diakses pada 12 Januari 2025, dari <https://regional.kompas.com/read/2025/01/09/170343278/kpu-tetapkan-paramitha-wurja-sebagai-bupati-wakil-bupati-brebes>

Metrotvnews.com. (2024, November 28). Paslon Tunggal Pilkada Brebes Ungguli Kotak Kosong Versi Hitung Cepat. Diakses pada 25 Desember 2024, dari <https://www.metrotvnews.com/read/NleCpgEe-paslon-tunggal-pikada-brebes-ungguli-kotak-kosong-versi-hitung-cepat>

PanturaNews.com. (2024, Mei 15). Pilkada Brebes, Paramitha-Wurja satu-satunya pasangan calon. <https://panturanews.com/index.php/politik/berita/28660/pilkada-brebes-paramitha-wurja-satu-satunya-pasangan-calon>

Panturapost.com. (2024, November 23). Kampanye Terakhir, Ribuan Warga Antusias Arak Mitha-Wurja Keliling Brebes. Diakses pada 10 Februari 2025, dari <https://www.panturapost.com/daerah/2075346142/kampa>

[nye-terakhir-ribuan-warga-antusias-arak-mitha-wurja-keliling-brebes?page=2](#)

Netralnews.com. (2024, Mei 25). Gertak Brebes, aksi simbolik lawan calon tunggal. <https://www.netralnews.com/gertak-brebes-aksi-simbolik-lawan-calon-tunggal>

Suarajelata.com. (2024, Mei 1). Gertak Brebes, gerakan kotak kosong yang solid di Pilkada 2024. <https://suarajelata.com/2024/05/01/gertak-brebes-gerakan-kotak-kosong-yang-solid-di-pilkada-2024/>

Viva.co.id. (2024, Juni 1). Strategi kemenangan Paramitha-Wurja hadapi kotak kosong di Pilkada Brebes. <https://www.viva.co.id/berita/politik/1709876-strategi-pemenangan-paramitha-wurja-hadapi-kotak-kosong-di-pilkada-brebes>

LAMPIRAN

A. Draft Wawancara

1. Daftar Informan

- 1) Azmi Asmuni Majid, S.E. selaku Ketua Tim Sukses Pemenangan Pasangan Paramitha – Wurja tingkat Kabupaten
- 2) Slamet Maryoko, S.H. selaku Koordinator Gerakan Kotak Kosong (Gertak)
- 3) Sugiarti, Selaku perwakilan KPU Brebes
- 4) Yusuf Rahardian, S.IP. Selaku Perwakilan Bawaslu Brebes

2. Daftar Pertanyaan

- 1) Kepada Tim Sukses Pemenangan Pasangan Paramitha – Wurja
 - a) Apa strategi utama yang digunakan tim sukses untuk memenangkan pasangan Paramitha-Wurja, dan bagaimana peran koalisi partai dalam mendukung strategi tersebut?
 - b) Bagaimana penggunaan media sosial (seperti TikTok, Facebook, Instagram) serta media massa lokal dalam kampanye pasangan ini?
 - c) Siapa saja kelompok sasaran utama kampanye, dan bagaimana pendekatan dilakukan terhadap

mereka, termasuk pemilih muda, kelompok tani, nelayan, dan UMKM?

- d) Bagaimana slogan "Brebes Beres" dikomunikasikan kepada masyarakat, dan apa dampaknya terhadap penerimaan masyarakat?
- e) Bagaimana tim sukses menangani tantangan dari gerakan kotak kosong (Gertak), baik di dunia nyata maupun di media sosial?
- f) Apa strategi untuk menghadapi kritik terhadap latar belakang politik keluarga kandidat dan persepsi negatif lainnya?
- g) Bagaimana tim sukses meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan, terutama di wilayah dengan dukungan rendah?
- h) Sejauh mana strategi kampanye langsung, seperti kunjungan ke masyarakat dan pendekatan dari pintu ke pintu (door-to-door), efektif dalam meningkatkan dukungan?
- i) Bagaimana tim sukses memetakan wilayah prioritas kampanye dan menyesuaikan strategi di berbagai daerah seperti Sirampog dan Losari?
- j) Bagaimana struktur organisasi tim sukses dibentuk, termasuk peran relawan, pembagian tugas antar tingkatan, serta koordinasi di lapangan?

- k) Apa saja tantangan dalam menjaga dinamika internal koalisi yang terdiri dari banyak partai, dan bagaimana tim memastikan konsistensi pesan kampanye?
 - l) Bagaimana tim mengevaluasi efektivitas strategi kampanye, termasuk pemanfaatan data dan teknologi dalam pemantauan kemajuan?
 - m) Strategi apa yang digunakan untuk menghadapi kampanye kotak kosong yang bersifat anonim di media sosial dan meningkatkan edukasi politik masyarakat?
 - n) Dari berbagai strategi yang dilakukan, mana yang dinilai paling berhasil, dan apa faktor utama keberhasilannya?
 - o) Apakah hasil perolehan suara pasangan calon sesuai dengan target awal? Jika tidak, faktor apa yang menjadi penyebab utama?
- 2) Kepada Gerakan Kotak Kosong (Gertak)
- a) Apa alasan utama pembentukan Gerakan Kotak Kosong (Gertak) di Pilkada Brebes 2024, dan apa isu utama yang diangkat?
 - b) Apa tujuan utama Gertak dalam Pilkada ini? Apakah hanya sebagai bentuk protes atau memiliki agenda jangka panjang?

- c) Bagaimana strategi Gertak dalam menyosialisasikan pilihan kotak kosong, termasuk peran media sosial, kampanye langsung, dan pendekatan komunitas?
- d) Bagaimana gerakan ini memobilisasi dukungan masyarakat, terutama dari komunitas lokal seperti petani, nelayan, dan UMKM?
- e) Apa tantangan utama yang dihadapi oleh Gertak, baik dari stigma sebagai gerakan anti-demokrasi, tekanan pihak lain, maupun kendala internal?
- f) Bagaimana strategi Gertak dalam menghadapi respons dari pasangan calon tunggal Paramitha-Wurja dan tim suksesnya?
- g) Siapa saja pendukung utama Gertak berdasarkan usia, latar belakang ekonomi, dan pendidikan? Apakah ada tokoh masyarakat yang mendukung secara terbuka atau diam-diam?
- h) Bagaimana Gertak menyampaikan pesan bahwa memilih kotak kosong adalah bentuk partisipasi demokrasi yang sah, dan bagaimana respons masyarakat terhadap edukasi ini?
- i) Bagaimana Gertak mengevaluasi keberhasilan kampanye mereka, terutama dengan perolehan 40,4% suara kotak kosong?

- j) Apa pelajaran utama yang diambil dari pengalaman ini untuk gerakan serupa di masa depan, dan bagaimana dampaknya terhadap demokrasi lokal?
- k) Apakah Gertak berencana tetap aktif setelah Pilkada, dan apakah ada rencana kolaborasi dengan organisasi lain untuk isu politik ke depan?
- l) Bagaimana struktur organisasi Gertak dibentuk, termasuk pembagian peran, pengambilan keputusan, dan perekrutan relawan?
- m) Dari mana sumber pendanaan gerakan ini untuk mendukung aktivitas kampanye seperti poster, baliho, dan sosialisasi?
- n) Apakah ada wilayah tertentu yang menjadi fokus kampanye Gertak, dan bagaimana pendekatan seperti door-to-door digunakan untuk menjangkau masyarakat?
- o) Bagaimana gerakan ini memanfaatkan media lokal dan berkolaborasi dengan organisasi masyarakat atau LSM untuk memperkuat kampanye?
- p) Bagaimana respons pemerintah daerah atau KPU terhadap Gertak? Apakah ada upaya untuk menghambat aktivitas kampanye mereka?

- q) Bagaimana Gertak menjaga konsistensi pesannya di media sosial, terutama mengingat banyaknya kampanye anonim?
 - r) Bagaimana gerakan ini menangani reaksi negatif, stigma sebagai gerakan anti-demokrasi, serta risiko keamanan bagi relawan atau anggotanya?
 - s) Dengan hasil 40,4% suara untuk kotak kosong, bagaimana Gertak menganalisis keberhasilannya dan dampaknya terhadap dinamika politik di Brebes?
 - t) Apa yang menjadi kekuatan utama dan kelemahan dalam strategi gerakan kotak kosong?
- 3) Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Brebes
- a) Bagaimana proses KPU Brebes dalam menetapkan pasangan Paramitha-Wurja sebagai calon tunggal, dan bagaimana implementasi regulasi Pilkada tunggal berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016?
 - b) Apa langkah KPU dalam menyosialisasikan pilihan kotak kosong kepada masyarakat agar mereka memahami bahwa ini adalah opsi sah dalam demokrasi?
 - c) Apa tantangan teknis terbesar yang dihadapi KPU dalam menyelenggarakan Pilkada dengan

skenario calon tunggal, dan bagaimana cara mengatasinya?

- d) Bagaimana KPU menyikapi keberadaan Gerakan Kotak Kosong (Gertak), termasuk apakah pernah melakukan dialog atau komunikasi dengan perwakilan mereka?
- e) Bagaimana KPU memastikan kampanye gerakan kotak kosong tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan apakah keberadaan Gertak menimbulkan kendala selama masa kampanye?
- f) Apa kendala utama yang dihadapi KPU dalam sosialisasi pilihan kotak kosong, dan bagaimana cara mengatasinya?
- g) Bagaimana KPU mengevaluasi hasil Pilkada Brebes 2024, terutama terkait dengan perolehan suara kotak kosong yang mencapai 40,4%, dan apa pelajaran utama dari Pilkada tunggal ini?
- h) Apa kritik atau masukan terbesar/terbanyak yang diterima KPU selama penyelenggaraan Pilkada 2024 ini?
- i) Apa kendala yang dihadapi KPU dalam distribusi logistik pemilu, pencetakan surat suara, serta pemutakhiran data pemilih, dan bagaimana solusinya?

- j) Bagaimana KPU menjaga netralitas dalam menghadapi kritik dari gerakan kotak kosong maupun pendukung pasangan calon?
 - k) Apakah KPU melihat adanya pengaruh signifikan dari gerakan kotak kosong terhadap perilaku pemilih, dan bagaimana dinamika opini publik yang berkembang akibat gerakan ini?
- 4) Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Brebes
- a) Apa fokus utama pengawasan Bawaslu Brebes dalam Pilkada 2024, terutama dengan adanya pasangan calon tunggal, dan bagaimana strategi yang diterapkan untuk memastikan netralitas penyelenggara serta kelancaran proses Pilkada?
 - b) Bagaimana Bawaslu mengawasi kampanye pasangan Paramitha-Wurja serta gerakan kotak kosong (Gertak), termasuk dalam aspek dana kampanye, pemasangan alat peraga, dan aktivitas di media sosial?
 - c) Bagaimana Bawaslu menangani laporan pelanggaran selama Pilkada Brebes 2024, termasuk jenis pelanggaran yang paling sering ditemukan dan tindak lanjut terhadap laporan tersebut?

- d) Apakah keberadaan gerakan kotak kosong menimbulkan kendala dalam pengawasan Pilkada, dan bagaimana Bawaslu memastikan bahwa kampanye Gertak tetap sesuai dengan peraturan?
- e) Bagaimana tantangan pengawasan di wilayah terpencil dan apa langkah yang dilakukan Bawaslu untuk memastikan pengawasan tetap berjalan efektif?
- f) Apakah ada indikasi ketidaknetralan dari aparaturnya pemerintah, tokoh masyarakat, atau pihak lain selama Pilkada, dan bagaimana langkah mitigasi yang dilakukan?
- g) Bagaimana Bawaslu mengawasi kampanye anonim di media sosial dan menangani tantangan pengawasan terhadap dinamika opini publik digital?
- h) Bagaimana efektivitas pengawasan Bawaslu dalam menjaga kualitas Pilkada, dan apa pelajaran utama yang didapat dari mengawasi Pilkada dengan pasangan calon tunggal?
- i) Apa rekomendasi Bawaslu untuk memperbaiki regulasi terkait pengawasan Pilkada tunggal agar lebih transparan dan akuntabel?

- j) Bagaimana koordinasi Bawaslu dengan KPU, aparat keamanan, serta media dalam menjaga ketertiban dan transparansi Pilkada Brebes?
- k) Bagaimana Bawaslu memandang fenomena kotak kosong sebagai bagian dari demokrasi lokal, serta langkah yang disarankan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada tunggal?
- l) Bagaimana Bawaslu menilai kualitas demokrasi lokal di Brebes berdasarkan pengalaman Pilkada 2024, serta rekomendasi untuk meningkatkan pengawasan dan demokrasi dalam Pilkada mendatang?
- m) Apa rencana Bawaslu untuk meningkatkan kapasitas pengawasan, mengadopsi inovasi teknologi, serta memastikan kepercayaan publik terhadap independensi dan integritas lembaga pengawas pemilu?

**3. Wawancara dengan Ketua Tim Sukses Pasangan
Paramitha – Wurja**



**4. Wawancara dengan Koordinator Gerakan Kotak
Kosong**



5. Wawancara dengan KPU Brebes



6. Wawancara dengan Bawaslu Brebes



RIWAYAT HIDUP



A. Data Diri

1. Nama : Zidana Zianida
2. NIM : 2106016037
3. Alamat : Desa Kaligangsa RT 01 RW 04 Kulon
Kec. Brebes, Kab. Brebes
4. E-mail : zidanazianida253@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD N 01 Kaligangsa Kulon Brebes
2. SMP N 01 Ciwaringin Cirebon
3. SMA N 02 Brebes
4. UIN Walisongo Semarang

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Divisi Sponsorship dan Fundraising SAN Semarang 2022
2. Kepala Divisi Sosial dan Edukasi SAN Semarang 2023
3. Anggota Divisi PSDM DEMA FISIP UIN Walisongo 2023